



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
BELANJA DAERAH PADA PROPINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**



Disusun Oleh :

TRI PRASETYANINGSIH

015636008

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

UPBJJ UT PANGKALPINANG

2011

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalpinang, Desember 2011

Menyatakan

METAF
TEKNIK



ATCDBAAF348503589

6000



TRI PRASETYANINGSIH
NIM. 015636008

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja
Daerah Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penyusun TAPM : Tri Prasetyaningsih

NIM : 015636008

Program Studi : Magister Manajemen

Hari / Tanggal : Minggu / 18 Desember 2011

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. DEWI HANGGRAENI, M.BA
NIP. 19670108 200003 2 001

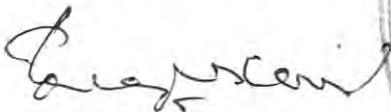
Pembimbing II



Dr. SRI SEDYANINGSIH, M.Si
NIP. 19610407 198602 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu
Magister Manajemen



CAROLUS SUPARTOMO, MM
NIP. 19521022 198203 1 001

Direktur Program Pascasarjana



SUCIATI, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

PENGESAHAN

Nama : Tri Prasetyaningsih
NIM : 015636008
Program Studi : Magister Manajemen
Judul Tesis : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu / 18 Desember 2011
Waktu : 13.00 – 15.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Sueiati, M.Sc., Ph.D

Penguji Ahli : Dr. Chairy, MM

Pembimbing I : Dr. Dewi Hanggraeni, MBA

Pembimbing II : Dr. Sri Sedyaningsih, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- (2) Dr. Maman Rumanta, Kepala UPBJJ-UT Pangkalpinang selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
- (3) Ibu Dr. Dewi Hanggraeni, MBA selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- (4) Ibu Dr. Sri Sedyaningsih, M.Si selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan TAPM ini;
- (5) Bapak Carolus Supartomo, MM, Kabid Program Studi Magister Manajemen selaku penanggung jawab program Studi Magister Manajemen
- (6) Ayahanda Tudjo dan Ibu Ngatiem, Ayahanda Syurman dan Ibu Marleni, ayuk Tutiek dan Abang Dwi serta keluarga yang telah banyak memberikan bantuaan dukungan materil dan moral;

- (7) Suami tercinta Mulya Nopriansyah dan putra terkasihku Muhammad Faizan Akram yang sudah banyak mencurahkan perhatian dan pengertiannya
- (8) Sahabat yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pangkalpinang, Desember 2011

Peneliti

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRAK

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah
Pada Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tri Prasetyaningsih

Universitas Terbuka Upbjj Pangkalpinang

Prasetyaningsih_tri@yahoo.com

Kata kunci : pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah dan belanja daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada provinsi kepulauan Bangka Belitung serta mengetahui kondisi keuangan daerah provinsi keuangan Bangka Belitung. Studi ini dibatasi pada sisi pendapatan dan berfokus pada aspek PAD provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Populasi penelitian ini adalah APBD pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung, dengan menggunakan data runtun waktu (time series) selama 8 (delapan) tahun yaitu tahun 2003 – 2010. Objek yang diteliti adalah hasil laporan keuangan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung tentang PAD dan belanja daerah dalam bentuk laporan semesteran selama delapan tahun yang terdiri dari 16 semester. Laporan keuangan selama 16 semester dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dan pengolahan data menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah secara parsial maupun secara simultan yang dinyatakan dalam koefisien determinasi (R^2) sebesar 58,60%, yang artinya belanja daerah dapat dijelaskan oleh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah sebesar 58,60% sedangkan sisanya 41,40% dipengaruhi oleh variabel lain.

*ABSTRACT**The Effect Original Regional Income to Regional Budget of Bangka Belitung Archipelago Province**Tri Prasetyaningsih**Universitas Terbuka Upbjj Pangkalpinang**Prasetyaningsih_tri@yahoo.com*

Keyword : Regional tax, regional retribution, other local revenue and regional budget.

The aim of this research is to know the effect regional income to regional budget of Bangka Belitung archipelago province and to know the condition of financial regional. The study is limited at the side of income and focus at aspect of PAD's province.

The population of research is APBD of Bangka Belitung archipelago province by using time series during 8 (eight) years, namely 2003 – 2010. The object of observation is result of financial report of Bangka Belitung archipelago province about regional income and regional budget in middle reports for eight years, consisting of 16 middle. The financial report for 16 middles has been made as sampel of the research. Data collected was secondary data and processing of data using regression linier analysis.

The result indicated that regional tax, regional retribution and other local revenue others local revenue has positive effect dan significantly on regional budget partially or simultaneously expressed in coefficient of determination (R^2) as 58,60%, it means regional budget can be explained by regional tax, regional retribution, and others legal regional income for 58,60%, and remaining 41,40% is effected by another variables.

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	
Lembar Persetujuan.....	
Lembar Pengesahan.....	
Kata Pengantar.....	
Daftar Isi.....	
Daftar Bagan.....	
Daftar Gambar.....	
Daftar Tabel.....	
Daftar Lampiran.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	7
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Keaslian Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kajian Teori.....	14
1. Kebijakan Publik.....	14
2. Keuangan Publik.....	16
a. Keuangan Negara.....	17
b. Keuangan Daerah.....	21
c. Kinerja keuangan Publik.....	23

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	32
a. Struktur APBD.....	43
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	51
1. Pajak Daerah.....	52
2. Retribusi Daerah.....	62
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan.....	69
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.....	70
c. Belanja Daerah.....	78
B. Kerangka Berpikir.....	80
C. Definisi Operasional.....	83
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	83
A. Desain Penelitian.....	86
B. Populasi dan Sampel.....	86
C. Instrumen Penelitian.....	86
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	87
E. Metode Analisis Data.....	87
F. Tahapan Penelitian.....	98
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	100
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	149
A. Simpulan.....	149
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....	151

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Kontribusi PAD terhadap Pendapatan.....	4
Gambar 1.2 Grafik Kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	6
Gambar 2.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	50
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	82
Gambar 4.1 Grafik Normalitas.....	130
Gambar 4.2 <i>Scatterplot</i>	131

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 s.d. 2010.....	3
Tabel 1.2	Perolehan Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang sah Tahun 2003 s.d. 2010.....	5
Tabel 1.3	Perhitungan Kontribusi Pajak daerah, Retribusi, Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2003 s.d. 2010.....	6
Tabel 1.4	Penelitian-Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4.1	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 s.d. Tahun Anggaran 2010.....	101
Tabel 4.2	Potensi PAD dibandingkan dengan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003 s.d. 2010.....	103
Tabel 4.3	Potensi PAD dibandingkan dengan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 s.d. 2009.....	105
Tabel 4.4	Kontribusi Pajak terhadap PAD.....	107
Tabel 4.5	Kontribusi Retribusi terhadap PAD.....	108
Tabel 4.6	Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD dan Penerimaan APBD secara keseluruhan.....	109
Tabel 4.7	Rasio derajat desentralisasi fiskal tahun 2003 s.d. 2010.....	112
Tabel 4.8	Hasil Perhitungan Upaya Fiskal Tahun 2003 s.d. tahun 2010.....	114
Tabel 4.9	Rasio Belanja rutin dan Belanja Pembangunan terhadap Total APBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun Anggaran 2003 s.d. 2010.....	116
Tabel 4.10	Rasio Efektivitas PAD.....	118
Tabel 4.11	Rasio Efisiensi PAD.....	119
Tabel 4.12	Rasio Lancar.....	120
Tabel 4.13	Rasio Kas.....	122

Tabel 4.14	Rasio Solvabilitas.....	123
Tabel 4.15	Rasio Leverage.....	124
Tabel 4.16	Nilai distribusi frekuensi komponen pendapatan asli daerah dan belanja daerah.....	126
Tabel 4.17	Uji Normalitas skewness dan kurtosis.....	129
Tabel 4.18	Rasio skewness dan kurtosis.....	129
Tabel 4.19	Uji heterokedastisitas dengan uji glejser.....	132
Tabel 4.20	Uji autokorelasi.....	133
Tabel 4.21	Uji autokorelasi dengan <i>variable lag</i>	134
Tabel 4.22	Uji multikolinieritas.....	135
Tabel 4.23	Ringkasan regresi pajak terhadap belanja.....	136
Tabel 4.24	Hasil <i>Analysis of variance</i> pajak terhadap belanja.....	137
Tabel 4.25	Model <i>coefficients</i>	137
Tabel 4.26	Ringkasan regresi retribusi terhadap belanja.....	138
Tabel 4.27	Hasil <i>Analysis of variance</i> retribusi terhadap belanja.....	139
Tabel 4.28	Model <i>coefficients</i>	139
Tabel 4.29	Ringkasan regresi lain-lain PAD yang sah terhadap belanja.....	140
Tabel 4.30	Hasil <i>Analysis of variance</i>	141
Tabel 4.31	Model <i>coefficients</i>	141
Tabel 4.32	Hasil uji <i>t</i>	143
Tabel 4.33	Hasil uji <i>F</i>	144
Tabel 4.34	Hasil uji <i>F</i> secara simultan.....	146
Tabel 4.35	Uji <i>t</i>	146

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Laporan Realisasi PAD dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2003 s.d tahun 2010..... 173
Lampiran 2	Hasil uji normalitas..... 174
Lampiran 3	Hasil uji heterokedastisitas dengan uji glejser..... 175
Lampiran 4	Hasil uji autokorelasi..... 177
Lampiran 5	Hasil uji multikolinearitas..... 187
Lampiran 6	Hasil uji regresi sederhana..... 190
Lampiran 7	Hasil uji regresi ganda..... 204

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Propinsi kepulauan Bangka Belitung tidak hanya dihadapkan pada tantangan organisasi dan manajemen pemerintahan, tetapi dihadapkan juga pada masalah-masalah keuangan daerah terutama dalam merumuskan kebijakan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Realisasi penerimaan PAD ini tentu berkorelasi dengan kondisi dinamis perekonomian daerah propinsi kepulauan Bangka Belitung. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh entitas akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Entitas akuntansi SKPD menjadi dasar penyusunan entitas pelaporan keuangan daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan keuangan ini menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Anggaran dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan terdapat sumber penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri dan sumber penerimaan pembangunan, penerimaan rutin terdiri dari penerimaan pajak langsung, pajak tidak langsung dan penerimaan bukan dari pajak (*non tax revenues*). (Syamsi, 1994: 90). Secara garis besar, sumber pembiayaan (pendapatan) ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori sumber pembiayaan. Kategori pertama adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (*external source*). Kategori kedua adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah itu sendiri (*local source*).

Musgrave dan Musgrave (1989) menyatakan bahwa anggaran belanja merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal bekerja mempengaruhi perekonomian melalui anggaran yang berfungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi. Pada dasarnya kebijakan fiskal akan mentransfer tenaga beli masyarakat (berupa pajak, keuntungan, bea, dan/atau pinjaman) kepada pemerintah dan kemudian mentransfernya kembali kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, dan didistribusikan menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu (Santoso, 1992). Dalam lingkup regional, ketiga fungsi anggaran tersebut ditempuh dengan mengalokasikan transfer ke daerah. Fisher (1996) memberikan gambaran bahwa transfer sudah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari system pemerintahannya dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Mardiasmo dkk (2000 : 3-4) menyatakan bahwa dari sisi

pendapatan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

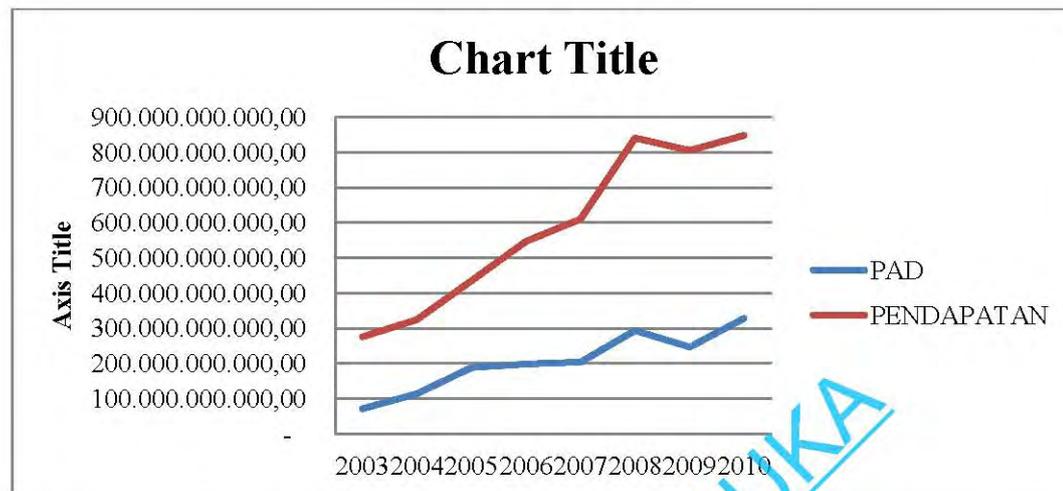
Berikut gambaran mengenai laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2003 s.d. 2010

Tabel. 1.1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 s.d. 2010

No	Tahun Anggaran	APBD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi (%)
1	2003	275.323.315.617,-	71.780.118.253,-	26,07
2	2004	324.412.640.492,-	114.368.223.031,-	35,25
3	2005	435.167.347.128,-	188.167.354.665,-	43,24
4	2006	546.961.448.176,-	198.173.311.840,-	36,23
5	2007	609.867.856.708,-	203.541.902.473,-	33,37
6	2008	840.122.438.714,-	293.161.044.155,-	34,90
7	2009	804.845.142.747,-	246.799.844.957,-	30,66
8	2010	847.410.600.510,-	328.122.025.044,-	38,72
RATA-RATA		292.756.924.381,-	102.757.114.026,-	17,40

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara grafik dapat dilihat dengan jelas gambaran seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama pada bagian pendapatannya, yakni sebagai berikut :



Gambar 1.1. Grafik Kontribusi PAD terhadap Pendapatan

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel diatas dapat dilihat secara umum bahwa kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) selalu terjadi di setiap tahunnya, namun jika dilihat dari kontribusi PAD terhadap APBD maka kontribusinya sangat fluktuatif. Selama periode 2003 s.d 2010, rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD hanya sebesar 17,40 %. Hal ini berarti PAD belum memberikan sumbangan yang maksimal terhadap APBD. Padahal PAD merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Selain itu, PAD yang di peroleh dari beberapa sumber yaitu dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya juga masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari perolehan yang cenderung fluktuatif dari masing-masing sektor tersebut serta terjadi ketimpangan yang sangat mencolok antara satu dengan lainnya. Berikut tabel kontribusi

masing-masing komponen dalam pendapatan Asli Daerah serta grafik yang menggambarkan secara umum kondisi tersebut.

Tabel. 1.2. Perolehan Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya Tahun 2003 s.d. 2010

NO	TAHUN	PAJAK	RETRIBUSI	HASIL PENG. KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
1	2	3	4	5	6
1	2003	64.805.217.056	672.495.755	-	6.302.405.442
2	2004	106.887.395.829	581.369.425	-	6.899.457.777
3	2005	172.164.295.174	638.048.522	-	15.365.010.969
4	2006	173.574.904.117	942.895.364	-	23.655.512.359
5	2007	173.292.131.932	1.265.792.882	-	28.983.977.659
6	2008	260.085.863.038	3.000.947.464	-	30.074.233.653
7	2009	215.623.984.830	4.043.047.679	1.771.547.459	25.361.264.989
8	2010	296.214.788.747	2.628.024.061	3.077.327.809	26.201.884.427
JUMLAH		1.462.648.580.723	13.772.621.152	4.848.875.268	162.843.747.275
RATA-RATA		182.831.072.590	1.721.577.644	606.109.409	20.355.468.409

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

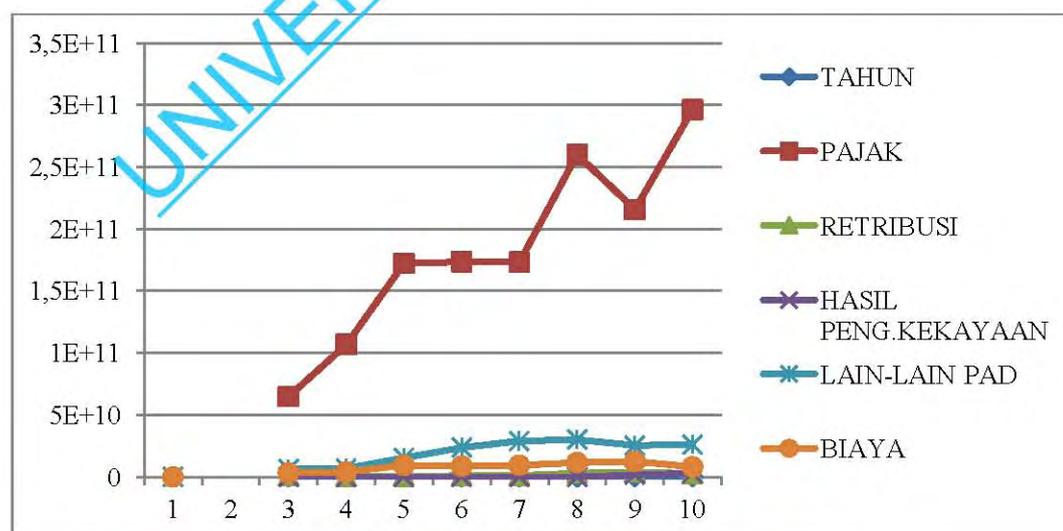
Dari hasil perolehan masing-masing komponen PAD tersebut, maka dapat dihitung nilai kontribusi dari setiap komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya terhadap nilai PAD itu sendiri. Berikut masing-masing nilai kontribusi komponen PAD tersebut.

Tabel. 1.3. Perhitungan Kontribusi Pajak daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2003 s.d. 2010

NO	TAHUN	PAJAK	RETRIBUSI	HASIL PENG.KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH LAINNYA
1	2	3	4	5	6
1	2003	90,28	0,94	-	8,78
2	2004	93,46	0,51	-	6,03
3	2005	91,50	0,34	-	8,17
4	2006	87,59	0,48	-	11,94
5	2007	85,14	0,62	-	14,24
6	2008	88,72	1,02	-	10,26
7	2009	87,37	1,64	0,72	10,28
8	2010	90,28	0,80	0,94	7,99

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov.Kep. Bangka Belitung

Secara grafik dapat dilihat bagaimana gambaran kecenderungan masing-masing komponen PAD tersebut dan kontribusi yang diberikannya terhadap PAD.



Gambar 1.2. Grafik Kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo dkk, (2000 : 3-4) menyatakan bahwa sisi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Penelitian ini menelaah keterkaitan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sebagai salah satu cara menilai kesiapan pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan otonomi daerah ditunjukkan dengan peranan pendapatan asli daerah yang signifikan dalam membiayai belanja daerah yang tercermin pada kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD daerah. Berdasarkan hasil kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”*

B. Perumusan Masalah

Menurut Devas *et.al.*, dana pemerintah untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan jumlahnya sangat kecil dibanding dengan dana masyarakat. Struktur penerimaan daerah provinsi terdapat dalam APBD Provinsi yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana perimbangan serta dari lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan publik ini diperlukan untuk membiayai pengeluaran publik yang secara umum kenyataannya volume kegiatan pemerintah dari waktu ke waktu selalu meningkat, kecenderungan ini terjadi bertitik tolak dari

perspektif bahwa salah satu peran pemerintah adalah memberikan pelayanan publik. Belanja pemerintah daerah seyogyanya dapat dibiayai dari PAD.

Namun demikian, norma tersebut tidak dapat dipertahankan. Data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan belanja pemerintah daerah cenderung tumbuh lebih cepat daripada laju pertumbuhan PAD. Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah tidak hanya mencerminkan strategi pembangunan yang belum tepat, tetapi sekaligus menunjukkan pula kelemahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan uraian yang telah Peneliti kemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini diajukan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerah pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 ditinjau dari laporan keuangan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung?
2. Apakah pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap belanja daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
3. Manakah variabel diantara pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang paling dominan berpengaruh terhadap belanja daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerah pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 ditinjau dari laporan keuangan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Untuk mengetahui variabel diantara pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang paling dominan berpengaruh terhadap belanja daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan beserta hasil-hasil penelitian mengenai analisa kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerah pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagi praktisi : penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi tambahan atau masukan bagi pejabat pemerintah daerah propinsi kepulauan Bangka Belitung baik eksekutif maupun legislatif untuk melakukan intensifikasi terhadap

perolehan pendapatan daerah sehingga belanja daerah yang dilakukan bisa tepat sasaran dan tidak terkesan menghambur-hamburkan anggaran.

2. Bagi teoritis ; penelitian ini dapat memperkaya hasil penelitian dan referensi bagi para akademisi sebagai sarana pengembangan bidang anggaran pendapatan dan belanja daerah serta untuk menambah wawasan keilmuan dan memperkuat pengalaman aplikatif fungsi keilmuan yang diperoleh dari program pasca sarjana magister manajemen pada universitas terbuka.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa hal, diantaranya :

1. Terbatas pada pengaruh pendapatan asli daerah yang meliputi unsur-unsur pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Peneliti melakukan perbandingan kemampuan keuangan daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung dengan kemampuan keuangan daerah provinsi Sumatera Utara sebagai provinsi yang dianggap telah mapan mewakili wilayah sumatera melalui pendapatan asli daerahnya dari tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2009.
3. Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan analisa keuangan pendapatan dan belanja daerah melalui laporan keuangan daerah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis pendapatan dan analisis belanja yang akan mengukur kemampuan sumber daya keuangan (pendapatan daerah) dan kemampuan pengelolaan pengeluaran (belanja daerah).

4. Penelitian ini mengambil batasan periode waktu semesteran dari tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2010.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan replikasi dan konstruksi pemikiran yang mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada daerah penelitian, waktu penelitian, lokasi serta karakteristik sosial ekonomi dan sumber daya alamnya. Penelitian-penelitian yang dimaksud tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.4.

Tabel 1.4 Penelitian-Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Judul penelitian	Variabel	Metode Penelitian
Said Fauzi S, 2004	Pengaruh pertumbuhan sektoral terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Barat	Menganalisis pengaruh pertumbuhan sektoral yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa terhadap pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi	Menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan regresi secara parsial dan simultan serta dengan koefisien determinasi
Kesit Bambang Prakosa, 2004	Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah	Menguji pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah	Menggunakan <i>simple regression</i> dan <i>multiple regression</i>
Kuncoro Thesaurianto, 2007	Analisis pengelolaan keuangan daerah terhadap kemandirian daerah	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD provinsi Jawa Tengah yaitu	Menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan regresi secara parsial dan simultan serta dengan koefisien determinasi

		transfer pemerintah pusat, jumlah kendaraan roda empat atau lebih, jumlah kendaraan roda dua dan investasi daerah.	
Hendri Edison H. Panggabean, 2009	Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Toba Samosir	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak - Retribusi - Lain-lain PAD yang sah 	Menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan regresi secara parsial dan simultan
Paidi Hidayat, 2007	Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> - PAD - Kemampuan keuangan daerah 	Menggunakan analisis pertumbuhan PAD, peranan dan peta kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran

Said Fauzi S. (2004) meneliti pengaruh pertumbuhan sektoral terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pertumbuhan sektoral yang terdiri dari pertumbuhan sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa mempengaruhi penerimaan PAD.

Kesit Bambang Prakosa (2004) meneliti tentang analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima oleh pemerintah pusat.

Kuncoro Thesaurianto (2007) melakukan penelitian besarnya tingkat ketergantungan fiskal antara provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah pusat dan pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan potensi daerah dalam rangka pengembangan kemandirian fiskal daerah

dengan judul : Analisa pengelolaan keuangan daerah terhadap kemandirian daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan semua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Hendri Edison H. Panggabean (2009) meneliti pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja di kabupaten Toba Samosir. Hasil penelitian membuktikan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah secara parsial maupun secara simultan.

Paidi Hidayat (2007) mengkaji kinerja kemampuan keuangan kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara dari aspek PAD selama periode 2001 sampai dengan 2006. Dilihat dari sisi pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran anggaran beberapa kabupaten mengalami pertumbuhan pengeluaran yang lebih besar dari pertumbuhan penerimaan, dan juga sebaliknya. Dilihat dari indikator kinerja PAD, kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan PAD yang positif tetapi relatif masih kecil peranannya (*share*) dalam struktur APBD. Berdasarkan peta kemampuan keuangan (metode kuadran), mengindikasikan ketidaksiapan masing-masing kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara dan masih kurangnya kemandirian dalam berotonomi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri atas 5 (lima) bab, yang masing-masing bab dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kerangka berpikir dan definisi operasional.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data dan metode analisa data.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang analisa data dan pembahasannya.

BAB V

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah istilah yang menunjukkan adanya proses, karena merupakan hasil keputusan atau perbuatan yang mempunyai sifat untuk dilaksanakan. Kebijakan merupakan hasil perbuatan atau pemikiran seseorang, yang mengandung berbagai macam kegiatan dan keputusan lainnya yang berkaitan dengan terrealisirnya tujuan kebijakan itu. Kebijakan mempunyai sifat yang dinamis (*dynamic concept*). Kebijakan juga dapat diartikan sebagai *skill* (keterampilan), *ability* (kemampuan), *capability* (kecakapan), *insight* (kemampuan memahami sesuatu). Dalam membuat suatu kebijakan yang baik haruslah bersifat rasional, institusional, kondisional, dan situasional dengan suatu proses sebagai berikut.

- a. Rasional, maksudnya pengambilan keputusan itu benar-benar mempergunakan data-data dan informasi-informasi yang selengkap-lengkapya.
- b. Institusional, maksudnya pengambilan keputusan harus senantiasa dengan mengingat tujuan organisasi serta memperhatikan pula hak dan kewenangannya.
- c. Kondisional, maksudnya harus selalu ingat bahwa suatu kejadian, masalah, peristiwa itu tidak akan lepas dari lingkungannya, baik lingkungan alam (*natural environment*), lingkungan fisik (*physical environment*), maupun lingkungan sosial (*social environment*).

- d. Situasional, maksudnya bahwa keputusan yang diambil itu haruslah sesuai dan dapat terselenggara dalam situasi yang hidup pada waktu itu.

Patton dan Sawicki dalam Tangkilisan (2003) menyatakan bahwa tahap implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif (pemerintah daerah) mengatur cara-cara untuk menerapkan kebijakan (dalam bentuk regulasi) sehingga mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit teknis dan prosedur yang dapat mendukung pelaksanaan program. Pengertian lainnya dari kebijakan publik adalah merupakan rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kebijakan publik menurut Chandler dan Rheno dalam Tangkilisan (2003) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Kebijakan publik menurut Anderson adalah kebijakan yang dibangun oleh badan dan pejabat pemerintahan dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah :

- a. Kebijakan publik selalu memiliki tujuan tertentu atau mempunyai tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- b. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah;
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah;
- d. Kebijakan publik yang diambil dapat bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintahan untuk tidak melakukan sesuatu;

- e. Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan (*policy makers*) bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Kebijakan publik yang digunakan oleh pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung terutama dalam bidang pendapatan dan belanja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Keuangan Publik

Peranan pemerintah dalam perekonomian modern dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilisasi (Mangkoesebroto, 1993 :2). Menurut Musgrave dan Musgrave (1984:6) peran alokasi ditujukan untuk penyediaan barang-barang publik melalui berbagai kebijakan yang bersifat mengatur (*regulatory policies*), yakni bagaimana agar sumber daya yang ada dapat digunakan untuk menghasilkan barang privat dan barang publik secara seimbang. Fungsi distribusi menekankan pada bagaimana

agar terjadi keseimbangan dan keadilan distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Sedangkan peran stabilisasi menekankan pada penggunaan kebijakan anggaran (*budget policy*) sebagai alat untuk menjaga ketersediaan kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Keuangan publik jelas memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Pengaruh keuangan negara terhadap perekonomian dapat dilihat dari perspektif mikro yang dalam bidang pengeluaran maupun penerimaan membawa pengaruh terhadap iklim menekankan pada efisiensi dan perspektif makro yang menekankan pada stabilisasi. Kebijakan pemerintah investasi, tingkat produksi barang dan jasa, distribusi barang dan jasa, pendapatan masyarakat dan sebagainya. Terdapat tiga instrumen pokok yang dimiliki pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Pertama, pajak-pajak yang bisa mengurangi konsumsi atau investasi masyarakat, serta bisa menghalangi atau sebaliknya mendorong berbagai kegiatan ekonomi tertentu. Kedua, pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bisa mendorong terjadinya peningkatan produksi, membuka kesempatan kerja, maupun peningkatan pendapatan. Serta ketiga, peraturan-peraturan atau pengawasan pemerintah yang langsung mengarahkan masyarakat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

a. Keuangan negara

Keuangan negara sering disebut juga sebagai keuangan publik, yang dalam hal ini publik diartikan secara sempit sebagai pemerintah (*government*) meskipun sebenarnya pengertian publik memiliki pengertian yang lebih luas. Publik dalam arti yang luas tidak hanya menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga menggambarkan mengenai

utilitas yaitu hal-hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Menurut Arsjad. *et.al* (1992 :2) keuangan negara mencerminkan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang keuangan, yakni dalam mencari sumber-sumber dana atau penerimaan (*source of fund*) dan bagaimana dana yang diperoleh tersebut digunakan (*uses of fund*) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Ilmu keuangan negara (*public finance*) juga dapat dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang keuangan yaitu dalam hal mencari sumber-sumber penerimaan negara dan menggunakannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran demi mencapai tujuan negara. Kajian ilmu keuangan negara terutama dipusatkan pada upaya untuk mengetahui pengaruh pengeluaran dan penerimaan negara terhadap upaya pencapaian tujuan-tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga barang dan jasa, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, distribusi pendapatan, dan sebagainya (Barata dan Trihartanto, 2004 : 3). Di Indonesia, keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pemerintah memiliki berbagai kewajiban dalam mengemban tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang telah dituangkan dalam konstitusi negara. Ruang lingkup tugas pemerintah tersebut meliputi pemeliharaan kedaulatan negara, pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara, penegakan hukum dan

keadilan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, penyediaan infrastruktur, dan sebagainya. Menurut Arsjad. *et.al* (1992 : 2), kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pada sektor publik secara garis besar meliputi 3 (tiga) hal. Pertama, transaksi-transaksi melalui anggaran (*budget transaction*) pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua, kegiatan-kegiatan perusahaan negara (*public enterprises*) milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ketiga, peraturan-peraturan pemerintah (*public regulation*) yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial dan politik masyarakat dalam suatu negara. Upaya pencapaian tujuan negara membawa konsekuensi pada pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan pada berbagai bidang. Sebagian besar dana yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut diperoleh dari masyarakat Kemajuan dalam bentuk penarikan pajak dan berbagai pungutan lainnya. Sebagian lainnya diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh badan-badan usaha milik negara. Sebagian lainnya diperoleh dari sumber-sumber pembiayaan lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk pinjaman. Menurut Barata dan Trihartanto (2004 :2), teori dan konsep mengenai persoalan mobilisasi dan alokasi dana untuk untuk menjalankan kewajiban-kewajiban negara tersebut merupakan ruang lingkup bahasan keuangan negara (keuangan publik). Dengan demikian ruang lingkup keuangan publik adalah seluruh aspek yang terkait dengan bagaimana pemerintah beserta lembaga-lembaga dibawahnya memperoleh dan membelanjakan dananya (Arsjad, 1992 :3). Perihal ini mencakup 3 (tiga)

hal. Pertama, bagaimana pemerintah melakukan mobilisasi sumber-sumber pendanaan untuk membiayai tugas-tugasnya, baik melalui pemungutan berbagai jenis pajak, pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara dari sumber bukan pajak, maupun melakukan pinjaman. Kedua, bagaimana pemerintah membelanjakan dananya, yang menyangkut kemana dana yang ada dialokasikan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan apa dana dibelanjakan, berapa besarnya, dan sebagainya. Ketiga, pengaruh-pengaruh dari kedua hal tersebut terhadap perekonomian, seperti terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Dalam analisis keuangan negara, model-model tradisional menyatakan bahwa baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah ditentukan secara simultan sebagai "kemurahan hati pemerintah" (*benevolent government*) dalam upaya pemerintah untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakatnya. Aliran teori yang berbeda-beda mengenai interdependensi antara kedua variabel tersebut berawal dari debat antara hipotesis pajak dan pengeluaran (*tax-and-spend*) dengan pengeluaran dan pajak (*spend-and-tax*). Debat tersebut tidak hanya terbatas pada tataran teoritis tetapi juga meluas ke area empirik. Kausalitas dari pengeluaran menuju kepada penerimaan (*spend-and-tax*) berarti bahwa pengeluaran berubah sebelum terjadi perubahan penerimaan. Hal ini valid ketika kenaikan pengeluaran tersebut diciptakan oleh kejadian-kejadian khusus yang menyebabkan pemerintah menaikkan pajak agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan publik. Hipotesis di atas diajukan pertama kali oleh Peacock dan Wiseman (1979). Mereka berargumen bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah (sebagai akibat dari suatu gejolak) akan berlanjut

(persistent) sungguhpun gejala tersebut telah usai. Sampai seberapa jauh peranan pemerintah pada sektor perekonomian negara tergantung pada filsafat negara itu sendiri. Dalam sistem sosialis, peranan pemerintah sangat besar, sedangkan dalam sistem kapitalis peranan pemerintah sangat terbatas. Dalam konteks pembangunan daerah, pentingnya campur tangan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada (Lincoln Arsyad, 1999 : 128).

b. Keuangan daerah

Keuangan daerah dalam arti sempit terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD, oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004 : 18), keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Halim (2004 : 20), ” Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah, sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”. Menurut Mardiasmo (2004 : 26), Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. Dimensi reformasi keuangan daerah tersebut adalah : perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan, perubahan prinsip pengelolaan anggaran, perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan deficit spending, perubahan strategi pembiayaan. Mereviu sekilas dengan rujukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman ;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga ;
3. Penerimaan daerah ;
4. Pengeluaran daerah ;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai

dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

c. Kinerja keuangan publik

Kinerja keuangan pemerintahan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bastian (2001 : 329) menjelaskan ” kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi”. Definisi yang dirumuskan oleh beberapa peneliti mengenai pengukuran kinerja cukup beragam, namun tetap bermuara pada satu kesepakatan bahwa dengan mengukur kinerja maka proses pertanggungjawaban pengelolaan atas segala kegiatannya kepada stakeholders dapat menjadi lebih objektif. Sistem pengukuran kinerja dapat membantu pengelola dalam memonitor implementasi strategi organisasi dengan cara membandingkan antara hasil (output) aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Dengan kata lain, pengukuran kinerja merupakan suatu metoda untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengukuran kinerja yang baik juga akan membantu bagi pegawai untuk menunjukkan kepada publik

dan pengambil kebijakan bahwa jasa publik telah diselenggarakan secara baik, sehingga pada akhirnya akan membentuk kepercayaan publik.

Pengukuran kinerja berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Pengukuran kinerja yang digunakan secara umum oleh perusahaan yang berorientasi pada pencapaian laba antara lain melalui penetapan rasio keuangan. Rasio yang dimaksud dalam laporan keuangan adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya. Suatu rasio tersebut diperbandingkan dengan rasio perusahaan lainnya yang sejenis, sehingga adanya perbandingan ini maka perusahaan tersebut dapat mengevaluasi situasi perusahaan dan kinerjanya. Helfert dalam Azhar (2008) memahami rasio keuangan sebagai instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut untuk menunjukkan resiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam APBD yang langsung tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Salah satu cara untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hasil rasio keuangan ini selanjutnya akan digunakan untuk tolok ukur dalam:

1. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
2. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
3. Menilai kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
4. Menilai kemampuan pemerintah daerah dalam kemampuannya untuk memenuhi kewajiban (pembayaran utang).

Penggunaan analisa rasio terhadap laporan keuangan pemerintah daerah belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisa rasio terhadap APBD perlu dilakukan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan lembaga perusahaan yang bersifat komersil. Analisa rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan yang dimiliki daerah lain terdekat ataupun yang potensi daerahnya relative sama

untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Pada sektor publik (pemerintahan), beberapa perbandingan pos-pos laporan keuangan, khususnya APBD, adalah sebagai berikut :

1. Dari format laporan realisasi APBD, terdapat dua perhitungan yaitu :
 - a. Perbandingan Realisasi vs Anggarannya
 - b. Perbandingan Realisasi Tahun Ini vs Tahun Lalu
2. Dari data APBD yang dikembangkan oleh Widodo (dalam Halim, 2007), antara lain terdapat empat perhitungan, yaitu :
 - a. Kemandirian Keuangan Daerah
 - b. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
 - c. Efisiensi Pendapatan Asli daerah
 - d. Kecerahan Belanja
3. Dari adaptasi terhadap rasio keuangan sektor bisnis, terdapat tiga perhitungan perbandingan, yaitu :
 - a. Likuiditas,
 - b. Solvabilitas, dan
 - c. Leverage

Kinerja keuangan menurut Mahmudi (2010 : 87) dapat tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan.

Bentuk dari pengukuran kinerja menurut Mahmudi (2010 : 230) bisa dilakukan dalam empat bagian yaitu :

1. Analisis kinerja pendapatan daerah
2. Analisis kinerja belanja
3. Analisis pembiayaan
4. Analisis kinerja APBD secara umum

1. Analisis kinerja pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum dilihat dari realisasi pendapatan dengan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerjanya dapat dinilai baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh. Hal ini untuk mengetahui lebih lanjut apakah pelampauan target pendapatan itu disebabkan karena *good planning* dan kerja keras pemerintah daerah ataukah hanya semata-mata *good luck* saja.

Secara umum menurut Mahmudi (2010 : 135), pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Pendapatan pemerintah daerah berbeda dengan penerimaan pemerintah daerah. Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan.

Melalui laporan realisasi anggaran, dapat dilakukan analisis pendapatan daerah antara lain dengan cara :

1. Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan.

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Tetapi jika target pendapatan tidak tercapai, hal ini butuh penelaahan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).

2. Analisis pertumbuhan pendapatan daerah.

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan

secara positif ataukah negative. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negative maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena factor ekonomi makro yang diluar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Jika peningkatan pendapatan daerah lebih rendah dari tingkat inflasi, maka pemerintah daerah harus menggunakan jalan lain yaitu melakukan efisiensi belanja secara ketat, jika tidak maka kinerja keuangan daerah akan merosot. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya. Pertumbuhan pendapatan pada tahun tertentu (t) dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pertumbuhan pendapatan tht} = \frac{\text{Pendapatan tahun } t - \text{Pendapatan tahun } t-1}{\text{Pendapatan tahun } t-1} \times 100\% \quad (2.1)$$

3. Analisis rasio keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengintepretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Alat rasio keuangan yang digunakan pada pemerintahan daerah adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (Halim, 2004: 128) yaitu :

a. Rasio Desentralisasi Fiskal Daerah

Desentralisasi fiskal daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut maka dilakukan dengan menggunakan ukuran apa yang disebut derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \quad (2.2)$$

Berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991), maka kriteria derajat desentralisasi fiskal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) 0,00% - 10% : sangat kurang
- 2) 10,1% - 20% : kurang
- 3) 20,1% - 30% : cukup
- 4) 30,1% - 40% : baik
- 5) 40,1% - 50% : sangat baik
- 6) > 50% : memuaskan

Untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagi hasil.

b. Rasio ketergantungan keuangan daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% (2.3)$$

c. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian daerahnya.

Rasio kemandirian keuangan daerah = _____ (2.4)

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Menurut Radianto dalam Thesaurianto (2007 : 28), kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan masih sering mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan PADnya. Indikator rendahnya kemampuan daerah ini dapat dilihat dari indeks kemampuan rutin (IKR) daerah yang diperoleh dari besarnya perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase tahun yang sama. Realitas hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat. Ukuran yang digunakan adalah perbandingan antara PAD dengan total pengeluaran pemerintah. Apabila rasio semakin tinggi, berarti kecenderungan tingkat kemandirian tersebut akan semakin besar.

d. Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (2.5)$$

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum menurut Mahmudi (2010 :143), nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Sangat efektif : > 100%

Efektif : 100%

Cukup efektif : 90%-99%

Kurang efektif : 75%-89%

Tidak efektif : <75%

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab

meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD.

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di laporan realisasi anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Biaya Pemungutan PAD}} \times 100\% \quad (2.6)$$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan

pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD. Menurut Mahmudi (2010 : 143), secara umum nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Sangat efisien : < 100%

Efisien : 10%-20%

Cukup efisien : 21%-30%

Kurang efisien : 31%-40%

Tidak efisien : >40%

e. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan likuiditas dalam pemerintahan juga digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang (kewajiban) jangka pendeknya. Rasio ini bisa diukur dengan rasio lancar dan rasio kas.

Rasio lancar = _____ (2.7)

Rasio kas = _____ (2.8)

f. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Perhitungan solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo. Rasio ini bisa diukur dengan rasio utang terhadap aktiva atau rasio utang terhadap ekuitas dana.

$$\text{Rasio solvabilitas} = \frac{\text{Utang}}{\text{Aktiva}} \quad (2.9)$$

g. Rasio Leverage

Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun asset. Dalam pemerintahan, perhitungan leverage digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang. Rasio ini juga bisa dianggap bagian dari rasio solvabilitas.

$$\text{Rasio leverage} = \frac{\text{Utang}}{\text{Ekuitas Dana}} \quad (2.10)$$

2. Analisis varians belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi (penghematan) atas setiap belanja

mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada *output* dan *outcome* dari anggaran. Berdasarkan informasi pada laporan realisasi anggaran, dapat dibuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa :

a. Analisis varians belanja

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu : 1) selisih disukai (*favourable variance*) dan 2) selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamanatkan dalam anggaran. Oleh karena itu, untuk mengetahui

penyebab varians tersebut DPRD perlu melakukan penelusuran dan konfirmasi langsung dengan pihak eksekutif sehingga bisa menilai apakah selisih tersebut menunjukkan kinerja anggaran yang baik atau hanya karena anggaran yang ditetapkan kurang efisien.

b. Analisis pertumbuhan belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pertumbuhan belanja Thn } t = \frac{\text{Belanja}_{t} - \text{Belanja}_{t-1}}{\text{Belanja}_{t-1}} \times 100 \quad (2.11)$$

c. Analisis keserasian belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai

alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Analisis keserasian belanja antara lain berupa :

Analisis belanja operasi terhadap total belanja

$$\text{Rasio belanja operasi thd total belanja} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \quad (2.10)$$

Analisis belanja modal terhadap total belanja

$$\text{Rasio belanja modal thd total belanja} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \quad (2.11)$$

Analisis belanja langsung dan tidak langsung

$$\text{Rasio belanja langsung thd total belanja} = \frac{\text{Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \quad (2.12)$$

d. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan total anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk melihat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Total Anggaran Belanja}} \times 100\% \quad (2.13)$$

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Syamsi (1994: 90) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *budget* (anggaran) adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Suparmoko (2000:47) mengatakan bahwa anggaran (*budget*) yakni suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya adalah satu tahun.

Pada dasarnya anggaran disusun untuk memudahkan manajemen dalam mengelola aktivitas organisasinya, termasuk pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu. Anggaran merupakan bentuk pelaksanaan salah satu fungsi manajemen, yakni perencanaan. Dalam konteks perencanaan, anggaran merupakan rencana tahunan pemerintah yang merinci aktivitas yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang sebagai pelaksanaan program-program pemerintah di berbagai bidang. Anggaran tidak dapat terpisah dari program pemerintah yang telah dituangkan ke dalam berbagai dokumen, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan bentuk rencana kegiatan lainnya. Musgrave mengemukakan bahwa fungsi anggaran sama dengan fungsi keuangan negara, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

Pembangunan daerah di berbagai bidang sangat menentukan kemajuan pembangunan negara Indonesia, pemerataan pembangunan daerah diharapkan mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi rakyat yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi

Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintahan Daerah. Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan (Mardiasmo, 2002: 103). Menurut Yunita Anggarini (2010:126), APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah dalam bentuk peraturan daerah. APBD merupakan instrument utama untuk melaksanakan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Dalam penyusunan APBD melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Perbedaan substansial antara era sebelum otonomi dengan era otonomi daerah adalah bahwa kalau sebelumnya dominasi eksekutif sangat besar dan hamper-hampir menafikan peran DPRD dan masyarakat dalam menyusun APBD, berubah ke penyusunan anggaran yang harus mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas publik, penyusunannya harus melibatkan DPRD dan masyarakat secara aktif.

Beberapa fungsi dari APBD, diantaranya :

1. Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

2. Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk memulai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
5. Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi Stabilisasi mengandung arti bahwa kebijakan APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD merupakan pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan ruman tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran. Definisi ini menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk APBD, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci;
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan;

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka;
4. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka pada era orde baru, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan. Penganggaran daerah di era reformasi memiliki karakteristik yang berbeda dari pengelolaan keuangan daerah pada era pra reformasi, hal ini diungkapkan oleh Yuwono dkk (2005:95) yang menyatakan bahwa perbedaan karakteristik penganggaran di era pra reformasi dengan penganggaran di era reformasi adalah sebagai berikut :

1. Pengertian daerah adalah provinsi dan kota/kabupaten
2. Pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta peraangkat lainnya
3. Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepala daerah dan arah kebijakan umum APBD merupakan dokumen kesepakatan antara eksekutif dengan legislative.
4. Perbedaan system output, perencanaan asas APBD memakai system surplus/defisit anggaran.
5. Susunan struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.

6. System perencanaannya adalah *performance budget*, standar pelayanan, orientasi *output-outcome*, dan *integrated*.
7. Dokumen penyusunan anggaran memakai RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja).
8. Pinjaman dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan jenis pembiayaan.
9. Dana transfer dari pusat terdiri atas dana perimbangan (dana bagi hasil, PBB, PPh, BPHTB dan SDA), DAU dan DAK.
10. System pencatatan dan pelaporan menggunakan system akuntansi berpasangan dan basis kas modifikasian.
11. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas :
 - b. Laporan realisasi anggaran
 - c. Neraca
 - d. Laporan arus kas
 - e. Catatan atas laporan keuangan
12. Dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur rencana strategis daerah (renstrada).
13. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan, tetapi masuk dalam pos penerimaan
14. Masyarakat dilibatkan dalam penyusunan APBD, di samping pemerintah daerah dan DPRD.
15. Indikator kinerja pemerintah daerah mencakup :
 - a. Perbandingan antara anggaran dan realisasi
 - b. Perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya

- c. Target dan persentase fisik proyek
- d. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun bentuknya berupa laporan perhitungan APBD yang dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah, apabila dua kali ditolak oleh DPRD.

Pada era reformasi, bentuk dan susunan APBD telah mengalami dua kali perubahan. Pada awalnya, susunan APBD (berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1975) terdiri atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran Rutin dibagi lebih lanjut menjadi pendapatan dan belanja rutin, demikian pula anggaran pembangunan dibagi lebih lanjut menjadi pendapatan dan belanja pembangunan. Susunan demikian kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pada kurun waktu tahun 1984-1988.

Karakteristik APBD pada era reformasi adalah :

1. APBD disusun oleh DPRD bersama-sama dengan kepala daerah.
2. Pendekatan yang dipakai dalam menyusun anggaran adalah pendekatan *line item* atau pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini, anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan pengeluaran. Jadi, setiap baris dalam APBD menunjukkan jenis penerimaan dan pengeluaran. Penggunaan pendekatan bertujuan mengendalikan setiap pengeluaran yang dilakukan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional (tertua) di antara berbagai pendekatan anggaran. Beberapa jenis pendekatan yang lebih maju adalah :

- a) *Program budgeting*
- b) *Performance budgeting*
- c) *Planning, programming, and budgeting system (PPBS)*
- d) *Zero based budgeting*

3. Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan, serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada menteri dalam negeri untuk pemda tingkat I dan kepada gubernur untuk pemda tingkat II, jadi pertanggungjawaban ini bersifat vertikal.

4. Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/audit terhadap APBD bersifat keuangan. Hal ini tampak pada pengawasan APBD berdasarkan objek yang meliputi pengawasan pendapatan dan pengeluaran daerah. Pengawasan tersebut tidak memperhitungkan pertanggungjawaban dari aspek lain seperti aspek kinerja.

5. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap tiga unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan hasil program (untuk proyek-proyek daerah).

6. Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan *stelsel kameral* (tata buku anggaran). Menurut sistem buku ini, penyusunan anggaran dan pembukuan saling

berhubungan dan mempengaruhi. Dasar pemilihan tata buku, yaitu *stelsel kameral* dan bukannya *stelsel komersial* (tata buku kembar/berpasangan), merupakan tujuan pembukuan.

APBD sekarang didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif. Untuk itu, dalam bentuk yang baru, APBD terdiri atas tiga bagian yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era prareformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD semakin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi pendapatan sebagai hak pemda, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak pemda. Selain itu, dalam APBD mungkin terdapat *surplus* atau *defisit*. Pos pembiayaan ini merupakan alokasi *surplus* atau sumber penutupan *defisit* anggaran. Dalam bentuk APBD yang baru, pendapatan juga dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Selanjutnya, belanja dibagi kedalam empat bagian, yaitu belanja aparatur negara, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja aparatur daerah diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga, yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pembiayaan adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup *defisit*

anggaran atau alokasi *surplus* anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah merupakan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun yang sedang berlangsung (Abdul Halim, 2007).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menerangkan bahwa Pelaksanaan APBD yaitu :

1. Semua penerimaan daerah wajib disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
3. Dalam hal peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam poin 2 tidak disetujui DPRD, untuk membiayai keperluan setiap bulan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.
4. Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk SKPD yang dipimpin berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.

5. Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
6. Pengguna anggaran berhak menguji, membebaskan pada mata anggaran yang disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBD.
7. Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan oleh bendahara umum daerah.
8. Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
9. Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada poin 8 dapat bersumber dari penyisihan atau penerimaan APBD kecuali dari DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
11. Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
13. Dalam hal dana cadangan yang belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
14. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain atas dasar prinsip saling menguntungkan.
15. Kerjasama dengan pihak lain tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah.

16. Anggaran yang timbul akibat dari kerjasama tersebut dicantumkan dalam APBD.
17. Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan belanja dari APBD yang belum tersedia anggarannya.
18. Belanja tersebut selanjutnya diusulkan dalam rencana perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
19. Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
20. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Menurut Widjaja (2002:396) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Daerah dan Daerah Otonom” menyebutkan bahwa untuk tercapainya sasaran, target, tujuan dan disiplin pelaksanaan APBD, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicantumkan dalam APBD dan dikelola sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku;
- b. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dilaksanakan melalui Kas Daerah;
- c. Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

- d. Walaupun anggaran belanja yang disediakan merupakan batas tertinggi pengeluaran, tanpa mengurangi pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan, didalam realisasi keuangannya diupayakan agar tidak seluruhnya dihabiskan;
- e. Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum APBD ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaga Daerah. Tindakan tersebut dikecualikan terhadap biaya-biaya tetap seperti gaji pegawai, tunjangan, ongkos listrik, telepon, gas dan air minum;
- f. Pemerintah Daerah dapat menunjuk LSM/Badan Non-Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan proyek tertentu.

A. Struktur APBD

Menurut Mardiasmo (2004 : 139), “krisis ekonomi telah menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas fiskal daerah (*local fiscal capacity*), karena beberapa sumber penerimaan daerah misalnya pajak dan retribusi cenderung menurun, baik jenisnya maupun nominalnya. Di sisi lain kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) daerah relatif tetap bahkan untuk beberapa jenis pengeluaran yang terkena pengaruh langsung kenaikan laju inflasi, justru cenderung meningkat. Kedua kekuatan ini berdampak pada semakin besarnya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang dihadapi daerah”.

Krisis ekonomi selain membawa dampak negatif juga membawa dampak positif, salah satunya adalah terbukanya jalan bagi munculnya sikap transparansi dan fleksibilitas system politik dan kelembagaan social, sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaruan paradigma di berbagai bidang.

Berdasarkan teori keyness, APBD dan APBN merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda- agenda pembangunan tahunan. Di bidang pengelolaan pendapatan daerah, akan terus diarahkan pada peningkatan PAD. Untuk merealisasikan hal tersebut akan dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun menggali sumber-sumber baru. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah beberapa hal penting yang perlu dilakukan antara lain dengan memperbaharui data obyek pajak, peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, peningkatan pengawasan internal terhadap petugas pajak, dan mencari sumber-sumber pendapatan lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara pada sisi belanja, kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dengan mengupayakan peningkatan porsi belanja pembangunan dan melakukan efisiensi pada belanja aparatur. Dalam kaitannya dengan pembiayaan, akan terus diupayakan peningkatan penyertaan modal pada beberapa badan usaha milik daerah agar dapat menghasilkan peningkatan PAD. Selanjutnya disiplin dan efisiensi anggaran akan secara konsisten dipertahankan dan dilaksanakan guna meningkatkan SiLPA tanpa mempengaruhi penurunan

kinerja SKPD. Bersamaan dengan itu, kebijakan pembiayaan defisit akan diarahkan penanggulangannya melalui sumber selain pinjaman daerah, mengingat masih terbatasnya sumber pendapatan asli daerah dan belum dinamisnya sektor industri maupun jasa sebagai basis penerimaan daerah. Ada beberapa prinsip dalam penyusunan APBD, diantaranya :

1. Partisipasi masyarakat

Bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

2. Transparansi dan akuntabilitas

Anggaran APBD harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada jenis/objek belanja serta korelasi besarnya anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin anggaran

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja;
- b) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tidak tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBD/perubahan APBD;

c) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah.

4. Keadilan anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan. Pemerintah daerah dapat melakukan diskriminatif tarif secara rasional dan dalam mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

5. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan :

- a) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
- b) Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

6. Taat asas

APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah di dalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

Secara garis besar struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu di bayar kembali oleh daerah. Sebaliknya semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah. Sedangkan pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pengertian dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Pendapatan

- (a) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- (b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- (c) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- (d) Unsur pendapatan daerah terdiri dari :

Pendapatan asli daerah : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya.

Pendapatan transfer/dana perimbangan : dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Lain-lain pendapatan yang sah : dana darurat, hibah.

Belanja

- (a) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- (b) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- (c) Unsur Belanja Daerah terdiri dari :
- Belanja operasi : belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial
- Belanja modal : belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja asset tetap lainnya, belanja asset lainnya, belanja tak terduga

Pembiayaan

- (a) Pembiayaan (basis kas) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,

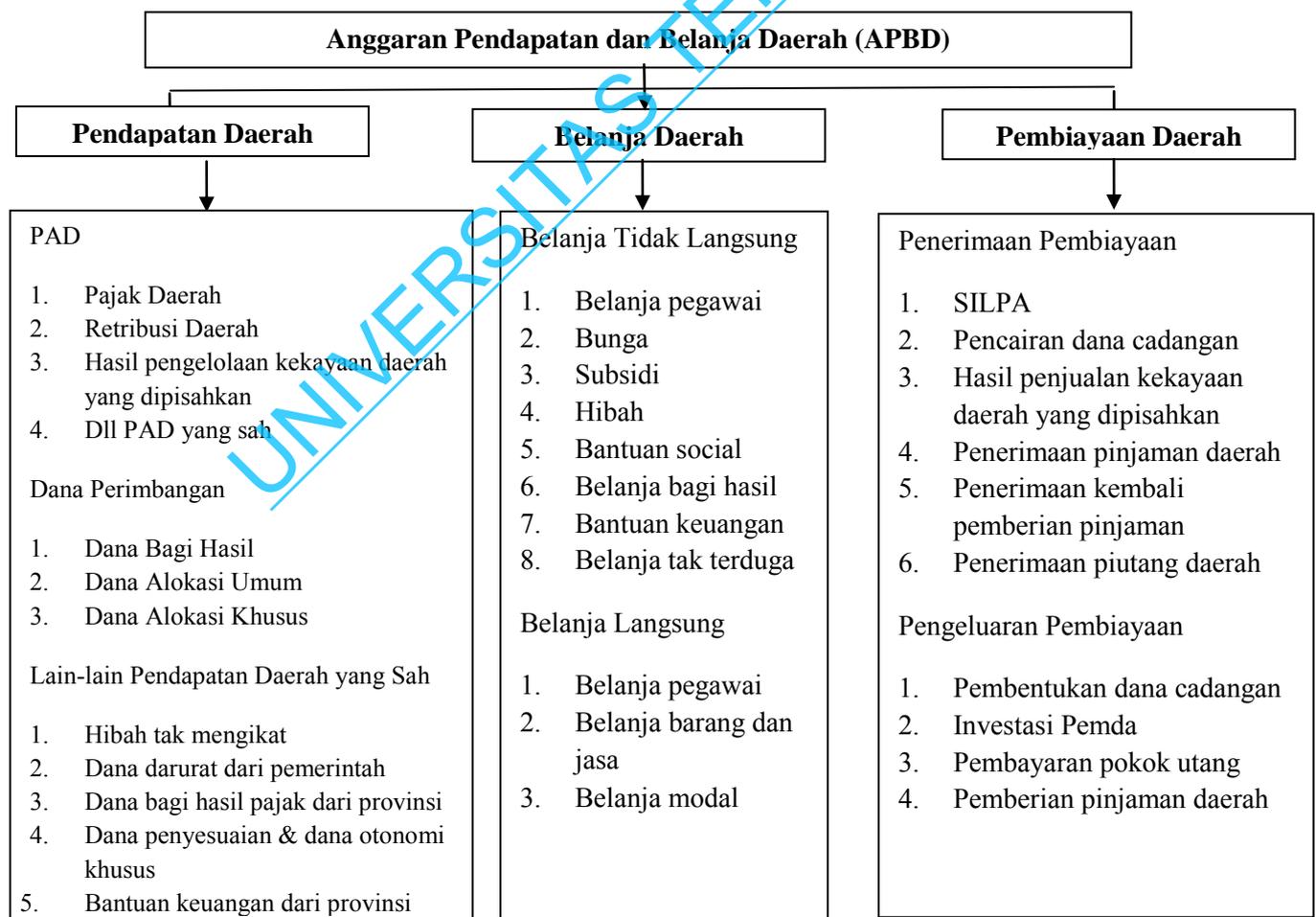
yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.

(b) Unsur Pembiayaan Daerah terdiri dari :

Penerimaan pembiayaan : penggunaan silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan pembayaran piutang.

Pengeluaran pembiayaan : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman.

Secara umum struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dapat disajikan dalam gambar dibawah ini :



Bagan 2.1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B. Pendapatan asli daerah (PAD)

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu di bayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan. Halim (2007 : 96) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. PAD adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah dibidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai UU No.33 Tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyata-nyata kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan tersebut sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah itu masih sangat lemah. Kecilnya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti kekurangmampuan daerah dalam mengelola sumber daya perekonomian terutama sumber-sumber pendapatannya. Pasal 157 UU No.32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No.33 Tahun

2004 menjelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berikut penjabaran dari masing-masing komponen PAD tersebut.

1. Pajak daerah

Pembangunan daerah merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Dalam merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang berasal dari retribusi, bagian laba perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Menurut Halim (2007 : 96) disebutkan bahwa pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Sedangkan Simanjuntak (2003 : 32) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing. Kesit (2003 : 2) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Wewenang mengenakan pajak atas penduduk untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsure penting dalam pemerintahan daerah. Diungkapkan oleh Devas et.al, (1989 : 58) bahwa system perpajakan yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan, dan tampaknya bagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan perubahan sistem pajak daerah yang merupakan langkah logis untuk langkah berikutnya. Pembaharuan yang dilakukan pemerintah misalnya dengan diterbitkannya UU No.34 Tahun 2004 ini jenis pajak daerah jumlahnya menjadi berkurang. Terakhir pemerintah menerbitkan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembagian berbagai penerimaan negara. Davey (1988:40-41) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mengelola sumber-sumber penerimaan pajak daerah tergantung pada kemampuan pemerintah daerah itu sendiri dalam mengoptimalkan faktor-faktor yang turut menentukan keberhasilan tersebut. Devas et.al, (1989:72) juga memberikan penjelasan bahwa kemampuan menghimpun dana adalah perbandingan antara penerimaan dari pajak dengan retribusi atau disebut dengan upaya (*tax effort*). Mardiasmo dkk (2002 :146-147) mengemukakan bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah perlu diberikan otonomi dan keleluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan

menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang riil yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga bisa diketahui peningkatan kapasitas pajak (*tax capacity*) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Teori insidens pajak (*tax incidence theory*) yang umum dibagi dalam tiga konsep beban pajak yaitu :

1. *Absolute*, pengaruhnya hanya manfaat pengaruh suatu jenis pajak terhadap distribusi pendapatan masyarakat tanpa melihat efek distributive jenis pajak lainnya atau akibat suatu program pemerintah.
2. Anggaran berimbang, mempengaruhi distributive pajak terhadap pengeluaran pemerintah yang berasal dari pajak dalam jumlah yang sama.
3. Diferensial, mempengaruhi berbagai alternatif pembiayaan dengan pajak terhadap suatu program pemerintah dalam jumlah yang sama.

Dari sudut pandang ekonomi publik, definisi ekonomi (*direct tax* maupun *indirect tax*) tersebut kurang tepat karena terjadinya pergeseran suatu pajak tergantung pada empat faktor ekonomi, yaitu : elastisitas penawaran, elastisitas permintaan, bentuk pembayaran dan motivasi pengusaha. Hukum pajak, sebagai bagian dari hukum publik, diatur secara khusus dengan menganut paham imperatif yang artinya bahwa pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Sebagaimana fungsi pajak dalam mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak, maka hukum pajak dibagi dua macam :

1. Materiil, bermuatan norma-norma antara lain keadaan, perbuatan, obyek, subyek, tarif, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

2. Formil, memuat tata cara dalam norma materiil yang mencakup : prosedur, hak-hak dan kewajiban wajib pajak.

Dalam kapasitasnya sebagai sumber dana dalam negeri, pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah; dan
2. Fungsi Mengatur, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan dalam bidang social dan ekonomi. Misalnya untuk barang-barang konsumsi yang mengganggu kesehatan, gaya hidup konsumtif, bea masuk untuk untuk proteksi produk-produk local, dan lain-lain.

Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Adanya pembayaran (peralihan kekayaan) dari masyarakat (rakyat) kepada negara.
- b. Pemungutan tersebut harus ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- c. Telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, maka pemungutannya dapat dipaksakan, karena berkaitan dengan pencapaian tujuan atau kepentingan bersama (masyarakat luas).
- d. Masyarakat pembayar pajak tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung (per individu), tetapi menghasilkan pelayanan yang bersifat umum.

- e. Digunakan untuk pembiayaan umum, yakni terciptanya pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, bukan pembiayaan khusus.
- f. Dapat berfungsi sebagai pengatur (regulator), selain fungsi utamanya sebagai pengisi anggaran.

Beberapa teori yang memberikan hak kepada negara untuk pemungutan pajak antara lain :

- a. Teori asuransi, yaitu melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat sehingga pajak diibaratkan sebagai premi asuransi
- b. Teori kepentingan, pembebanannya didasarkan pada kepentingan masing-masing individu yang hubungannya searah
- c. Teori daya pikul, yang disesuaikan dengan kemampuan tiap individu baik secara obyektif (penghasilan/kekayaan) maupun subyektif (kebutuhan yang harus dipenuhi)
- d. Teori bakti, mendasarkan pada kesadaran rakyat akan kewajiban membayar pajak
- e. Teori asas daya beli, yaitu dampak terhadap pemungutannya. Pajak dari rakyat ke negara dan dikembalikan lagi dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Smith dalam Guritno (2001) dan para ahli keuangan negara lainnya, system pajak yang baik harus memenuhi kriteria :

1. Disrtribusi beban pajak yang adil, sesuai dengan bagian yang wajar
2. Sedikit mungkin mencampuri mekanisme pasar

3. Mampu memperbaiki inefisiensi sector swasta
4. Struktur pajak harus mampu digunakan dalam kebijakan fiskal
5. Sistemnya harus dimengerti oleh wajib pajak
6. Administrasi dan biaya pelaksanaannya harus minimal
7. Bersifat pasti, dapat dilaksanakan dan dapat diterima

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Simanjuntak, 2001 : 98)

Menurut Davey dalam Kurniawan (2003 : 44), perpajakan daerah dapat diartikan sebagai :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Penilaian potensi pajak sebagai penerimaan daerah, ada 5 (lima) kriteria yaitu :

1. Kecukupan dan elastisitas, ini menyangkut apakah hasil yang diperoleh sebanding dengan biaya pelayanan yang akan dikeluarkan.
2. Keadilan, prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan ini mempunyai tiga dimensi yaitu : pemerataan secara vertical, horizontal dan keadilan secara geografis.
3. Kemampuan administrative yang berkaitan dengan perbedaan jumlah pendapatan, integritasnya, dan keputusan yang diperlukan.
4. Kesepakatan politis, menyangkut sensitivitas dalam pengenaan pajak. Struktur tarif siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi.
5. Kecocokan, apakah sebagai pajak pusat atau pajak daerah.

Sedangkan menurut Devas dalam Kurniawan (2003 : 46), tolok ukuran untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada menggunakan serangkaian ukuran :

1. Hasil (*yield*), memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu; dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan (*equity*), dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; harus adil secara

vertikal; artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar; dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, artinya hendaknya tidak ada perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*); pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil "beban lebih" pajak.
4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) : suatu pajak harus dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*) : artinya harus jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Seiring dengan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dari tahun ke tahun, maka dibutuhkan toleransi masyarakat dalam membayar

pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Tingkat toleransi tersebut merupakan kendala bagi pemerintah untuk menarik pungutan pajak. Dalam teorinya, Peacock dan Wiseman dalam Guritno (2001:173) mengatakan bahwa “perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah juga semakin besar, begitu pula pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Pada hakekatnya tidak ada perbedaan pengertian yang foral antara Pajak Negara dan Pajak Daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya baik subjek pajak, objek pajak dan sebagainya perbedaan ada hanya pada aparat pemungut dan pungutan pajak.

Lapangan pajak daerah di dalam pengadministrasiannya digolongkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Langsung
 - 1) Dari sudut pandang ekonomi pajak langsung adalah pajak yang kewajibannya tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - 2) Dari sudut pandang administrasi, pajak langsung adalah pajak yang cara pemungutannya dilakukan secara berkala atau periodik. Contohnya adalah pajak penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung
 - 1) Dari sudut pandang ekonomi pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang kewajiban membayar pajaknya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

- 2) Dari sudut pandang administrasi, pemungutan pajak tidak langsung adalah tidak periodik atau tidak terikat dalam tahun pajak yang hanya dikarenakan bila ada perbuatan.

Sektor pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang penting bagi daerah. Adapun usaha-usaha yang mungkin dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak menurut Sumitro dalam Kurniawan (2003 : 46) adalah:

- a. Perluasan pajak, apabila pajak yang sudah dikenakan wajib pajak tertentu, maka wajib pajak yang belum dikenai pajak supaya diusahakan dikenai pajak yang bersangkutan, atau sebagai penertiban wajib pajak.
- b. Perluasan jenis dan besarnya penghasilan yang dikenai pajak baik pajak atas pendapatan, pajak atas konsumsi atau pajak kekayaan, dengan mengusahakan macam-macam pajak baru yang belum dipungut oleh daerah akan dapat meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Penyempurnaan tarif pajak, didalam penyempurnaan tarif pajak perlu diperhatikan kondisi dan kemampuan kebanyakan wajib pajak. Bila tingkat pendapatan rata-rata wajib pajak telah tinggi, dan dinilai kemampuan membayar tinggi, maka selayaknya bila tarif pajak diadakan penyesuaian.
- d. Penyempurnaan administrasi pemungutan pajak akan mempunyai pengaruh yang besar pada ketertiban dalam pengelolaan pajak daerah.

2. Retribusi daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, sudah barang tentu daerah harus mampu menyediakan dana

yang diperlukan yang berasal dari sumber pembiayaan yang dimiliki, utamanya dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberadaan dan pemungutan perlu dipupuk dan dikembangkan, karena apabila dilihat dari sudut pengembangan sumber pendapatan, pengembangan retribusi daerah lebih mudah dibandingkan dengan pajak daerah, mengingat lingkup pengenaan retribusi daerah tidak seketat dibandingkan pajak daerah. Menurut Munawir (1997), retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Menurut Sumitro dalam Kurniawan (2003 : 47) retribusi ialah pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa. Lebih lanjut dikemukakan Syamsi dalam Kurniawan (2003 : 47) mengatakan bahwa :

Retribusi adalah iuran masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung.

Adapun ciri-ciri retribusi menurut Haritz (1995 : 84) adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis;
- b. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi;
- c. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material
- d. Retribusi daerah merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya (penerimaannya) tidak menonjol;
- e. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya

yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dikaji pengelolaannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensinya. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula Pendapatan Asli Daerah. Pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Besarnya retribusi seharusnya (lebih kurang) sama dengan nilai layanan yang diberikan.

Davey (1988:31) mengatakan bahwa retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintahan regional, retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan-badan pembangunan daerah.

Sedangkan Redjo dalam Kurniawan (2003 : 48) berpendapat bahwa retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang diterima langsung dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya uang langganan air minum, uang langganan listrik dan lain-lain.

Koswara (2001:191) menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Simanjuntak (2003:34) menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa balik atau kontra prestasi dari pemerintah yang secara langsung ditunjuk.

Mengenai potensi retribusi daerah, Koswara (2001:191) memaparkan bahwa seperti halnya dengan pajak daerah, hanya dengan beberapa jenis retribusi yang secara efektif berperan sebagai sumber pendapatan daerah. Dalam dimensi potensi daerah yang demikian itu, pemerintahan daerah hendaknya dapat mengembangkan inisiatif dan upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Upaya ini antara lain dilakukan dengan cara memberikan pelayanan publik secara professional dan mampu memberikan kepuasan kepada setiap penerimaan pelayanan.

Davey (1988:148) mengungkapkan beberapa pendapat mungkin akan timbul pada elastisitas retribusi yang harus responsive kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan atau konsumsi akan suatu pelayanan. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi sampah dan retribusi pasar misalnya harus dibayar oleh pengguna jasa-jasa tersebut, karena mereka menikmati secara langsung. Dalam Undang-undang No.34 tahun 2000, jenis retribusi air, pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, serta retribusi bahan galian golongan C dikategorikan sebagai pajak. Termasuk golongan dan jenis retribusi daerah adalah :

- a. Jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.
- b. Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi criteria yang telah ditetapkan.
- c. Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten sebagian diperuntukkan kepada desa dan penetapannya dengan Perda kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut.

Sebagai salah satu sumber PAD, retribusi menempati urutan kedua terbesar setelah pajak daerah. Oleh karena itu peranannya menjadi penting sekali bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan rutinnya. Dalam konteks yang demikian itu, pengelolaan sumber-sumber PAD dari jenis retribusi tentu mempunyai konsekwensi yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah tidak boleh memikirkan bagaimana memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya dari pemungutan retribusi, tetapi pemerintah daerah bertanggung jawab atas konsekuensi pemungutan retribusi tersebut.

Menurut Davey (1989 : 95), kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Menurutnya, seseorang bebas untuk menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam teori ekonomi, harga barang atau layanan yang disediakan pemerintah hendaknya

didasarkan pada biaya tambahan (marginal cost) yaitu biaya untuk melayani konsumen terakhir. Sebagian besar layanan pemerintah merupakan hak monopoli, maka manfaat ekonomi tertinggi untuk masyarakat adalah jika penetapan harga layanan tersebut diumpamakan adanya suatu persaingan pasar. Dengan demikian pemerintah akan memproduksi jasa tersebut pada titik tempat biaya tambahan sama dengan penerimaan tambahan (marginal revenue).

Untuk menggali potensi retribusi daerah pemerintah daerah hendaknya dapat mengembangkan inisiatif dan upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Upaya ini antara lain dilakukan dengan cara memberikan pelayanan publik secara professional dan mampu memberikan kepuasan kepada setiap penerima pelayanan. Hal ini menjadi penting untuk dipertimbangkan secara cermat dan komprehensif karena tidak hanya menjawab pertanyaan bagaimana meningkatkan penerimaan PAD, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana teknis penerimaan tersebut dibarengi dengan kemampuan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Davey dalam Kurniawan (2003 : 50), didalam praktek, pungutan retribusi langsung atas konsumen biasanya dikenakan karena satu atau lebih pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang umum atau pribadi, mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang dan oleh karena itu tidak wajar untuk membebankan biaya-biaya tersebut kepada pembayar-pembayar pajak yang tidak mendapatkan jasa/barang tersebut.

- 2) Suatu jasa dapat melibatkan suatu sumber yang langka atau mahal dan perlunya disiplin konsumsi masyarakat.
- 3) Mungkin ada bermacam-macam variasi didalam konsumsi individu, yang berkaitan setidak-tidaknya untuk memilih daripada memerlukan.
- 4) Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan disamping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu didalam negeri.
- 5) Retribusi dapat menguji arah dan skala dari permintaan masyarakat akan jasa, diimana kebutuhan pokok atau bentuk-bentuk dan standar-standar dari penyediaan tidak dapat dengan tegas ditentukan.

Suatu kasus dapat dibuat hamper pada setiap bentuk pengeluaran pemerintah, keinginan untuk membayar langsung bagi pelayanan-pelayanan tersebut adalah suatu pengujian yang penting bagi keinginan masyarakat. Untuk itulah, pengelolaan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis retribusi tentu mempunyai konsekuensi yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah tidak boleh hanya memikirkan bagaimana memperoleh penerimaan yang sebesar-besarnya dari pemungutan retribusi, tetapi Pemerintah Daerah pun harus bertanggungjawab atas konsekuensi pemungutan retribusi tersebut. Dalam hal ini, persoalannya adalah bagaimana biaya yang dikeluarkan harus memberikan pelayanan dengan tingkat pemasukan yang diterima dari pemungutan retribusi atas pelayanan tersebut. Perhitungan atas variasi-variasi ini menjadi penting untuk dikaji secara cermat.

Menurut Davey dalam Kurniawan (2003: 51) terdapat variasi-variasi yang besar didalam tingkat pengenaan retribusi yang digunakan masyarakat variasi-variasi retribusi untuk suatu pelayanan secara keseluruhan, variasi ditingkat

pengembalian biaya langsung (direct cost), dan variasi-variasi dalam ketergantungan wewenang pemerintah tertentu atas penerimaan dari retribusi. Rohmat Somitro (1987:15) mengemukakan definisi retribusi sebagai pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa.

Lebih jelas lagi, Ibnu Syamsi (1994:221) mengatakan bahwa retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung. Pasal 1 ayat 26 Undang-undang nomor 34 tahun 2000 menyatakan bahwa Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembauran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pajak biasanya harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum tanpa pertimbangan apakah secara pribadi mereka mendapat manfaat langsung dari pembayaran pajak tersebut. Namun tidak demikian halnya dengan retribusi. Pemungutan retribusi (charging) dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya.

Untuk melaksanakan pemungutan retribusi, Pasal 82 Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerinthan Daerah menjelaskan bahwa : 1). Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang, 2) Penentuan tarif dan tata

cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD. Penyertaan modal daerah ke dalam berbagai bentuk usaha patungan merupakan upaya pemerintah daerah untuk memperbanyak sumber pendapatan asli daerah. Melalui pembentukan badan usaha pemerintah daerah tentu berharap dapat memperoleh pendapatan yang lebih. Menurut Suradinata dalam Kurniawan (2003 : 52) perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerahnya untuk menambah penerimaan daerah. Dengan demikian masing-masing daerah dapat mengembangkan potensi perekonomian daerah melalui badan usaha yang dikelolanya. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah / BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Sesuai dengan kewenangannya setiap pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan atas kebutuhan dasarnya. Upaya dan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah semata-mata hanya kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh swasta atau masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan tugas dan kewenangannya pemerintah daerah dalam menyediakan *public goods* dapat dilakukan atas dasar nirlaba, atau atas dasar mencari laba. Apabila kegiatan itu masuk ke dalam kategori pertama, penyelenggaraannya dibiayai dari APBD, jenis

kegiatan ini biasanya dikategorikan sebagai proyek. Setelah proyek itu selesai, pengoperasiannya dilaksanakan oleh dinas pada lingkungan pemerintah daerah. Namun demikian, ada beberapa kegiatan yang bisa dikelola secara komersial atau semi komersial, sehingga kegiatan ini bisa swadana atau bahkan mencetak laba. Kegiatan yang kedua ini umumnya dilakukan dalam bentuk perusahaan, tepatnya adalah perusahaan daerah. Beberapa kegiatan perusahaan daerah yang umumnya terdapat di Indonesia meliputi kegiatan ; penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air kotor, pengelolaan pasar, pengelolaan obyek wisata, perbankan dan perkrediatan, penyediaan perumahan dan penaukiman, penyediaan transportasi, industri dan jasa lainnya.

4. Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Devas dalam Dewi, E (2002) penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah yang mencakup penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, penerimaan dari sewa, bunga simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Walaupun demikian sumber daerah sangat tergantung pada potensi daerah itu sendiri. Menurut Halim (2004 : 69) : “pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”. Jenis penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya menurut UU No. 33 Tahun 2004 disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau

angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

b. Dana Perimbangan

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada hakekatnya selalu berpegang teguh pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang pada prinsipnya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan ketiga asas tersebut, hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang keuangan memerlukan aturan yang jelas dan pengolahannya harus transparan.

Diutarakan oleh Davey (1988:254) hal penting guna penentuan kekuatan dan bobot keuangan pemerintah daerah adalah melalui perpaduan antara alokasi tanggungjawab dengan sumber-sumber dana di setiap tingkat dan daerah. Devas et.al. (1989:191) menyatakan bahwa ketimpangan antar daerah dapat dikatakan kelemahan utama system hubungan keuangan di Indonesia dan garis-garis ketimpangan antar daerah tersebut tidak jelas benar. Lebih lanjut Devas et.al (1989:179) mengungkapkan bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah pada prinsipnya adalah menyangkut pembagian tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintahan. Selain itu juga menyangkut pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran

akibat kegiatan-kegiatan tersebut. Tujuan utama hubungan ini adalah untuk mencapai perimbangan agar potensi dan sumber daya di masing-masing daerah bisa dibagi dengan sesuai.

Elmi (2002:54) juga memberikan beberapa penjelasan mengenai tujuan ideal adanya kebijakan pembentukan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu dalam rangka pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat dan pemerintah daerah yang selama ini tertinggal di bidang pembangunan. Menyadari akan pentingnya harmonisasi antara pusat dan daerah ini, selanjutnya pemerintah menerbitkan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada pasal 1 undang-undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem keuangan pemerintahan dalam negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban, pembagian kewenangan, dan tanggungjawab serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut. Selanjutnya untuk terpenuhinya system hubungan antara pusat dan daerah, Davey (1988:255) menguraikan ada 4 (empat) pra syarat yaitu :

1. Menjamin adanya pembagian kekuasaan secara rasional tingkat-tingkat pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dana pemerintahan.
2. Menjamin adanya bagian yang memadai dari sumber-sumber dana secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi.
3. Menjamin pembagian yang adil di antara daerah-daerah atas pengeluaran pemerintah, atau sekurang-kurangnya ada perkembangan yang memang diusahakan ke arah itu.
4. Menjamin adanya suatu upaya pajak (*tax effort*) di dalam memungut pajak dan retribusi oleh pemerintahan daerah yang sesuai dengan pembagian hasil yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintahan dalam masyarakat.

Pada aspek hubungan pemerintahan pusat dan daerah ini, Elmi (2002:55) juga mengungkapkan bahwa dengan adanya kebijakan yang mengatur mengenai perimbangan keuangan lebih adil dan rasional. Artinya bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan dengan jumlah yang lebih besar sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang menjelaskan dana perimbangan terdiri atas :

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Mardiasmo (2002:141) memberikan perincian bahwa pembagian dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sumber pendapatannya berasal dari :

1) Penerimaan dari pajak dan bukan pajak

Penerimaan dari pajak hanya diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pungutan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selanjutnya penerimaan bukan pajak adalah penerimaan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, seperti sumber daya hutan, pertambangan umum, perikanan dan khususnya pengambilan minyak bumi dan gas.

2) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum yang berasal dari pemerintah pusat yang sebelumnya dinamakan dana subsidi

3) Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang bersifat khusus, bertanggung pada tersedianya dana dalam APBN. Kebutuhan khusus ini misalnya, kebutuhan di kawasan transmigrasi, pembangunan jalan di kawasan terpencil, pembangunan irigasi primer dan saluran drainase primer.

1). Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 160 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sector pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kelautan.
- b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sector pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kelautan.
- c. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri atas :

- a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan.
- d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- e. Penerimaan pertambangan gas yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

- f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah, iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah.

2). Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk propinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas daerah celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Alokasi daerah dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil. Jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah yang dimaksud adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai peraturan penggajian pegawai negeri sipil termasuk didalamnya tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPH pasal 21). Yani (2008:144) menyatakan bahwa kebutuhan fiskal adalah pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan suatu daerah dihitung dengan pendekatan total pengeluaran rata-rata nasional. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Yani (2008:145) menyebutkan bahwa alokasi DAU untuk suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$DAU = CF + AD$$

Dimana :

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan

3). Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DAK bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Penyelesaian DAK diprioritaskan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau dibawah rata-rata nasional. Kemampuan fiskal daerah didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan umum daerah dengan belanja pegawai negeri sipil daerah pada APBD tahun anggaran.

Yani (2008:172) menyatakan bahwa DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang merupakan prioritas nasional dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah serta lingkungan hidup.

4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah. Yani (2008:211) menyatakan bahwa cakupan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

1. Hibah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan bencana alam.
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Menurut UU No.32 tahun 2004 pasal 164 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

c. Belanja daerah

Halim (2007:322) menyatakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut Yuwono dkk, (2005:108) menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002, adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Di dalam ketentuan umum Undang-undang No.17 tahun 2003 pada

pasal 1 ayat 16 disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 pasal 20 ayat 3 menyebutkan bahwa belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

B. Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir perlu dijelaskan secara teoritis antara variabel independen dan variabel dependen. Menurut Lubis dan Syahputra (2008) kerangka konsep penelitian adalah gambaran ringkas, lugas dan bernas mengenai keterkaitan satu konsep dengan konsep lainnya yang akan diteliti atau menggambarkan pengaruh atau hubungan antara satu kejadian/fenomena dengan kejadian/fenomena lainnya.

Musgrave (1987 : 8) mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah yang diperlukan dalam perekonomian merupakan kegiatan penganggaran yang memiliki beberapa tujuan yang berbeda-beda, sebagai berikut :

1. Upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas social atau proses pembagian keseluruhan sumber daya untuk digunakan sebagai barang social. Kebijakan ini disebagai fungsi alokasi dari kebijakan anggaran.
2. Peranan distribusi dari kebijakan anggaran bertujuan untuk melaksanakan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin

terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu keadaan distribusi yang merata dan adil.

3. Pengguna kebijakan anggaran sebagai fungsi stabilisasi diupayakan sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

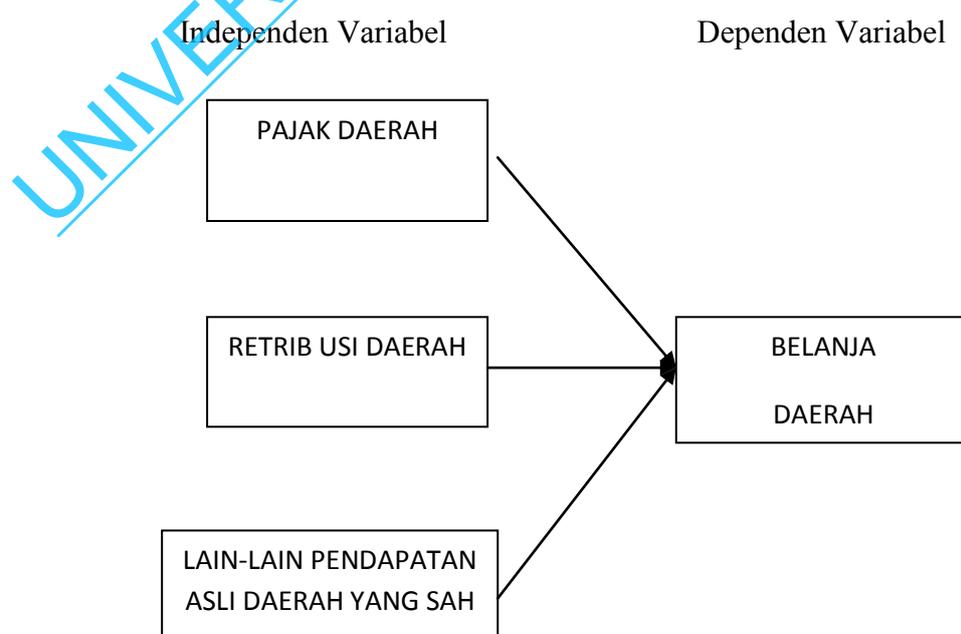
Dalam teori *fiscal assignment* dikaitkan dengan argumen desentralisasi fiskal. Tumbuhnya perekonomian daerah yang diakibatkan oleh pengeluaran pemerintah berimplikasi kepada peningkatan kapasitas perpajakan (*taxable capacity*) dan retribusi. Meningkatnya perekonomian daerah akan memperbesar pendapatan perkapita yang merupakan ukuran kemampuan membayar pajak (*ability to pay for tax*) dan retribusi (*willingness to purchase public service*).

Berdasarkan teori keyness, APBD maupun APBN merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda- agenda pembangunan tahunan. Di bidang pengelolaan pendapatan daerah, akan terus diarahkan pada peningkatan PAD. Dalam mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu menggali potensi daerah guna menunjang PAD dengan mencari faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Untuk merealisasikan hal tersebut akan dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada

maupun menggali sumber-sumber baru. Dengan melakukan penghitungan rasio terhadap masing-masing komponen penerimaan, maka dapat diketahui tingkat kemampuan masing-masing komponen penerimaan terhadap PAD Provinsi Bangka Belitung juga dapat diketahui bagaimana gambaran kondisi keuangan pada umumnya.

Menurut Riduansyah (2003), kontribusi komponen pajak daerah dan retribusi daerah menyebabkan penerimaan APBD pemerintah menjadi sangat fluktuatif yang disebabkan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu tertentu. Prakosa (2004) dalam penelitiannya membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat dan PAD dari daerah yang bersangkutan. DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Bagan 2.1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan bagan tersebut dapat dilihat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara parsial dan simultan terhadap belanja daerah. Belanja daerah (Y) sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X3) sebagai variabel independen. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut : berpengaruh atau tidaknya variabel penerimaan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan refleksi kemampuan riil pemerintah daerah yang bersumber dari penilaian terhadap kemampuan menggali potensi riil penerimaan PAD dari penerimaan pajak, penerimaan retribusi daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dikembangkan dari telaahan teoritis sebagai jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan yang memerlukan pengujian secara empiris. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini, adalah :

Ho : Pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap belanja daerah di pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung

H1 : Pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung.

C. Definisi Operasional

Variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dengan adanya definisi operasional memungkinkan sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu yang operasional sehingga memudahkan penelitian dalam melakukan pengukuran. Untuk menghindari kesalahpahaman dan meluasnya permasalahan yang diangkat, maka perlu adanya batasan-batasan pengertian operasional variabel sebagai berikut :

1. Variabel independen

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan variabel yang lain, sebagaimana variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini meliputi pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.1. Pajak daerah (X_1)

Pajak daerah merupakan realisasi penerimaan pajak daerah dalam satu tahun anggaran dari seluruh jenis pajak daerah yang berlaku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, dan dikenakan kepada para wajib pajak tanpa imbalan atas kewajibannya membayar pajak tersebut.

1.2. Retribusi daerah (X_2)

Retribusi daerah merupakan realisasi penerimaan retribusi daerah selama satu tahun anggaran dari seluruh jenis retribusi daerah yang berlaku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, dan

dimaksudkan sebagai iuran yang dibayar langsung oleh mereka yang menerima suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah di daerah.

1.3 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_3)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan realisasi penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan serta penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

2. Variabel dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah belanja daerah yang mencakup seluruh komponen belanja dalam struktur APBD. Belanja daerah merupakan jumlah realisasi seluruh belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja daerah ini dinotasikan sebagai variabel dependen dengan simbol Y.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Mansoer (2005) merupakan rancangan umum tentang metode-metode dan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, desain penelitian yang akan digunakan oleh peneliti pada penelitian ini melalui pendekatan ilmiah dengan struktur teori untuk membangun hipotesis yang membutuhkan pengujian secara kuantitatif. Secara kuantitatif penelitian diarahkan untuk melihat pengaruh pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X3) terhadap belanja daerah (Y).

B. Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan kelompok nyata dan utuh yang memiliki kesamaan umum dan membentuk karakter tersendiri. Populasi dalam penelitian ini adalah APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperoleh dari data runtun waktu (*time series*) selama 8 (delapan) tahun yaitu tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2010. Data laporan keuangan ini diperoleh dari data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk laporan semester selama delapan tahun yang terdiri dari 16 semester dan laporan keuangan selama 16 semester ini dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.

C. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian berisi uraian tentang macam spesifikasi instrument yang digunakan dalam pengumpulan data. Menurut Sugiyono dalam Nupikso (2007 : 9), instrument penelitian sering digunakan dalam jenis penelitian kuantitatif sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti akan lebih banyak menjadi instrument. Instrumen penelitian oleh peneliti digunakan sebagai alat untuk mengukur variabel yang akan diteliti sehingga jumlah instrument yang akan digunakan dalam penelitian tergantung pada jumlah variabel yang akan digunakan. Instrument pada penelitian ini adalah data-data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data *time series* berupa realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi belanja daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu informasi yang bersifat sekunder juga diperoleh dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan data dari literature-literatur dan buku-buku yang mendukung. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Laporan keuangan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010.

3. Data atau informasi yang diperoleh dari buku referensi, jurnal, surat kabar dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Laporan realisasi penerimaan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.

E. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kuantitatif. Metode analisa kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka). Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah teknis analisa data sekunder, yaitu data atau informasi berbentuk angka-angka yang kemudian ditarik kesimpulan dengan jelas membandingkan satu dengan yang lain dengan perhitungan yang bersifat kuantitatif.

1. Perumusan model untuk analisa kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerah

1.1. Analisis kinerja pendapatan

- a. Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan

Berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dari sisi pendapatan secara umum dapat dilihat dari selisih anggaran dan persentase pertahunnya sebagaimana hasil yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Hasil perhitungan analisis varians pendapatan

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PENDAPATAN ASLI DAERAH	110,84	137,44	130,82	107,63	98,53	142,41	118,88	156,72
Pajak	107,98	136,46	124,56	102,79	91,21	136,89	113,49	155,90
Retribusi	126,69	89,10	58,47	87,14	110,85	262,80	354,05	230,14
Bagian laba usaha daerah	-	-	-	-	-	-	173,08	110,10
Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya	149,52	163,11	339,19	166,71	187,82	194,88	164,34	169,79
DANA PERIMBANGAN	108,54	103,15	115,55	108,24	112,94	151,74	146,96	122,14
Bagi hasil pajak dan bukan pajak	183,72	113	290,83	173,70	215,12	334,09	258,03	248,77
DAU	100	104,76	100	100	100	122,45	127,76	128,58
DAK	100	-	-	-	-	-	229,81	12,34
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	102,80	37,81	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	112,54	114,23	121,69	108,01	107,68	148,34	137,06	133,55

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov.Kep. Bangka Belitung

b. Analisis pertumbuhan pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 dapat diketahui pada tabel 3.2 serta dapat menunjukkan kecenderungan (*trend*) yang berubah-ubah.

Tabel 3.2. Hasil analisis pertumbuhan pendapatan

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	59,33	64,53	5,32	2,71	44,53	(16,11)	32,95
Pajak	-	64,94	61,07	0,82	(0,16)	50,09	(17,10)	37,38
Retribusi		(13,55)	9,75	47,78	34,25	137,08	34,73	(35)
Bagian laba usaha daerah	-	-	-	-	-	-	73,08	73,71
Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya	-	9,47	122,70	53,96	22,53	3,76	(15,67)	3,31
DANA PERIMBANGAN	-	3,15	17,65	36,03	20,93	34,36	2,19	(6,92)
Bagi hasil pajak dan bukan pajak	-	13,00	50,14	1,12	44,20	55,30	(22,77)	(3,59)
DAU	-	4,76	10,06	47,15	15,84	22,45	4,33	0,65
DAK	-	(100)	-	-	-	-	129,81	(82,28)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	(62,19)	(100)	-	-	-	-	(100)
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	-	15,38	32,85	22,75	14,17	37,75	(4,20)	5,29

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung

c. Analisis rasio keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap rasio-rasio keuangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3. Hasil analisis rasio keuangan pendapatan

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rasio Kemandirian Daerah	35,27	54,47	76,18	58,98	50,09	53,89	44,24	63,19
Rasio Ketergantungan Daerah	71,69	64,09	56,76	62,90	66,63	64,98	69,31	61,28
Derajat Desentralisasi	26,07	35,25	43,24	36,23	33,37	34,89	30,66	38,72
Rasio Efektivitas PAD	110,84	137,44	130,82	107,63	98,53	142,41	118,88	156,72
Rasio Efisiensi PAD	22,15	29,20	20,04	22,83	21,81	25,49	19,73	40,77
Rasio Likuiditas	-	10,17	11,92	15,94	44,00	9,75	12,25	7,50
Rasio Solvabilitas	-	99,17	78,72	94,52	313,08	62,00	96,31	72,81
Rasio Leverage	-	-	-	77,51	268,75	52,24	83,93	65,22

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov.Kep. Bangka Belitung

1.2. Analisis kinerja belanja

a. Analisis varians belanja

Analisis varians belanja akan menunjukkan selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan sehingga akan menunjukkan efisiensi belanja ataupun inefisiensi belanja. Berikut hasil dari perhitungan analisis varians belanja.

Tabel 3.4. Hasil analisis varians belanja

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Aparatur Daerah	73,01	72,22	78,73	77,87	-	-	-	-
Administrasi Umum	69,64	73,60	78,53	78,82	-	-	-	-
Operasi dan Pemeliharaan	91,12	59,13	76,34	72,90	-	-	-	-
Modal	82,57	77,63	80,85	76,97	-	-	-	-

Pelayanan Publik	86,99	71,27	87,11	85,81	-	-	-	-
Administrasi Umum	32,50	66,34	44,42	57,68	-	-	-	-
Operasi dan Pemeliharaan	72,68	90,97	80,53	86,31	-	-	-	-
Modal	90,03	70,26	89,75	86,97	-	-	-	-
Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	96,56	91,95	83,59	87,50	-	-	-	-
Tidak Tersangka	13,07	46,38	3,24	18,68	-	-	-	-
Tidak Langsung	-	-	-	-	83,54	83,74	80,92	86,17
Pegawai	-	-	-	-	83,89	77,53	88,14	90,09
Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidi	-	-	-	-	-	-	99,36	124,22
Hibah	-	-	-	-	100	99,08	82,10	74,96
Bantuan Sosial	-	-	-	-	77,18	83,43	94,63	70,82
Bagi Hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa	-	-	-	-	81,55	82,66	68,30	93,63
Bantuan kepada /kab/kota dan pem. desa	-	-	-	-	92,25	77,39	94,15	76,26
Tidak terduga	-	-	-	-	43,24	-	26,60	90,22
Langsung	-	-	-	-	68,60	76,47	70,72	80,10
Pegawai	-	-	-	-	76,02	76,48	85,03	85,99
Barang dan jasa	-	-	-	-	63,94	68,85	81,22	81,48
Modal	-	-	-	-	69,29	80,46	64,39	78,94
JUMLAH BELANJA	81,37	77,24	81,89	83,22	75,34	79,82	75,72	82,67

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov.Kep. Bangka Belitung

b. Analisis pertumbuhan belanja

Berdasarkan rumus pertumbuhan belanja yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.5. Hasil analisis pertumbuhan belanja

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Aparatur Daerah	(5,57)	20,49	21,31	-	-	-	-
Administrasi Umum	(2,30)	11,38	25,86	-	-	-	-
Operasi dan Pemeliharaan	36,28	17,07	23,18	-	-	-	-
Modal	(35,06)	78,09	3,14	-	-	-	-
Pelayanan Publik	4,82	19,90	38,37	-	-	-	-
Administrasi Umum	199,86	(14,77)	59,78	-	-	-	-
Operasi dan Pemeliharaan	6,76	28,59	161,31	-	-	-	-
Modal	2,47	20,37	27,64	-	-	-	-
Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	73,17	25,05	48,32	-	-	-	-
Tidak Tersangka	350,54	(91,44)	476,53				
Tidak Langsung	-	-	-	-	17,75	19,41	(15,00)
Pegawai	-	-	-	-	43,39	25,16	17,11
Bunga	-	-	-	-	-	-	-
Subsidi	-	-	-	-	-	-	87,54
Hibah	-	-	-	-	114,72	53,92	(83,14)
Bantuan Sosial	-	-	-	-	(37,74)	(37,40)	(37,47)
Bagi Hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa	-	-	-	-	11,14	4,27	8,63
Bantuan kepada /kab/ kota dan pemerintah desa	-	-	-	-	(30,42)	14,61	165,99
Tidak terduga	-	-	-	-	100	-	79,83
Langsung	-	-	-	-	25,92	1,53	18,74
Pegawai	-	-	-	-	43,32	(30,93)	(18,65)
Barang dan jasa	-	-	-	-	28,97	20,42	6,76
Modal	-	-	-	-	20,92	1,25	31,60
JUMLAH BELANJA	16,61	21,10	36,19		21,83	10,18	1,06

b. Analisis keserasian belanja

Analisis keserasian belanja digunakan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah. Berikut adalah hasil analisis rasio keserasian belanja.

Tabel 3.6. Hasil analisis rasio keserasian belanja

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rasio Belanja Operasi Thd total Belanja	0,26	0,33	0,31	0,31	0,55	0,56	0,57	0,43
Rasio Belanja Modal thd Total Belanja	0,24	0,28	0,28	0,31	0,31	0,30	0,28	0,36
Rasio Belanja Langsung thd Total belanja	-	-	-	-	0,50	0,52	0,48	0,56
Rasio Belanja Tidak Langsung thd Total belanja	-	-	-	-	0,50	0,48	0,52	0,44

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov.Kep. Bangka Belitung

c. Rasio efisiensi belanja

Dengan rasio efisiensi belanja dapat diketahui apakah pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran atau belum. Berikut hasil perhitungan rasio efisiensi belanja.

Tabel 3.7. Hasil analisis rasio efisiensi belanja

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rasio Efisiensi Belanja	0,81	0,77	0,82	0,83	0,75	0,80	0,76	0,83

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov.Kep. Bangka Belitung

2. Perumusan model untuk analisa pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap belanja daerah

Untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah, alat pengaruh statistik yang digunakan adalah pendekatan regresi sederhana (*simple regression*) dan pendekatan regresi berganda (*multiple regression*).

- a. Model regresi sederhana (*simple regression*)

Regresi sederhana dipakai untuk menguji pengaruh masing-masing pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah, sehingga persamaan regresinya sebagai berikut :

$$BD = a + b X_i + e$$

Dimana :

BD = jumlah belanja daerah

a = konstanta

b = koefisien regresi

X_i = jumlah pajak daerah atau retribusi daerah atau lain-lain PAD yang sah

e = error term

- b. Model regresi berganda (*multiple regression*)

Regresi berganda digunakan untuk memprediksi apakah pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain PAD yang sah tersebut secara serentak atau simultan berpengaruh terhadap belanja daerah.

Dengan demikian model persamaan regresi yang digunakan untuk memprediksi pengaruh tersebut dirumuskan dalam bentuk sebagai berikut :

$$BD = a + b_1PjD + b_2ReD + b_3LPAD$$

Dimana :

BD = Belanja daerah

a = konstanta

b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi

PjD = Pajak daerah

ReD = Retribusi daerah

LPAD = Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

c. Pengujian asumsi klasik

Untuk keabsahan hasil analisis regresi yang akan dilakukan terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian kualitas data dengan uji asumsi klasik sebagai salah satu syarat dalam penggunaan model regresi. Adapun pengujian klasik yang dilakukan meliputi :

1. Uji normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan memiliki distribusi yang normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan skewness dan kurtosis. Melalui uji ini diketahui grafik normalitas menceng ke kanan atau ke kiri, terlalu datar atau mengumpul di tengah. Oleh karena itu, uji normalitas dengan skewness dan kurtosis juga sering disebut dengan ukuran kemencengan data.

Tabel 3.8. Uji Normalitas skewness dan kurtosis

Uraian	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistik	Std.Error	Statistik	Std.Error
Belanja	16	0,714	0,564	-0,953	1,091
Pajak	16	-0,057	0,564	-1,177	1,091
Retribusi	16	1,217	0,564	0,022	1,091
Lain-lain PAD	16	-0,505	0,564	-1,313	1,091

Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS

Dengan hasil yang telah dikemukakan pada tabel 3.8 tersebut dapat diketahui masing-masing nilai skewness dan kurtosisnya.

Tabel 3.9 Rasio skewness dan kurtosis

Uraian	N	Rasio Skewness	Rasio Kurtosis
Belanja	16	1,2659	-0,8735
Pajak	16	-0,1010	-1,0788
Retribusi	16	2,157	0,020
Lain-lain PAD	16	-0,895	-1,203

Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS versi 15

Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan rasio pada tabel 4.3. diatas, dapat dilihat nilai rasio skewness dan kurtosis dari masing-masing variable berada diantara -2 hingga + 2, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa distribusi data tersebut adalah normal.

2. Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED.

Tabel 3.10. Uji heterokedastisitas dengan uji glejser

		Coefficients(a)				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	63863,330	30490,276		1,750	,106
	Pajak Daerah	-1,212	,657	-,721	-1,846	,090
	Retribusi Daerah	-11,299	22,540	-,129	-,501	,625
	Lain-lain PAD yang sah	16,674	5,375	1,171	3,102	,009

Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS versi 15

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel diatas dapat dilihat nilai t statistik yang diperoleh signifikan atau tidak. Untuk itu akan dilakukan pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel independennya. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

Ha : $\rho_{yx1} \neq 0$, artinya : Pajak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah

Ho : $\rho_{yx1} = 0$, artinya : Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah

Dengan tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) untuk uji dua pihak, sehingga $dk = 13$, maka t tabel yang diperoleh 2,160. ini berarti nilai t hitung < t tabel atau $-1,846 < 2,160$.

Maka Ho diterima dan Ha di tolak, artinya tidak signifikan. Jadi, pajak daerah

tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Nilai statistik yang diperoleh dari seluruh variabel penjelas tidak ada yang signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami masalah heterokedastisitas.

3. Uji autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian *Durbin Watson (DW)*. Jika nilai *Durbin-Watson (DW)*. Jika nilai *Durbin Watson* terletak antara -2 sampai +2, maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 3.11. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,765(a)	,586	,482	152829,14 322	3,363

a Predictors: (Constant), Lain-lain PAD yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Dengan terjadinya autokorelasi negatif pada uji autokorelasi diatas maka hal ini tidak diperbolehkan, karena dalam penggunaan model regresi linear berganda harus dipenuhi asumsi-asumsi yang salah satu di antaranya adalah tidak terjadi autokorelasi. Adanya autokorelasi menyebabkan variansi sampel tidak dapat menggambarkan variansi populasi, model regresi yang dihasilkan tak dapat digunakan untuk menduga nilai variabel tak bebas dari nilai variabel bebas tertentu, koefisien regresi yang diperoleh kurang akurat. Untuk mengatasi masalah autokorelasi ini ada beberapa alternative. Salah satu alternatif untuk mengatasi

model yang terkena gangguan autokorelasi adalah dengan memasukkan *lag* dari variabel terikat menjadi salah satu variabel bebasnya. Berikut hasil pengolahan data yang telah peneliti lakukan setelah memasukkan *variable lag* dengan menggunakan menu transform pada aplikasi SPSS.

Tabel 3.12. Uji Autokorelasi dengan *variable lag*

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,891(a)	,795	,712	112604,94651	1,776

a. Predictors: (Constant), Lag_Y, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah, Pajak Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS versi 15

Berdasarkan hasil yang telah ditampilkan pada tabel 4.21. tampak bahwa nilai DW pada data transformasi sebesar 1,776. Ini berarti gangguan autokorelasi yang terjadi sebelumnya sudah dihilangkan karena nilai DW sudah berada pada rentang -2 dan + 2, sehingga pengujian data selanjutnya bisa dilakukan.

4. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas. Pada model regresi yang baik tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Pendeteksian dengan menggunakan *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance value* > 0,10 dan *VIF* < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas

Tabel 3.13. Uji Multikolinieritas

Coefficients(a)

Mode 1		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Daerah	,294	3,403
	Retribusi Daerah	,674	1,483
	Lain-lain PAD yang sah	,314	3,180

a Dependent Variabel : Belanja Daerah

Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS versi 15

Berdasarkan pengolahan data pada tabel 3.11. terlihat bahwa nilai tolerance semua variable $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut terbebas dari masalah multikolinieritas.

Dengan terpenuhinya beberapa syarat yang telah dilakukan dengan pengujian asumsi klasik tersebut maka penelitian terhadap model regresi berganda ini layak dilanjutkan untuk melihat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan terhadap belanja daerah.

Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan baik atau tidaknya tafsiran koefisien parameter dari model yang digunakan, maka digunakan pengujian dari sudut statistik. Kriteria pengujian statistik merupakan kriteria yang sering digunakan dengan melihat koefisien korelasi dari simpang baku penaksir. Simpang baku mengukur penyebaran penaksir dari nilai yang sebenarnya, semakin tinggi nilai koefisien korelasi maka semakin baik, banyak variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelas. Demikian juga dengan simpang baku, semakin kecil simpang

baku semakin bagus hubungan tersebut, karena sebagian taksiran berada di sekitar nilai sebenarnya. Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, maka dilakukan pengujian terhadap variabel-variabel penelitian secara parsial dan simultan. Pengujian secara parsial digunakan uji statistik t . Uji koefisien regresi dengan uji t (t -test) diperlukan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian secara simultan digunakan uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan penentuan Koefisien Determinasi (R^2) yang bermaksud untuk menjelaskan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent.

a. Pengujian Parsial (Uji t)

Yaitu untuk menguji tingkat signifikansi masing-masing parameter dari variabel yang di ukur (independen) terhadap variabel dependen secara terpisah (parsial), apakah dapat diterima secara statistik dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen maka digunakan uji t . Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Iman Ghozali, 2005 : 84) :

$H_0 : \beta_i = 0$ Tidak terdapat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

$H_1 : \beta_i \neq 0$ Terdapat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis :

$H_0 : a_1 = 0$

$H_a : a_1 \neq 0$

2. Dengan pengujian satu arah, ditentukan nilai signifikansi (dalam hal ini adalah 5%), sehingga diperoleh nilai t tabel.

3. Menentukan nilai t hitung

4. Kriteria pengujian :

Dengan membandingkan antara nilai t tabel dan nilai t hitung maka dapat ditentukan kriteria pengujian sebagai berikut .

- $T \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, H_0 diterima dan H_a ditolak. Kesimpulannya a_1 tidak berbeda dengan nol (a_1 tidak signifikan pada tingkat α). Hal ini dapat dikatakan bahwa X_1 secara statistik tidak penting (tidak berpengaruh positif terhadap Y pada tingkat signifikansi α).
- $T \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, H_0 ditolak dan H_a diterima. Kesimpulannya a_1 berbeda dengan nol (a_1 signifikan pada tingkat α). Hal ini dapat dikatakan bahwa X_1 secara statistik penting (berpengaruh positif terhadap Y pada tingkat signifikansi α).

b. Uji Simultan (Uji F)

Yaitu untuk menguji tingkat signifikansi secara bersama-sama parameter dari variabel yang diukur (independen) terhadap variabel dependen, apakah dapat diterima secara statistik dengan cara membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Pengujian koefisien regresi secara simultan bertujuan untuk mengetahui

pengaruh semua variabel bebas yang digunakan terhadap variabel berikutnya. Proses pengujian menggunakan Uji F (*F-test*), yaitu dengan membandingkan nilai F tabel. Langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis

$$H_0 : a_1 = a_2 = 0$$

$$H_a : a_1 \neq a_2 \neq 0$$

2. Menentukan nilai signifikansi (dalam hal ini adalah 5%), sehingga diperoleh nilai F tabel.

3. Menentukan nilai F hitung

4. Kriteria pengujian

Kriteria keputusan uji F statistik sebagai berikut :

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesa ditolak
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesa diterima. Artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau terdapat hubungan yang signifikan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor lain diluar pengaruh atau hubungan secara bersamaan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Uji ini juga untuk melihat seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data. Apabila estimasi determinasi semakin besar (mendekati angka 1) menunjukkan bahwa hasil estimasi akan mendekati keadaan sebenarnya atau variabel yang dipilih dapat menerangkan dengan baik variabel terkaitnya dan sebaliknya. Digunakan untuk melihat besarnya pengaruh dari

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Kaidah keputusan R^2 adalah :

Jika R^2 mendekati 0, maka diantara variabel independen dan variabel dependen tidak ada keterkaitan.

Jika R^2 mendekati 1, maka diantara variabel independen dan variabel dependen ada keterkaitan.

d. Tahapan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan proses pengumpulan data yang meliputi data sekunder dari berbagai sumber instansi diantaranya DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS Provinsi Sumatera Utara serta dari beberapa terbitan berkala seperti koran, majalah dan informasi dari situs internet.

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data selesai adalah tahap pengujian dan penyusunan model yang akan digunakan dalam melihat pengaruh dari variabel independen dan variabel dependen.

Tahap akhir dari proses penelitian ini adalah melakukan proses penarikan kesimpulan penelitian berdasarkan analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung serta hipotesis penelitian yang meliputi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada provinsi kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan kesimpulan, dapat diketahui bagaimana kondisi keuangan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung dan seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap APBD sehingga bisa diperoleh kebijakan yang tepat dalam penyusunan APBD selanjutnya.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Objek Penelitian

Pada bagian deskripsi objek penelitian dibahas secara deskriptif variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Deskripsi data merupakan bagian yang menjelaskan data yang digunakan dalam penelitian. Pengaruh data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pembahasan merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang mendiskusikan implikasi dari pengaruh data dan interpretasi yang dibuat oleh peneliti. Penelitian dilakukan di kantor DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di jalan Pulau Belitung Nomor 4 Pangkalpinang. Objek penelitian ini berkenaan dengan keuangan daerah terutama mengenai pendapatan asli daerah yang berkontribusi terhadap belanja daerah. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan melaksanakan pembangunan.

Sumber-sumber pendapatan daerah di dalam APBD meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer atau dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan dalam pos belanja diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dalam penelitian ini penerimaan yang paling dominan mempengaruhi PAD adalah dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Secara umum dapat

digambarkan kondisi APBD pada penerimaan daerah dan PAD melalui tabel di bawah ini.

Tabel. 4.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 s.d Tahun Anggaran 2010 (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan	Belanja	Saldo
2003	275.323.315.617,-	240.932.372.031,-	34.390.943.580,-
2004	324.412.640.492,-	280.959.227.992,-	43.453.412.500,-
2005	435.167.347.128,-	340.243.532.231,-	94.923.814.897,-
2006	546.961.448.176,-	463.381.818.507,-	83.579.629.669,-
2007	609.867.856.708,-	636.425.226.895,-	(26.557.370.187)
2008	840.122.438.714,-	775.348.991.546,-	64.773.447.168,-
2009	804.845.142.747,-	864.949.718.331,-	(60.104.575.584)
2010	847.410.600.510,-	863.327.367.498,-	(15.916.766.988)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perkembangan kemampuan keuangan daerah berdasarkan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup berarti walaupun pada tahun 2009 mengalami penurunan yakni hanya sebesar Rp 804.845.142.747,- dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 840.122.438.714,-. Dengan demikian telah terjadi penurunan sebesar Rp 35.277.295.967,- yang mungkin disebabkan oleh target realisasi pendapatan pada beberapa pos yang tidak tercapai atau berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan dari sisi belanja dari tahun ke tahun cenderung meningkat seiring meningkatnya pendapatan. Namun, ada kalanya belanja melebihi pendapatan yang ada sehingga terjadi surplus negatif. Situasi ini terjadi pada tahun 2007, tahun 2009 dan tahun 2010. Secara umum dapat dikatakan

bahwa pada 4 (empat) tahun yang awal yaitu tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat jumlah belanja daerah tidak melebihi dari jumlah pendapatan yang diperoleh, namun selama kurun waktu empat tahun terakhir yakni dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 kinerja keuangan provinsi kepulauan Bangka Belitung masih belum baik karena belanja secara umum melebihi jumlah pendapatan yang diperoleh. Kenaikan jumlah pendapatan belum menjadi patokan mapannya perekonomian karena selanjutnya pada tahun 2009 dan 2010 jumlah pendapatan cenderung menurun diikuti dengan jumlah belanja yang cenderung meningkat bahkan melebihi dari pendapatan yang diperoleh. Walaupun terjadi penurunan jumlah belanja pada tahun 2009 yakni sebesar Rp 864.949.718.331,- menjadi Rp 863.327.367.498,-, pada tahun 2010, namun kenyataannya tetap terjadi surplus negatif dengan jumlah yang lebih kecil dibanding pada tahun sebelumnya. Saldo anggaran yang terbesar terjadi pada tahun 2005 yakni sebesar Rp 94.923.814.897,-. Hal ini disebabkan tidak terserapnya alokasi belanja yang telah dianggarkan sebelumnya serta terjadinya surplus realisasi pendapatan dari target yang direncanakan semula. Belanja yang tidak terserap maksimal diantaranya belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka. Khusus untuk belanja tidak tersangka, belanja ini hanya dapat dikeluarkan dengan beberapa ketentuan peraturan. Sedangkan saldo anggaran terendah terjadi pada tahun 2009 yakni terjadi defisit sebesar Rp 60.104.575.584, hal ini disebabkan karena target realisasi pendapatan yang sudah direncanakan tidak terpenuhi sampai akhir tahun sedangkan dalam hal realisasi belanja sudah terserap sebagaimana anggaran belanja yang dialokasikan.

Penerimaan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperoleh dari tiga komponen sumber penerimaan daerah yaitu : pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan sumbangan/bantuan dari pemerintah pusat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk seoptimal mungkin menggali sumber-sumber keuangan daerah berupa pendapatan asli daerah. Salah satu keberhasilan daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri dalam artian sedapat mungkin bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat diperkecil atau dihilangkan. Berikut tabel potensi PAD terhadap penerimaan guna melihat kontribusinya terhadap kemandirian daerah.

Tabel. 4.2. Potensi PAD dibandingkan dengan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003 s.d. 2010 (dalam rupiah)

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kemandirian Daerah
1	2003	275.323.315.617,-	71.780.118.253,-	26,07
2	2004	324.412.640.492,-	114.368.223.031,-	35,25
3	2005	435.167.347.128,-	188.167.354.665,-	43,24
4	2006	546.961.448.176,-	198.173.311.840,-	36,23
5	2007	609.867.856.708,-	203.541.902.473,-	33,37
6	2008	840.122.438.714,-	293.161.044.155,-	34,90
7	2009	804.845.142.747,-	246.799.844.957,-	30,66
8	2010	847.410.600.510,-	328.122.025.044,-	38,72
Rata-Rata		585.513.848.762,-	205.514.228.052,-	34,81

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov.Kep. Bangka Belitung

Dari tabel 4.2. dapat diketahui potensi keuangan daerah setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang cukup baik ditandai dengan naiknya jumlah penerimaan daerah. Namun hal ini belum bisa menjadi tolok ukur kemandirian daerah karena persentase kemandirian daerahnya masih fluktuatif dan cenderung turun. Pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung telah berupaya untuk merealisasikan seoptimal mungkin segala potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan PAD. Hal ini terlihat dari rata-rata penerimaan daerah yang mencapai nilai Rp 585.513.848.761,- dengan rata-rata PAD sebesar Rp 205.514.228.052,-. Sedangkan rata-rata kontribusi kemampuan daerah mencapai 34,81%, angka ini cukup menggembirakan karena pemerintah dinilai mempunyai potensi kemandirian yang baik. Posisi kemandirian daerah terbaik dicapai pada tahun 2005 yang ditandai dengan nilai kemandirian daerah sebesar 43,24%. Angka dengan nilai persentase > 40% ini belum pernah tercapai pada periode sebelum maupun sesudahnya. Persentase yang mencapai > 40% ini mengindikasikan daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian dengan kriteria sangat baik. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut APBD provinsi kepulauan Bangka Belitung mengalami surplus APBD yang cukup besar dimana jumlah pendapatan melebihi target realisasi yang ditetapkan sebelumnya serta anggaran belanja masih belum terserap dengan sempurna. Namun ada baiknya tingkat kemandirian yang telah diperoleh provinsi kepulauan Bangka Belitung ini juga dibandingkan dengan tingkat kemandirian provinsi lain sehingga bisa menjadi cermin atau acuan bagi provinsi kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan langkah kebijakan keuangan selanjutnya. Sehingga anggaran

mengenai pendapatan dan belanja daerah bisa dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin.

Adapun provinsi yang menjadi acuan sebagai pembanding adalah provinsi Sumatera Utara yang memiliki karakteristik umum dan daerah hampir sama dengan provinsi kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, provinsi Sumatera Utara juga sama-sama terletak di wilayah region sumatera dan juga Sumatera Utara merupakan provinsi yang keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sebagai provinsi baru ada baiknya provinsi kepulauan Bangka Belitung belajar dari provinsi Sumatera Utara yang lebih senior.

Tabel. 4.3. Potensi PAD dibandingkan dengan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 s.d. 2010 (dalam jutaan rupiah)

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kemandirian Daerah
1	2003	1.572,-	908,3,-	57,78
2	2004	1.882.7,-	1.143.1,-	60,71
3	2005	1.909.8,-	1.361,8,-	71,31
4	2006	2.517.3,-	1.502.6,-	59,69
5	2007	2.737.8,-	1.503,-	54,90
6	2008	3.225.8-	2.181,3,-	67,62
7	2009	3.212.55,-	2.016,-	62,75
Rata-Rata		2.436,85	1.516,58	62,11

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3. dapat diketahui potensi keuangan daerah setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang cukup baik ditandai dengan naiknya jumlah penerimaan daerah serta pendapatan asli daerah itu sendiri. Namun hal ini belum bisa menjadi tolok ukur kemandirian daerah karena persentase kemandirian daerahnya masih fluktuatif. Pemerintah provinsi Sumatera Utara tentunya telah berupaya untuk merealisasikan seoptimal mungkin segala potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Hal ini terlihat dari rata-rata penerimaan daerah yang mencapai nilai Rp 2.436,85,- dengan rata-rata PAD sebesar Rp 1.516,58,-. Sedangkan rata-rata kontribusi kemampuan daerah mencapai 62,11%, angka ini tentunya sangat mengembirakan bagi pemerintah provinsi Sumatera Utara karena telah dinilai mempunyai potensi kemandirian yang memuaskan. Sebagaimana kriteria kemandirian daerah yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa nilai kemandirian daerah $> 50\%$ memiliki arti bahwa tingkat kemandirian daerah berada pada posisi memuaskan sekaligus posisi dengan tingkatan kriteria yang tertinggi. Hal ini berarti daerah telah berada pada posisi yang mapan karena PAD nya telah memberikan kontribusi yang besar sehingga pemerintah daerah bisa memanfaatkan segala potensi daerahnya dengan maksimal sehingga tidak tergantung pada daerah lain maupun dari pemerintah pusat. Posisi kemandirian daerah terbaik dicapai pada tahun 2005 yang ditandai dengan nilai kemandirian daerah sebesar 71,31%. Angka dengan nilai persentase 71,31% ini belum pernah tercapai pada periode sebelum maupun sesudahnya dari rentang tahun 2003 s.d. tahun 2009. Persentase yang mencapai $> 50\%$ ini mengindikasikan daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian dengan kriteria sangat baik. Posisi

kemandirian daerah terendah dicapai pada tahun 2007 yang ditandai dengan nilai kemandirian daerah sebesar 54,90%. Walaupun angka dengan nilai persentase 54,90% ini merupakan posisi kemandirian terendah yang dicapai pemerintah provinsi Sumatera Utara, namun hal ini tetap menempatkan provinsi Sumatera Utara memiliki kemandirian daerah yang sangat baik. Jadi, secara umum dari rentang waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat kemandirian yang sangat baik. Artinya pemerintah provinsi Sumatera Utara sangat mengandalkan PADnya dalam penyusunan struktur APBD. Pemerintah telah mampu menciptakan kondisi yang ideal, yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan segala potensi lokal seoptimal mungkin sehingga PAD berpeluang memiliki peranan yang besar dalam APBD.

Untuk lebih jelasnya berikut akan peneliti sampaikan masing-masing kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah, retribusi daerah serta penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya terhadap penerimaan asli daerah, sehingga bisa diketahui komponen mana yang memiliki kontribusi yang paling besar serta komponen mana yang memiliki kontribusi paling kecil terhadap penerimaan asli daerah pada pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 4.4. Kontribusi Pajak terhadap PAD

No	Tahun	Pajak	PAD	Kontribusi Terhadap PAD
1	2003	64.805.217.056,-	71.780.118.253,-	90,28
2	2004	106.887.395.829,-	114.368.223.031,-	93,46
3	2005	172.164.295.174,-	188.167.354.665,-	91,50
4	2006	173.574.904.117,-	198.173.311.840,-	87,59
5	2007	173.292.131.932,-	203.541.902.473,-	85,14
6	2008	260.085.863.038,-	293.161.044.155,-	88,72
7	2009	215.623.984.830	246.799.844.957,-	87,37
8	2010	296.214.788.747,-	328.122.025.044,-	90,28
Rata-rata				89,29

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung

Berdasarkan tabel 4.4. dapat dilihat rata-rata nilai kontribusi selama 8 (delapan) tahun sebesar 89,29%, ini berarti hampir keseluruhan nilai PAD kontribusi terbesarnya diperoleh dari pajak daerah. Kontribusi terbesar yang diberikan oleh pajak terhadap PAD terjadi pada tahun 2004 yakni sebesar 93,46%, sedangkan kontribusi pajak terkecil yang diberikan terhadap PAD terjadi pada tahun 2007 yakni hanya sebesar 85,14%. Kontribusi pajak terbesar pada tahun 2004 disebabkan oleh realisasi pajak yang diperoleh melampaui anggaran target yang ditetapkan yakni dari target sebesar Rp 78.331.500.000,- terealisasi menjadi sebesar Rp 106.887.395.829 atau sebesar 136,46%. Sedangkan kontribusi pajak pada tahun 2007 memberikan kontribusi yang kecil karena target pajak yang ditetapkan tidak tercapai yakni nilai realisasinya hanya sebesar Rp

173.292.131.932,- dari target Rp 189.999.841.759,- atau realisasinya hanya sebesar 91,21%.

Tabel. 4.5. Kontribusi Retribusi terhadap PAD

No	Tahun	Retribusi	PAD	Kontribusi Terhadap PAD
1	2003	672.495.755,-	71.780.118.253,-	0,94
2	2004	581.369.425,-	114.368.223.031,-	0,51
3	2005	638.048.522,-	188.167.354.665,-	0,34
4	2006	942.895.364,-	198.173.311.840,-	0,48
5	2007	1.265.792.882,-	203.541.902.473,-	0,62
6	2008	3.000.947.464,-	293.161.044.155,-	1,02
7	2009	4.043.047.679,-	246.799.844.957,-	1,64
8	2010	2.628.024.061,-	328.122.025.044,-	0,80
Rata-rata				0,79

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung

Berdasarkan tabel 4.5. dapat diketahui rata-rata nilai kontribusi retribusi daerah terhadap PAD selama 8 (delapan) tahun adalah sebesar 0,79%, nilai ini sangat kecil dibandingkan nilai kontribusi yang diberikan oleh komponen pajak. Nilai kontribusi tertinggi yang diberikan oleh komponen retribusi terjadi pada tahun 2009 dan pada tahun 2005 kontribusi retribusi memberikan nilai yang paling rendah dicapai yaitu hanya sebesar 0,34%. Kontribusi pada tahun 2005 ini rendah disebabkan tidak tercapainya target yang diharapkan, ada beberapa jenis dari komponen retribusi yang tidak memperoleh hasil. Dari target yang diharapkan sebesar Rp 1.091.250.000,- hanya terealisasi sebesar Rp 638.048.522,- yang artinya hanya sebesar 58,47%. Kontribusi retribusi pada tahun 2009 bisa memperoleh nilai tertinggi disebabkan oleh realisasi yang melebihi target yang

ditetapkan yang mencapai nilai Rp 4.043.047.679,- dari target yang hanya sebesar Rp 2.221.007.500,-. Jadi nilai realisasi yang tercapai hampir 200% tepatnya sebesar 182,04%.

Tabel. 4.6. Kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD dan Penerimaan APBD secara keseluruhan

No	Tahun	Penerimaan lain-lain PAD yang sah	PAD	Kontribusi Terhadap PAD
1	2003	6.302.405.442,-	71.780.118.253,-	8,78
2	2004	6.899.457.777,-	114.368.223.031,-	6,03
3	2005	15.365.010.969,-	188.167.354.665,-	8,17
4	2006	23.655.512.359,-	198.173.311.840,-	11,94
5	2007	28.983.977.659,-	203.541.902.473,-	14,24
6	2008	30.074.233.653,-	293.161.044.155,-	10,26
7	2009	25.361.264.989,-	246.799.844.957,-	10,28
8	2010	26.201.884.427,-	328.122.025.044,-	7,99
Rata-rata				9,71

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung

Nilai rata-rata kontribusi penerimaan lain-lain PAD yang sah selama 8 (delapan) tahun adalah sebesar 9,71. Nilai kontribusi lain-lain PAD yang sah pada tahun 2007 mencapai nilai yang tertinggi selama era 8 (delapan) tahun tersebut yakni sebesar 14,24%. Tentunya ini tidak terlepas dari realisasi yang diperoleh terhadap target dimana realisasinya mencapai Rp 28.983.977.659,- dari target yang hanya sebesar Rp 15.432.000.000,- atau persentasenya sebesar 187,82. Realisasi yang dicapai hampir dua kali lipat dari target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2004 kontribusi penerimaan lain-lain PAD yang sah memberikan nilai yang paling kecil yakni hanya 6,03. Hal ini bukan disebabkan

oleh target realisasi yang tidak tercapai tetapi lebih disebabkan mungkin karena penetapan nilai target itu sendiri yang terlampau besar, karena nilai realisasi pada tahun 2004 mengalami kenaikan dibanding realisasi pada tahun 2003.

Besar kecilnya nilai kontribusi yang diperoleh oleh masing-masing komponen PAD tersebut pada umumnya disebabkan oleh ketepatan dari target anggaran penerimaan yang ditetapkan dengan realisasi penerimaan pendapatan yang diperoleh secara maksimal melalui kinerja dari banyak unsur yang terlibat didalamnya serta dari kebijakan yang ditetapkan oleh daerah itu sendiri. Pengoptimalan dari setiap unsur PAD sangat diperlukan sehingga bisa menempatkan daerah pada posisi kemandirian yang dicapai seperti pada provinsi Sumatera Utara. Tentunya kerjasama dari unsur yang terkait sangat berperan dalam mendongkrak nilai perolehan terutama dari pajak dan retribusi.

B. Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data penelitian ini berupa hasil semesteran laporan keuangan provinsi kepulauan Bangka Belitung yang menjabarkan tentang pendapatan asli daerah dan belanja daerah dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Jadi jumlah sampel penelitiannya sebanyak 16 (enam belas) sampel. Berikut akan dibahas hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti.

Kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerah

Analisis kinerja pendapatan

a. Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan

Analisis varians (selisih) pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yang dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi. Terhadap selisih yang tidak menyenangkan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dari sisi pendapatan secara umum dapat dilihat dari selisih anggaran dan persentase pertahunnya sebagaimana hasil yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.7. Hasil perhitungan analisis varians pendapatan

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PENDAPATAN ASLI DAERAH	110,84	137,44	130,82	107,63	98,53	142,41	118,88	156,72
Pajak	107,98	136,46	124,56	102,79	91,21	136,89	113,49	155,90
Retribusi	126,69	89,10	58,47	87,14	110,85	262,80	354,05	230,14
Bagian laba usaha daerah	-	-	-	-	-	-	173,08	110,10
Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya	149,52	163,11	339,19	166,71	187,82	194,88	164,34	169,79
DANA PERIMBANGAN	108,54	103,15	115,55	108,24	112,94	151,74	146,96	122,14
Bagi hasil pajak dan bukan pajak	183,72	113	290,83	173,70	215,12	334,09	258,03	248,77
DAU	100	104,76	100	100	100	122,45	127,76	128,58
DAK	100	-	-	-	-	-	229,81	12,34

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	102,80	37,81	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	112,54	114,23	121,69	108,01	107,68	148,34	137,06	133,55

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov.Kep. Bangka Belitung

Secara umum dari hasil perhitungan terhadap laporan realisasi anggaran dapat diketahui kinerja pendapatan daerah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 dapat dinyatakan baik yang ditandai dengan pencapaian realisasi pendapatan yang melebihi target yang dianggarkan. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian tetapi jika target pendapatan tidak tercapai hal ini butuh penelaahan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target. Selisih lebih realisasi pendapatan yang diharapkan (*favourable variance*) selama delapan tahun terakhir ditandai dengan pencapaian kinerja pendapatan daerah tertinggi yang dicapai pada tahun 2008 yakni sebesar 148,34%. Hal ini menunjukkan kinerja pendapatan yang sangat baik karena hampir melampaui setengah dari target yang dianggarkan. Kenaikan hampir terjadi pada setiap komponen pendapatan yaitu pajak (142,41%), retribusi (136,89), lain-lain PAD yang sah (194,88%), bagi hasil pajak dan bukan pajak (334,09%), dan dana alokasi umum (122,45%). Sedangkan pencapaian kinerja keuangan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2007 yakni hanya sebesar 107,68%. Angka selisih ini walaupun merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*) dianggap biasa saja dan cukup baik bagi pencapaian kinerja pendapatan. Pencapaian kinerja pendapatan ini terjadi disebabkan karena tidak tercapainya target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya pada komponen pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah

yang hanya mencapai realisasi sebesar 91,21%. Dalam hal ini terjadi selisih anggaran pajak daerah yang tidak diinginkan (*unfavourable variance*) karena tidak tercapainya target pajak daerah. Selain itu, secara umum pencapaian nilai PAD dan perimbangan hampir seimbang dalam artian ada kalanya nilai pencapaian PAD melebihi nilai pencapaian dana perimbangan dan sebaliknya. Begitupun juga pencapaian kinerja PAD dan dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah. Ini berarti bahwa PAD dan dana perimbangan memiliki peran yang sama sebagai faktor penentu utama kinerja anggaran pendapatan daerah. Memang masih ada pencapaian yang belum optimal pada dana perimbangan khususnya pada dana alokasi khusus (DAK) sehingga membuat kinerja anggaran menjadi kurang baik. Seperti pada tahun 2004 dan 2005, estimasi anggaran sudah ditentukan dengan cukup baik namun tidak ada realisasi yang masuk dari pemerintah pusat, namun ketika tidak ada estimasi anggaran DAK pada tahun 2008 maka terjadi realisasi penerimaan DAK dari pemerintah pusat. Pada tahun 2010 porsi realisasi DAK dari pemerintah pusat sangat kecil sekali hanya sebesar 12,34% dari estimasi yang dianggarkan.

b. Analisis pertumbuhan pendapatan

Analisis pertumbuhan atau tren dilakukan untuk mengetahui kecenderungan kinerja anggarannya apakah mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif yang berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya meningkat. Analisis pertumbuhan pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 dapat diketahui pada tabel 4.8

Tabel 4.8. Hasil analisis pertumbuhan pendapatan

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	59,33	64,53	5,32	2,71	44,53	(16,11)	32,95
Pajak	-	64,94	61,07	0,82	(0,16)	50,09	(17,10)	37,38
Retribusi		(13,55)	9,75	47,78	34,25	137,08	34,73	(35)
Bagian laba usaha daerah	-	-	-	-	-	-	73,08	73,71
Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya	-	9,47	122,70	53,96	22,53	3,76	(15,67)	3,31
DANA PERIMBANGAN	-	3,15	17,65	36,03	20,93	34,36	2,19	(6,92)
Bagi hasil pajak dan bukan pajak	-	13,00	50,14	1,12	44,20	55,30	(22,77)	(3,59)
DAU	-	4,76	10,06	47,15	15,84	22,45	4,33	0,65
DAK	-	(100)	-	-	-	-	129,81	(82,28)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	(62,19)	(100)	-	-	-	-	(100)
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	-	15,38	32,85	22,75	14,17	37,75	(4,20)	5,29

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan pendapatan pada tabel 4.8. dapat dilihat bahwa kinerja pendapatan daerah secara umum memiliki pertumbuhan yang positif namun tingkat kecenderungannya (*trend*) mengalami naik turun atau kecenderungan yang fluktuatif. Selama kurun waktu dari tahun 2003 sampai dengan 2010 pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan yang positif kecuali pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan pendapatan asli daerah memiliki kecenderungan / trend yang tidak beraturan. Pada tahun 2004

sampai dengan 2005 memiliki kecenderungan meningkat bahkan sampai pada nilai tertinggi yaitu 64,53% pada tahun 2005, dan mengalami kecenderungan menurun pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing pada 5,31% dan 2,71%. Setelah sempat naik pada tahun 2008 sebesar 44,53% kemudian turun drastis ke tingkat yang paling rendah yang pernah dicapai selama kurun waktu delapan tahun yaitu -16,11 dan menunjukkan pertumbuhan yang negatif untuk selanjutnya kembali naik pada tahun 2010 sebesar 32,95% dengan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan yang positif mengindikasikan hal yang bagus karena kinerja keuangan pendapatan telah berhasil memperoleh penerimaan dari pendapatan daerah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan anggaran belanja. Sedangkan pertumbuhan yang negatif mengindikasikan telah terjadi sesuatu yang tidak baik pada kinerja pemerintah daerah sehingga pemerintah dituntut sangat berhati-hati dalam menentukan kebijakan anggaran belanjanya karena jika tidak dilakukan maka keuangan daerah akan mengalami gangguan karena tidak didukung oleh sumber pendapatan yang tidak memadai sehingga program-program pemerintah tidak bisa dijalankan.

c. Analisis rasio keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap rasio-rasio keuangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.9. Hasil analisis rasio keuangan pendapatan

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rasio Kemandirian Daerah	35,27	54,47	76,18	58,98	50,09	53,89	44,24	63,19
Rasio Ketergantungan Daerah	71,69	64,09	56,76	62,90	66,63	64,98	69,31	61,28
Derajat Desentralisasi	26,07	35,25	43,24	36,23	33,37	34,89	30,66	38,72
Rasio Efektivitas PAD	110,84	137,44	130,82	107,63	98,53	142,41	118,88	156,72
Rasio Efisiensi PAD	22,15	29,20	20,04	22,83	21,81	25,49	19,73	40,77
Rasio Likuiditas	-	10,17	11,92	15,94	44,00	9,75	12,25	7,50
Rasio Solvabilitas	-	99,17	78,72	94,32	313,08	62,00	96,31	72,81
Rasio Leverage	-	-	-	77,51	268,75	52,24	83,93	65,22

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov.Kep. Bangka Belitung

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat dianalisa kinerja keuangan pendapatan berdasarkan rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio leverage.

Berdasarkan perhitungan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah tertinggi dicapai pada tahun 2005 sebesar 76,18% yang mengindikasikan daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian daerah dengan kriteria sangat baik karena telah mencapai persentase $> 50\%$. Dengan persentase ini dapat dilihat bahwa peranan pemerintah pusat menjadi tidak dominan dalam artian peranan pemerintah pusat menjadi tidak begitu kuat sehingga daerah dianggap hampir mampu untuk melaksanakan otonomi sendiri dalam mengatur

urusan keuangannya. Sedangkan rasio kemandirian daerah terendah sebesar 35,27% pada tahun 2003 mengindikasikan bahwa provinsi kepulauan Bangka Belitung berada dalam kondisi yang baik karena berada dalam rentang 30,1% - 40%. Dengan nilai persentase kemandirian ini mengindikasikan bahwa campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena pemerintah daerah dianggap memiliki tingkat kemandirian yang sudah mampu untuk melaksanakan otonomi sendiri.

Rasio ketergantungan daerah digunakan untuk melihat tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi. Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan daerah dapat diketahui posisi yang tertinggi terjadi pada tahun 2003 sebesar 71,69%, ini mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat. Lebih dari setengah pendapatan diperoleh dari dana transfer pemerintah pusat, hal ini tentu menjadi kurang baik bagi kinerja pendapatan daerah. Hal ini terjadi disebabkan karena pada tahun 2003 merupakan masa awal pemerintahan provinsi sehingga pemerintah belum bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Rasio ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2005 yakni sebesar 56,76%, ini mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat sudah sedikit lebih rendah dibanding pada tahun 2003. Pemerintah propinsi sudah bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya sendiri yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah sehingga tidak memiliki tingkat ketergantungan yang mutlak terhadap pemerintah pusat dalam mengatur belanja daerahnya sendiri.

Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pada hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 dapat diketahui nilai rasio desentralisasi fiskal tertinggi dicapai pada tahun 2005 yakni sebesar 43,24%. Ini berarti pendapatan asli daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah lebih dari 40%, baru diikuti oleh komponen yang lain yaitu dari dana perimbangan, DAU, DAK serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi sudah cukup baik karena kontribusi PAD nya cukup besar terhadap nilai total penerimaan daerah. Sedangkan derajat desentralisasi fiskal terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 26,07%. Angka ini sangat kecil artinya pendapatan asli daerah hanya sedikit memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sehingga daerah belum memiliki kemampuan yang cukup dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerahnya. Dalam artian daerah belum bisa mengandalkan pendapatan asli daerahnya sendiri dan masih sangat tergantung dari dana pemerintah pusat. Hal ini bisa disebabkan karena belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pajak, retribusi, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Melalui rasio efektivitas dapat dilihat bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat diketahui rasio efektivitas PAD tertinggi tercapai pada tahun 2004 sebesar 156,72%, ini berarti kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan

PAD sesuai yang ditargetkan sudah sangat efektif karena mencapai nilai lebih dari 100%. Sedangkan rasio efektivitas terendah dicapai pada tahun 2007 yakni sebesar 98,53% artinya kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan cukup efektif karena berada pada rentang 90%-99%. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan PAD yang dicapai tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk mengoptimalkan perolehan PAD sehingga kemampuan pemerintah daerah menjadi efektif.

Rasio efisiensi digunakan untuk melihat tingkat efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan karena meskipun Pemerintah Daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Rasio efisien PAD tertinggi dicapai pada tahun 2010 yakni sebesar 40,77% ini berarti kinerja pemerintah provinsi dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah tidak efisien karena nilai efisiennya lebih dari 40%. Berarti biaya yang dikeluarkan dalam perolehan target pendapatan asli daerah cukup besar. Sedangkan rasio efisiensi terendah dicapai pada tahun 2009 yakni sebesar 19,73%, ini berarti kinerja pemerintah provinsi sudah efisien dalam melakukan pemungutan pendapatan asli

daerah karena berada pada rentang nilai efisien 10%-20%. Biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatan asli daerah sudah sesuai dengan hasil yang dicapai.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja. Pos persediaan pada neraca pemerintah daerah umumnya bukan persediaan barang dagang yang ditujukan untuk dijual tetapi untuk digunakan dalam operasi pemerintah atau diserahkan kepada masyarakat. Rasio likuiditas yang digunakan disini adalah analisis rasio lancar. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki asset yang mencukupi untuk melunasi utangnya. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.8. diketahui bahwa nilai rasio lancar tertinggi dicapai pada tahun 2007 yakni sebesar 44,00. Hal ini berarti bahwa untuk setiap Rp 1 utang, pemerintah provinsi mempunyai Rp 44 aktiva yang sangat lancar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat likuid. Pada tahun 2010 rasio lancar pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung mempunyai nilai yang paling kecil yaitu sebesar 7,5. Hal ini berarti bahwa untuk setiap Rp 1 utang, pemerintah provinsi mempunyai Rp 7,5 aktiva yang sangat lancar. Kondisi ini menunjukkan walaupun rasio lancar tahun 2010 tidak sebesar pada tahun 2007, kondisi keuangan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung masih likuid karena nilai jaminan utangnya masih lebih dari 1. Nilai

standar rasio lancar yang dianggap aman adalah 2:1. Jadi secara keseluruhan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung dinilai sehat kondisi keuangannya.

Rasio solvabilitas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo. Rasio ini bisa diukur dengan rasio aktiva terhadap utang atau rasio ekuitas dana terhadap utang. Rasio solvabilitas menunjukkan perbandingan antara total aktiva dengan total utang. Rasio solvabilitas tertinggi tercapai pada tahun 2007 yakni sebesar 313,08. Hal ini berarti untuk setiap Rp 1 utang, pemerintah provinsi mempunyai Rp 313,08 aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung sangat solvable karena rasio solvabilitas yang dianggap aman minimal 1:1. Selanjutnya rasio solvabilitas terendah terjadi pada tahun 2008 yakni sebesar 62,00. Hal ini berarti untuk setiap Rp 1 utang, pemerintah provinsi mempunyai Rp 62 aset.

Rasio leverage digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang. Rasio leverage selama ini hanya digunakan di sektor perusahaan untuk mengukur komposisi sumber pembiayaan yang berasal yang berasal dari kreditor dan investor. Di pemerintah daerah, rasio ini mungkin belum (tidak) merupakan rasio yang penting sebab tingkat utang daerah yang masih relative kecil dan syarat penarikan pinjaman daerah menggunakan DSCR dan rasio maksimum pinjaman. Rasio leverage menunjukkan perbandingan antara kekayaan bersih (ekuitas dana) dengan utang. Rasio leverage dengan nilai tertinggi dicapai pada tahun 2007 yakni sebesar 268,75. Ini berarti setiap Rp 1 utang dijamin dengan kekayaan bersih (ekuitas

dana) sebesar Rp 268,75. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung sangat solid. Sedangkan rasio leverage yang terendah terjadi pada tahun 2008 yakni sebesar 52,24. Seperti pada hasil perhitungan rasio-rasio sebelumnya, nilai rasio leverage terendah ini tidak berarti kondisi keuangan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung ini tidak solvabel. Dengan nilai rasio leverage sebesar 52,24 ini berarti bahwa setiap Rp 1 utang dijamin dengan dengan ekuitas dana sebesar Rp 52,24. Hal ini masih menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih solvabel. Pemerintah daerah dilihat dari kemampuan keuangannya layak untuk mengadakan pinjaman karena pemerintah daerah tersebut masih memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya.

Analisis kinerja belanja

1. Analisis varians belanja

Sebagaimana yang sudah menjadi ketentuan bahwa dalam hal anggaran belanja daerah merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Analisis varians belanja akan menunjukkan selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan sehingga akan menunjukkan efisiensi belanja ataupun inefisiensi belanja. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu selisih disukai (*favourable variance*) dan selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). Berikut hasil dari perhitungan analisis varians belanja.

Tabel 4.10. Hasil analisis varians belanja

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Aparatur Daerah	73,01	72,22	78,73	77,87	-	-	-	-
Administrasi Umum	69,64	73,60	78,53	78,82	-	-	-	-
Operasi dan Pemeliharaan	91,12	59,13	76,34	72,90	-	-	-	-
Modal	82,57	77,63	80,85	76,97	-	-	-	-
Pelayanan Publik	86,99	71,27	87,11	85,81	-	-	-	-
Administrasi Umum	32,50	66,34	44,42	57,68	-	-	-	-
Operasi dan Pemeliharaan	72,68	90,97	80,53	86,31	-	-	-	-
Modal	90,03	70,26	89,75	86,97	-	-	-	-
Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	96,56	91,95	83,59	87,50	-	-	-	-
Tidak Tersangka	13,07	46,38	3,24	18,68	-	-	-	-
Tidak Langsung	-	-	-	-	83,54	83,74	80,92	86,17
Pegawai	-	-	-	-	83,89	77,53	88,14	90,09
Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidi	-	-	-	-	-	-	99,36	124,22
Hibah	-	-	-	-	100	99,08	82,10	74,96
Bantuan Sosial	-	-	-	-	77,18	83,43	94,63	70,82
Bagi Hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa	-	-	-	-	81,55	82,66	68,30	93,63
Bantuan kepada /kab/ kota dan pem. desa	-	-	-	-	92,25	77,39	94,15	76,26
Tidak terduga	-	-	-	-	43,24	-	26,60	90,22
Langsung	-	-	-	-	68,60	76,47	70,72	80,10
Pegawai	-	-	-	-	76,02	76,48	85,03	85,99
Barang dan jasa	-	-	-	-	63,94	68,85	81,22	81,48
Modal	-	-	-	-	69,29	80,46	64,39	78,94
JUMLAH BELANJA	81,37	77,24	81,89	83,22	75,34	79,82	75,72	82,67

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung

Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang telah diolah sebelumnya dapat diketahui bahwa besaran anggaran yang terserap selama tahun 2003 sampai tahun 2010 berada pada posisi tertinggi yakni sebesar 82,67% di tahun 2010. Hal ini berarti pemerintah propinsi telah melakukan penghematan anggaran sebesar 17,33%. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal dalam hal ini yang masih berada di bawah 80% diketahui dari anggaran belanja hibah, bantuan sosial, bantuan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa serta pada belanja modal. Jika dilihat dari persentasenya jumlah penghematan yang dilakukan cukup besar apalagi jika dilihat dengan nilai nominalnya. Namun dalam melakukan analisis varians anggaran sebaiknya tidak terpaku pada persentase penghematan yang berhasil dilakukan tetapi juga jumlah nominalnya. Secara normative, anggaran belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilakukan. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Posisi terendah penyerapan anggaran belanja terjadi pada tahun 2007 yakni sebesar 75,34. Hal ini berarti terjadi penghematan anggaran sebesar 24,66%, angka ini cukup besar apalagi jika dinominalkan. Penghematan anggaran belanja yang cukup besar ini mengindikasikan kinerja pemerintah propinsi menjadi kurang baik karena penyerapan anggaran belanja di bawah 90% mengesankan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran misalnya adanya penggelembungan (*mark up*) belanja dari belanja wajarnya atau mungkin banyak program yang tidak dijalankan. Penyerapan anggaran yang besar terjadi pada belanja tidak terduga yakni hanya sebesar 43,24%. Hal ini terjadi bukan karena

pemerintah tidak mampu melaksanakan belanja yang sudah dianggarkan tetapi pengeluaran belanja tidak terduga ini harus diikuti dengan ketentuan dan persetujuan DPR. Belanja tidak terduga ini dialokasikan untuk belanja yang sifat insidental misalnya bantuan untuk korban bencana alam. Selain itu, besarnya penghematan anggaran juga terjadi pada belanja langsung yang seharusnya bisa terserap maksimal karena hal ini berkenaan langsung dengan kegiatan-kegiatan publik. Jadi penghematan anggaran belanja ini bukan merupakan prestasi karena pengendalian anggaran yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

1. Analisis pertumbuhan belanja

Berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja yang mana setiap anggaran harus dikaitkan dengan target kinerja, maka kecenderungan untuk terus meningkatkan anggaran tidak perlu lagi terjadi. Analisis pertumbuhan belanja digunakan untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Berikut hasil perhitungan pertumbuhan belanja pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2010.

Tabel 4.11. Hasil analisis pertumbuhan belanja

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Aparatur Daerah	(5,57)	20,49	21,31	-	-	-	-
Administrasi Umum	(2,30)	11,38	25,86	-	-	-	-
Operasi dan Pemeliharaan	36,28	17,07	23,18	-	-	-	-
Modal	(35,06)	78,09	3,14	-	-	-	-
Pelayanan Publik	4,82	19,90	38,37	-	-	-	-
Administrasi Umum	199,86	(14,77)	59,78	-	-	-	-
Operasi dan Pemeliharaan	6,76	28,59	161,31	-	-	-	-
Modal	2,47	20,37	27,64	-	-	-	-
Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	73,17	25,05	48,32	-	-	-	-
Tidak Tersangka	350,54	(91,44)	476,53				
Tidak Langsung	-	-	-	-	17,75	19,41	(15,00)
Pegawai	-	-	-	-	43,39	25,16	17,11
Bunga	-	-	-	-	-	-	-
Subsidi	-	-	-	-	-	-	87,54
Hibah	-	-	-	-	114,72	53,92	(83,14)
Bantuan Sosial	-	-	-	-	(37,74)	(37,40)	(37,47)
Bagi Hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa	-	-	-	-	11,14	4,27	8,63
Bantuan kepada /kab/ kota dan pemerintah desa	-	-	-	-	(30,42)	14,61	165,99
Tidak terduga	-	-	-	-	100	-	79,83
Langsung	-	-	-	-	25,92	1,53	18,74
Pegawai	-	-	-	-	43,32	(30,93)	(18,65)
Barang dan jasa	-	-	-	-	28,97	20,42	6,76
Modal	-	-	-	-	20,92	1,25	31,60
JUMLAH BELANJA	16,61	21,10	36,19		21,83	10,18	1,06

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah ditampilkan pada tabel 4.5 secara umum selama delapan tahun tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan belanja daerah memiliki kecenderungan positif. Pertumbuhan anggaran belanja yang terjadi di provinsi kepulauan Bangka Belitung selalu positif walaupun nilainya bisa lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena karena memang belanja tersebut tidak prioritas untuk tahun sekarang. Anggaran tertentu yang tidak menambah nilai bahkan bisa dihilangkan atau dipangkas dan dialihkan untuk belanja lain yang prioritasnya lebih penting. Sebagaimana prinsip pertumbuhan belanja daerah harus terencana dan terkendali dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas fiskal daerah terjaga.

2. Analisis keserasian belanja

Analisis keserasian belanja digunakan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah. Berikut adalah hasil analisis rasio keserasian belanja.

Tabel 4.12. Hasil analisis rasio keserasian belanja

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rasio Belanja Operasi Thd total Belanja	0,26	0,33	0,31	0,31	0,55	0,56	0,57	0,43
Rasio Belanja Modal thd Total Belanja	0,24	0,28	0,28	0,31	0,31	0,30	0,28	0,36
Rasio Belanja Langsung thd Total belanja	-	-	-	-	0,50	0,52	0,48	0,56
Rasio Belanja Tidak Langsung thd Total belanja	-	-	-	-	0,50	0,48	0,52	0,44

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov.Kep. Bangka Belitung

Berdasarkan analisis rasio belanja operasi terhadap belanja merupakan rasio yang membandingkan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (*recurrent*). Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Secara umum, rasio belanja operasi ini mengalami peningkatan selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 dan kecenderungan porsinya belum mendominasi total belanja daerah. Rasio belanja operasi tertinggi terjadi pada tahun 2009 yakni sebesar 57%. Ini berarti belanja operasi hampir mendominasi belanja daerah karena mendekati nilai 60%. Peningkatan belanja operasi ini dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam keadaan yang cukup tinggi. Sedangkan rasio belanja terendah terjadi pada tahun 2003 yakni sebesar 26%, ini berarti belanja operasi tidak mendominasi belanja daerah karena persentase belanja daerah masih sangat kecil. Tentunya hal ini juga mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan daerahnya juga masih sangat rendah.

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan akan memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang. Belanja modal pastinya akan mempengaruhi neraca daerah, yaitu menambah aset

daerah. Kebalikan dengan belanja operasi, pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah pada umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan daerah yang tinggi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki asset modal yang mencukupi. Proporsi belanja modal pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 selalu berada pada rentang 20%-30%. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah menganggarkan belanja modal sesuai proporsi yang dibutuhkan dan persentase yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa dipengaruhi besar kecil pendapatan yang diperoleh. Rasio belanja modal tertinggi dicapai pada tahun 2010 yakni sebesar 36% dan rasio belanja modal terendah dicapai pada tahun 2003 yakni hanya sebesar 24%. Pada tahun 2003 sama halnya dengan belanja operasi, belanja modal juga memiliki proporsi yang paling rendah hal ini disebabkan karena sebagai provinsi baru pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung belum bisa melaksanakan penganggaran secara maksimal karena masih tergantung dengan pemerintah pusat sedangkan pendapatan asli daerah sendiri masih sangat kecil. Proporsi belanja modal tahun 2010 lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya disebabkan karena pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan, walaupun secara teori pendapatan daerah yang tinggi cenderung memiliki proporsi belanja modal yang rendah.

Analisis proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu pengendalian

biaya dan pengendalian anggaran (*cost and budgetary control*). Belanja langsung dan belanja tidak langsung biasanya tidak menjadi bagian dari laporan keuangan eksternal, namun informasi tersebut sangat penting bagi manajemen internal. Belanja langsung pada umumnya lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan. Secara umum selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2010, belanja langsung memiliki proporsi yang hampir sama dengan belanja tidak langsung. Ini terlihat dari rasio belanja langsung tertinggi yang dicapai pada tahun 2010 sebesar 56% dan rasio belanja langsung terendahnya dicapai pada tahun 2009 yakni sebesar 48%. Sedangkan rasio belanja tidak langsung tertinggi dicapai pada tahun 2009 yakni sebesar 52% sedangkan rasio belanja tidak langsung terendah dicapai pada tahun 2010 yakni sebesar 44%. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya pada tahun 2010 belanja langsung memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung, dengan demikian diharapkan belanja langsung tersebut mampu mempengaruhi kualitas kegiatan agar bisa lebih berkontribusi bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini tentunya sangat baik dalam menggambarkan kondisi keuangan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung. Namun, proporsi belanja langsung pada tahun 2009 yang hanya mencapai 48% juga tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi keuangan pemerintah yang kurang baik tetapi pada tahun tersebut belanja tidak langsung memperoleh beban dari SKPD tertentu seperti pada belanja hibah yang harus menganggarkan anggaran yang cukup besar karena menerima pelimpahan dari SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga mau tidak mau proporsi belanja tidak langsung membengkak dari sebelumnya.

3. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Dengan rasio efisiensi belanja dapat diketahui apakah pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran atau belum. Hasil dari perhitungan rasio ini tidak bersifat absolut, karena memang belum ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Berikut hasil perhitungan rasio efisiensi belanja.

Tabel 4.13. Hasil analisis rasio efisiensi belanja

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rasio Efisiensi Belanja	0,81	0,77	0,82	0,83	0,75	0,80	0,76	0,83

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dikemukakan pada tabel 4.7, pemerintah daerah secara umum selama delapan tahun dianggap telah melakukan efisiensi anggaran karena rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Dengan tingkat efisiensi tertinggi dicapai pada tahun 2010 yakni sebesar 83%, dan rasio efisiensi terendah terjadi pada tahun 2007 yakni hanya sebesar 75%.

Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah

Sebelum melakukan pengujian secara mendalam melalui regresi, ada baiknya diketahui deskriptif atau gambaran yang sistematis mengenai data yang diteliti sehingga penelitian ini bisa lebih akurat dalam membahas fakta-fakta dan

hubungan antar fenomena. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan secara statistik diperoleh kenyataan sebagaimana tertera pada tabel 4.12.

Tabel 4.14. Nilai distribusi frekuensi komponen Pendapatan Asli Daerah dan Belanja daerah

	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Lain-lain PAD yang sah	Belanja Daerah	
N	16	16	16	16	
	0	0	0	0	
Mean	91.415,4375	860,7500	10.177,8125	279.098,0625	
Std. Error of Mean	10.575,20052	203,46080	1.249,20788	53.081,49762	
Median	92.311,0000	491,0000	11.675,0000	219.475,0000	
Mode	29.990,00(a)	-36,00(a)	2.915,00(a)	44.345,00(a)	
Std. Deviation	42.300,80206	813,84319	4.996,83151	212.325,99048	
Variance	1789357855,063	662340,733	24968325,096	45082326234,329	
Skewness	-,057	1,217	-,505	,714	
Std. Error of Skewness	,564	,564	,564	,564	
Kurtosis	-1,177	,022	-1,313	-,953	
Std. Error of Kurtosis	1,091	1,091	1,091	1,091	
Range	130.767,00	2.639,00	14.232,00	588.426,00	
Minimum	29.990,00	-36,00	2.915,00	44.345,00	
Maximum	160.757,00	2.603,00	17.147,00	632.771,00	
Sum	1.462.647,00	13.772,00	162.845,00	4.465.569,00	
Percentiles					
	25	48.769,7500	372,5000	3.885,7500	78.527,5000
	50	92.311,0000	491,0000	11.675,0000	219.475,0000
	75	131.827,7500	1.572,7500	14.131,7500	514.769,5000

Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS versi 15

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah diperoleh diatas, dapat diperoleh beberapa gambaran diantaranya :

- b. Rata-rata (mean) perolehan pajak daerah (X1) dengan jumlah data sebanyak 16 adalah 91.415,54 dengan standar deviasinya sebesar 42.300,80. Hal ini menunjukkan tidak adanya outlier pada variable pajak daerah karena standar deviasinya lebih kecil dari rata-rata (mean).
- d. Rata-rata (mean) perolehan retribusi daerah dengan jumlah data sebanyak 16 adalah 860,75 dengan standar deviasinya sebesar 813,84. Hal ini menunjukkan

tidak adanya outlier pada variable retribusi daerah karena standar deviasinya lebih kecil dari rata-rata (mean).

- e. Rata-rata (mean) perolehan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya dengan jumlah data sebanyak 16 adalah 10.177,73 dengan standar deviasinya sebesar 4.996,83. Hal ini menunjukkan tidak adanya outlier pada variabel penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya karena standar deviasinya lebih kecil dari rata-rata (mean).
- f. Rata-rata (mean) perolehan belanja daerah dengan jumlah data sebanyak 16 adalah 279.098,1 dengan standar deviasinya sebesar 212.326. Hal ini menunjukkan tidak adanya outlier pada variable belanja daerah karena standar deviasinya lebih kecil dari rata-rata (mean).

Sebelum dilakukan uji regresi untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, maka dilakukan beberapa pengujian asumsi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Agusyana, Yus (2011 ; 95) bahwa penggunaan model regresi didasarkan pada hal-hal berikut :

1. Data harus berdistribusi normal
2. Data berskala interval atau rasio
3. Model regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada ANOVA sebesar $< 0,05$
4. Predictor yang digunakan sebagai variable bebas harus layak. Kelayakan ini diketahui jika angka Standar error of estimate $<$ Standar Deviation. Dalam hal ini hasil penelitiannya bisa diperoleh dari tabel 4.6 diatas.
5. Koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji T. koefisien regresi signifikan jika t hitung $>$ t tabel (nilai kritis).

6. Tidak boleh terjadi multikolinieritas, artinya tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antar variable bebas. Syarat ini hanya berlaku untuk regresi linier berganda dengan variable bebas lebih dari satu.
7. Tidak terjadi autokorelasi. Terjadi autokorelasi jika angka Durbin Watson (DB) sebesar <1 dan >3 .
8. Keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai r^2 semakin besar nilai tersebut maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1 maka model regresi semakin baik.
9. Jika nilai r^2 sebesar 1 akan mempunyai arti kesesuaian yang sempurna. Maksudnya seluruh variasi dalam variable Y dapat diterangkan oleh model regresi dan sebaliknya jika r^2 sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linier antara X dan Y.

Untuk memenuhi persyaratan regresi tersebut maka peneliti telah melakukan beberapa pengujian, diantaranya :

Pengujian Normalitas Data

Sebagai pedoman, bila rasio kurtosis dan skewness berada diantara -2 hingga +2, maka distribusi data adalah normal. Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan rasio pada tabel 4.3. diatas, dapat dilihat nilai rasio skewness dan kurtosis dari masing-masing variable berada diantara -2 hingga + 2, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa distribusi data tersebut adalah normal.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas tidak boleh hanya berpatok pada gambar saja karena kebenarannya belum bisa dipertanggung jawabkan secara penuh, karena masih ada metode statistik yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heterokedastisitas atau tidak. Nilai statistik yang diperoleh dari seluruh variabel penjelas tidak ada yang signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami masalah heterokedastisitas sehingga salah satu syarat regresi bisa terpenuhi.

Pengujian Autokorelasi

Autokorelasi biasanya terjadi apabila pengukuran variabel dilakukan dalam interval waktu tertentu. Adanya autokorelasi menyebabkan variansi sampel tidak dapat menggambarkan variansi populasi, model regresi yang dihasilkan tak dapat digunakan untuk menduga nilai variabel tak bebas dari nilai variabel bebas tertentu, koefisien regresi yang diperoleh kurang akurat. Salah satu alternatif untuk mengatasi model yang terkena gangguan autokorelasi adalah dengan memasukkan *lag* dari variabel terikat menjadi salah satu variabel bebasnya. Berdasarkan hasil penelitian nilai DW pada data transformasi sebesar 1,776. Ini berarti gangguan autokorelasi yang terjadi sebelumnya sudah dihilangkan karena nilai DW sudah berada pada rentang -2 dan $+2$, sehingga pengujian data selanjutnya bisa dilakukan.

Pengujian Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dideteksi dengan menggunakan Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance Value $> 0,10$ dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan pengolahan data terlihat bahwa nilai tolerance semua variable $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut terbebas dari masalah multikolinieritas.

Hasil Penelitian Pengaruh komponen PAD terhadap Belanja Daerah

Dalam penelitian ini komponen PAD yang dimaksud adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya terhadap belanja daerah. Hasil perhitungan diperoleh dari penggunaan aplikasi SPSS versi 15 dengan menggunakan metode analisis regresi.

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variable terikat (dependent) dapat diprediksikan (meramalkan) melalui variable (bebas) independent secara parsial maupun secara simultan.

Berikut pengujian hipotesis dan dasar pengambilan keputusan dengan regresi sederhana (simple regression) untuk menguji pengaruh masing-masing jumlah pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap jumlah belanja daerah.

Pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah

Analisis ini menunjukkan pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah.

Tabel 4.23. Ringkasan regresi pajak terhadap belanja

	Model
R	,690 ^a
R Square	,476
Adjusted R Square	,439
Std. Error of The estimate	159038,009
Change Statistic R Square change	,476
F Change	12,736
df1	1
df2	14
Sig.F change	,003

Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS versi 15

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 4.8, diperoleh nilai $R = 0,690$. Nilai R merupakan hubungan antara pajak daerah dan belanja daerah. Sedangkan R^2 adalah koefisien determinasi dengan nilai $0,476$. Hal ini menunjukkan pengertian bahwa belanja daerah (Y) dipengaruhi sebesar $47,6\%$ oleh pajak daerah (X_1), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar $52,4\%$.

Selanjutnya akan dilihat hasil dari uji *Anova* untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja daerah.

Tabel 4.24. Hasil *Analysis of Variance* Pajak terhadap Belanja

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3221316563 23,553	1	322131656323, 553	12,736	,003(a)
	Residual	3541032371 91,384	14	25293088370,8 13		
	Total	6762348935 14,937	15			

a Predictors: (Constant), Pajak Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Pada tabel 4.24 ini ditampilkan hasil yang diperoleh adalah nilai $F = 12,736$ dengan tingkat probabilitas sig. 0,003. Oleh karena probabilitas (0,003) jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi belanja daerah.

Tabel 4.25. Model Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	-37597,526	97241,210		-,387	,705
	Pajak Daerah	3,464	,971	,690	3,569	,003

a Dependent Variable: Belanja Daerah
Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS versi 15

Hasil dari uji koefisien ini dikemukakan nilai konstanta (a) = -37597,526 dan $\beta = 0,690$ serta harga t hitung dan tingkat signifikansi = 0,003.

Dengan demikian diperoleh persamaan regresinya sebagaimana persamaan pada 3.8 sebagai berikut :

$BD = a + bX_i + e$ atau secara umum $Y = a + bX$, maka persamaan regresinya adalah : $Y = -37597,526 + 0,690 X$

Hasil pengolahan data yang telah dilakukan diatas akan menunjukkan nilai kepekaan variabel independen yaitu pajak daerah dalam mempengaruhi belanja daerah. Berdasarkan uji statistik t dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) diperoleh t hitung sebesar 3,569 dan sig sebesar 0,003. Dengan $df = 14$ maka akan diperoleh t tabel sebesar 1,761. Dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel maka ini menunjukkan bahwa pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah sangat signifikan atau menunjukkan nilai yang berbeda nyata dengan nol.

Jadi, secara statistik variabel independen pajak daerah mempengaruhi belanja daerah.

Pengaruh retribusi daerah dan belanja daerah

Analisis ini menunjukkan pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah.

Tabel 4.26. Ringkasan regresi retribusi terhadap belanja

	Model
R	,625 ^a
R Square	,391
Adjusted R Square	,347
Std. Error of The estimate	171578,328
Change Statistic R Square change	,391
F Change	8,971
df1	1
df2	14
Sig.F change	,010

Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS versi 15

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 4.26, diperoleh nilai $R = 0,625$. Nilai R merupakan hubungan antara retribusi daerah dan belanja daerah. Sedangkan R^2 adalah koefisien determinasi dengan nilai 0,391. Hal ini menunjukkan pengertian bahwa belanja daerah (Y) dipengaruhi sebesar 39,1% oleh retribusi daerah (X2), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 60,9%.

Selanjutnya akan dilihat hasil dari uji Anova untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja daerah.

Tabel 4.27 Hasil *Analysis of Variance* retribusi terhadap belanja

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2640871787 58,906	1	264087178758, 906	8,971	,010(a)
	Residual	4121477147 56,032	14	29439122482,5 74		
	Total	6762348935 14,938	15			

a Predictors: (Constant), Retribusi Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS versi 15

Pada tabel 4.27 ini ditampilkan hasil yang diperoleh adalah nilai $F = 8,971$ dengan tingkat probabilitas sig. 0,010. Oleh karena probabilitas (0,010) lebih kecil dari 0,05 maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi belanja daerah.

Tabel 4.28 Model *Coefficients*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	138763,602	63524,070		2,184	,046
	Retribusi Daerah	163,037	54,435	,625	2,995	,010

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS versi 15

Hasil dari uji koefisien ini dikemukakan nilai konstanta (a) = 138763,602 dan beta = 0,625 serta harga t hitung dan tingkat signifikansi = 0,010.

Dengan demikian diperoleh persamaan regresinya sebagaimana persamaan pada 3.8. sebagai berikut :

$BD = a + bX_i + e$ atau secara umum $Y = a + bX$, maka persamaan regresinya adalah : $Y = 138763,602 + 0,625 X$

Hasil pengolahan data yang telah dilakukan diatas akan menunjukkan nilai kepekaan variabel independen yaitu retribusi daerah dalam mempengaruhi belanja daerah. Berdasarkan uji statistik t dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$)

diperoleh t hitung sebesar 2,995 dan sig sebesar 0,010. Dengan $df = 14$ maka akan diperoleh t tabel sebesar 1,761. Dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel maka ini menunjukkan bahwa pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah sangat signifikan atau menunjukkan nilai yang berbeda nyata dengan nol. Jadi, secara statistik variabel independen retribusi daerah mempengaruhi belanja daerah.

Pengaruh penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya dan belanja daerah

Analisis ini menunjukkan pengaruh penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya terhadap belanja daerah.

Tabel 4.29. Ringkasan regresi lain-lain PAD yang sah terhadap belanja

	Model
R	,681 ^a
R Square	,464
Adjusted R Square	,425
Std. Error of The estimate	160948,71
Change Statistic R Square change	,464
F Change	12,105
df1	1
df2	14
Sig.F change	,004

Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS versi 15

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 4.29, diperoleh nilai $R = 0,681$. Nilai R merupakan hubungan antara penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah lainnya dan belanja daerah. Sedangkan R^2 adalah koefisien determinasi dengan nilai 0,464. Hal ini menunjukkan pengertian bahwa belanja daerah (Y) dipengaruhi sebesar 46,4% oleh penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya (X3), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 53,6%.

Selanjutnya akan dilihat hasil dari uji Anova untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja daerah.

Tabel 4.30. Hasil *Analysis of Variance*

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3135720694 57,383	1	3135720694,57, 383	12,105	,004(a)
	Residual	3626628240 57,554	14	25904487432,6 82		
	Total	6762348935 14,938	15			

a Predictors: (Constant), Lain-lain PAD yang sah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Pada tabel 4.30. ini ditampilkan hasil yang diperoleh adalah nilai $F = 12,105$ dengan tingkat probabilitas sig. 0,004. Oleh karena probabilitas (0,004) jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi belanja daerah.

Tabel 4.31. Model *Coefficients*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	-15400,241	93722,017		-,164	,872
	Lain-lain PAD yang sah	28,935	8,317	,681	3,479	,004

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS versi 15

Hasil dari uji koefisien ini dikemukakan nilai konstanta (a) = -15400,241 dan beta = 0,681 serta harga t hitung dan tingkat signifikansi = 0,004.

Dengan demikian diperoleh persamaan regresinya sebagaimana persamaan pada 3.1 sebagai berikut :

$BD = a + bX_i + e$ atau secara umum $Y = a + bX$, maka persamaan regresinya adalah : $Y = -15400,241 + 0,681 X$

Hasil pengolahan data yang telah dilakukan diatas akan menunjukkan nilai kepekaan variabel independen yaitu penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya dalam mempengaruhi belanja daerah. Berdasarkan uji statistik t dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) diperoleh t hitung sebesar 3,479 dan sig sebesar 0,004. Dengan $df = 14$ maka akan diperoleh t tabel sebesar 1,761. Dengan nilai terhitung yang lebih besar dari t tabel maka ini menunjukkan bahwa pengaruh penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya terhadap belanja daerah sangat signifikan atau menunjukkan nilai yang berbeda nyata dengan nol. Jadi, secara statistic variable independen penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya mempengaruhi belanja daerah.

Berikut hasil uji t pengaruh komponen PAD terhadap belanja daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 4.32. Hasil Uji *t*

Variabel		T hitung	T tabel	Keterangan
Dependen	Independen			
Y	X1	3,569	1,761	Signifikan pada $\alpha = 0,05$
Y	X2	2,995	1,761	Signifikan pada $\alpha = 0,05$
Y	X3	3,479	1,761	Signifikan pada $\alpha = 0,05$

Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS versi 15

Hipotesis

H_0 = tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel komponen pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah

H_a = terdapat pengaruh yang signifikan variable komponen pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah

Dengan $\alpha = 0,05$

Jika $\alpha > 0,05$ maka H_0 diterima. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan variable komponen PAD terhadap belanja daerah.

Jika $\alpha < 0,05$ maka H_0 ditolak. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan variable komponen PAD terhadap belanja daerah.

Berikut hasil uji F pengaruh komponen PAD terhadap belanja daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 4.33. Hasil Uji *F*

Variabel		F hitung	F tabel	Keterangan
Dependen	Independen			
Y	X1	12,736	4,60	Signifikan pada $\alpha = 0,05$
Y	X2	8,971	4,60	Signifikan pada $\alpha = 0,05$
Y	X3	12,105	4,60	Signifikan pada $\alpha = 0,05$

Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS versi 15

Analisa Hasil Regresi Sederhana (*Simple Regression*)

Sebagaimana persamaan regresi pada persamaan, maka dapat dilihat bagaimana pengaruh masing-masing komponen PAD terhadap belanja daerah.

Kelayakan suatu model regresi dapat dilihat juga pada nilai R square. Hasil dari tabel Model Summary pada perhitungan SPSS diperoleh nilai $R = 0,765$ dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,586. Hal ini menunjukkan pengertian bahwa belanja daerah dipengaruhi sebesar 58,60% oleh pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya sedangkan sisanya 41,40% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini. R^2 berkisar pada angka 0 sampai 1, dengan catatan semakin kecil angka R^2 , semakin lemah hubungan antar variabel. Lebih lanjut dilakukan uji *F* untuk melihat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya secara simultan terhadap belanja daerah. Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.8.

Pengaruh yang paling dominan antara pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah

Untuk pengujian koefisien determinasi (R^2) ini akan digunakan uji F yaitu pengujian hubungan regresi secara keseluruhan/secara simultan (Analysis of variance) dengan menggunakan uji F. Dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya secara simultan perubahan variable independen tidak berpengaruh terhadap perubahan variable dependen

$H_1 : \beta \neq 0$, artinya simultan perubahan variable independen sangat berpengaruh terhadap perubahan variable dependen

Dari hasil perhitungan (pengolahan dengan SPSS versi 15) diperoleh F-hitung sebesar 5,651 dengan sig.F = 0,012. Dengan $\alpha = 0,05$ maka diperoleh F-tabel sebesar 3,49. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F-hitung ($5,682 > F\text{-tabel } (3,49)$) maka keputusannya adalah tolak H_0 (H_1 diterima). Secara jelas juga dapat dilihat dari nilai P atau P-value yang diperoleh, dimana syarat signifikansi apabila $P < \alpha$, sedangkan P yang diperoleh adalah $0,012 < 0,05$ sehingga keputusannya sangat signifikan atau berpengaruh positif. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan hasil dari model regresi menunjukkan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Tabel. 4.34. Hasil Uji F secara Simultan

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3959539293 23,425	3	131984643107, 808	5,651	,012(a)
	Residual	2802809641 91,512	12	23356747015,9 59		
	Total	6762348935 14,937	15			

a Predictors: (Constant), Lain-lain PAD yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Selanjutnya untuk melihat variabel independen yang paling dominan mempengaruhi variable dependen dilakukan uji parsial dengan menggunakan uji t, seperti yang terlihat pada tabel 4.24 berikut :

Tabel 4.35. Uji t

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-42568,059	95595,397		-,445	,664
	Pajak Daerah	1,332	1,721	,285	,774	,454
	Retribusi Daerah	84,248	59,048	,323	1,427	,179
	Lain-lain PAD yang sah	12,515	14,082	,295	,889	,392

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS versi 15

One-Sample Test

	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Pajak Daerah	8,644	15	,000	91.415,43750	68.874,9312	113.955,9438
Retribusi Daerah	4,271	15	,001	860,75000	427,0836	1.294,4164
Lain-lain PAD yang sah	8,147	15	,000	10.177,81250	7.515,1889	12.840,4361
Belanja Daerah	5,258	15	,000	279098,06250	165957,5285	392238,5965

Sumber : Diolah dari perhitungan SPSS versi 15

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan pengaruh paling dominan dengan t hitung = 8,644 dengan sig.t = 0,000. Dengan $\alpha = 0,05$ dan $df = 15$, maka diperoleh t tabel = 1,753. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t hitung (8,644) > t tabel (1,753), ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Selanjutnya variable yang berpengaruh setelah pajak daerah adalah penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya dengan t hitung = 8,147 dan t tabel = 1,753. T hitung

$(8,147) > t$ tabel $(1,753)$ menunjukkan bahwa penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Selanjutnya retribusi daerah yang memiliki t hitung = 4,231 dan t tabel = 1,753. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t hitung $(4,231) > t$ tabel $(1,753)$ berarti retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$BD = 42.568,059 + 1,332 X_1 + 84,248 X_2 + 12.515 X_3$$

Dari hasil penelitian diperoleh persamaan regresi dan diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 42.568,059 artinya apabila pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya bernilai nol, maka belanja daerah sebesar 42.568,09.
2. Nilai koefisien regresi sebesar 1,332 menunjukkan bahwa penambahan pajak daerah sebesar 1 satuan akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,332 satuan.
3. Nilai koefisien regresi 84,248 menunjukkan bahwa penambahan retribusi daerah sebesar 1 satuan akan meningkatkan belanja daerah sebesar 84,248 satuan.
4. Nilai koefisien regresi 12, 515 menunjukkan bahwa penambahan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya sebesar 1 satuan akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1 satuan

Dengan melihat hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung sebaiknya melakukan langkah-langkah yang konkrit dan signifikan dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah sudah tentu pendapatan daerah akan meningkat dikarenakan pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang pada akhirnya juga akan diikuti dengan peningkatan belanja daerah yang akan berdampak pada kemakmuran rakyat.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data, maka penelitian ini memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi kinerja keuangan daerah berdasarkan analisis pendapatan dan belanja daerah pemerintah propinsi kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari potensi kemandirian daerah berada pada kriteria yang baik namun jika dibandingkan dengan provinsi Sumatera Utara yang berada pada kriteria yang sangat baik maka provinsi kepulauan Bangka Belitung masih harus mengoptimalkan potensi PAD nya. Ditinjau dari analisa laporan keuangan yakni dari hasil perolehan rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio upaya fiskal, rasio aktivitas, rasio efektivitas dan efisiensi PAD dapat dilihat bahwa kondisi keuangan daerah sudah menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang cukup baik.
2. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya berpengaruh positif terhadap belanja daerah di pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung. Dan secara parsial pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya juga berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa : pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah lainnya berpengaruh terhadap belanja daerah dapat diterima.

3. Variabel independen yang paling dominan berpengaruh terhadap belanja daerah propinsi kepulauan Bangka Belitung adalah pajak, kemudian diikuti oleh variable penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya serta retribusi sebagai variable yang memiliki nilai pengaruh paling kecil terhadap belanja daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas dan untuk penyempurnaan penelitian ini, disarankan :

1. Pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung dapat lebih mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah melalui peranan belanja salah satunya dengan mengalokasikan belanja pembangunan pada proyek-proyek yang bersifat *revenue generating* artinya proyek yang mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat lokal sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan jumlah populasi dan sampel lebih di perluas pada tingkat kabupaten atau provinsi lain sehingga hasilnya menjadi lebih baik serta dapat membandingkan potensi daerah kita dengan daerah lain, serta dapat juga menambahkan variabel lain yang di duga dapat mempengaruhi belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Agusyana, Yus. 2011. *Olah Data Skripsi dan Penelitian dengan SPSS 19*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Arsjad, Nurdjaman, Bambang Kusumanto, dan Yuwono Prawirosetoto. 1992. *Keuangan Negara*. Intermedia. Jakarta
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFE. Yogyakarta
- Barata, Atep Adya dan Bambang Trihartanto. 2004. *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Keuangan Negara*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan Anarullah.dkk. UI-Press. Jakarta
- Devas, et.al. 2000. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Terjemahan Marsi Maris. UI-Press. Jakarta.
- Elmi, Bacrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. UI-Press. Jakarta.
- Fauzi, Said.S. 2004. *Tesis : Pengaruh Pertumbuhan Sektoral terhadap Penerimaan Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat*. UNPAD. Bandung.
- Halim, Abdul. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Study Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Harahap, S. 2009. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Imam ghozali. 2001. *Aplikasi Pengaruh Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikhsan, M. 2007. *Administrasi Keuangan Publik*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press. Yogyakarta.

- Koswara, E. 2001. *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Yayasan Pariba. Jakarta.
- Kurniawan, Iwan S. 2003. *Tesis : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Komponen Pendapatan asli Daerah Propinsi DKI Jakarta*. UNPAD. 2003
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. BPFE. Yogyakarta
- Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih. 2000. *Perhitungan pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang. Laporan Akhir Kerjasama Pemda Kabupaten Magelang dengan PAU-SE UGM*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI Yogyakarta
- 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A. Peggy B. Musgrave. 1984. *Public Finance in Theory and Practice, Fourth Edition*, New York : McGraw-Hill Book Company.
- Musgrave, Richard A. Peggy B. Musgrave. 1993. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Erlangga. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Redjo, Samagio Ibnu. 1998. *Keuangan Pusat dan Daerah*. BKU Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi Pascasarjana Kerjasama Universitas Padjajaran. Bandung.

Simanjuntak, Oloan. 2003. *Hukum Pajak*. Nomensen-press. Medan.

Sumitro, Rohmat. 1987. *Azas dan Dasar Perpajakan*. Eresco. Bandung.

Sulistyo, Joko. 2010. *6 Hari Jago SPSS 17*. Cakrawala. Yogyakarta.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi, Konsep dan Strategi*. Cetakan Pertama. Penerbit Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia dan Lukman Offset.

-----*Manajemen Modern untuk Sektor Publik : Strategic Management, Total Quality Management, Balance Score Card and Scenario Planning*. Edisi Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama. Balairung & Co. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Yuwono, Sony. Dkk. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Bayumedia Publising. Surabaya.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

http : www.bps.babel.go.id

http : www.bps.sumut.go.id

UNIVERSITAS TERBUKA

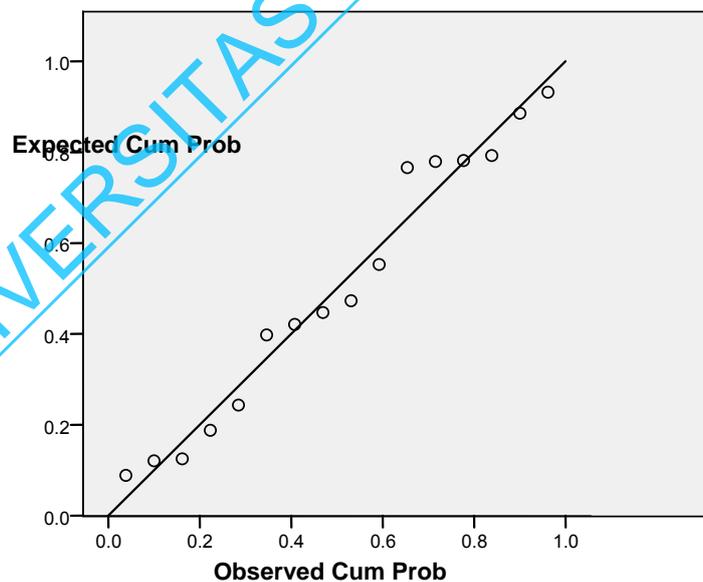
HASIL UJI NORMALITAS SKEWNESS ATAU KURTOSIS

Uji Normalitas skewness atau kurtosis

Uraian	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistik	Std.Error	Statistik	Std.Error
Belanja	16	0,714	0,564	-0,953	1,091
Pajak	16	-0,057	0,564	-1,177	1,091
Retribusi	16	1,217	0,564	0,022	1,091
Lain-lain PAD	16	-0,505	0,564	-1,313	1,091
Valid N	16				

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Belanja Daerah



Grafik Normalitas

HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS DENGAN UJI GLEJSER

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Mode 1	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Lain-lain PAD yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Model Summary(b)

Mode 1	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,765(a)	,586	,482	152829,14 322

a Predictors: (Constant), Lain-lain PAD yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

ANOVA(b)

Mode 1		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3959539 29323,42 6	3	131984643 107,808	5,651	,012(a)
	Residual	2802809 64191,51 2	12	233567470 15,959		
	Total	6762348 93514,93 8	15			

a Predictors: (Constant), Lain-lain PAD yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	-42568,059	95595,397		-,445	,664
	Pajak Daerah	1,332	1,721	,265	,774	,454
	Retribusi Daerah	84,248	59,048	,323	1,427	,179
	Lain-lain PAD yang sah	12,515	14,082	,295	,889	,392

a Dependent Variable: Belanja Daerah

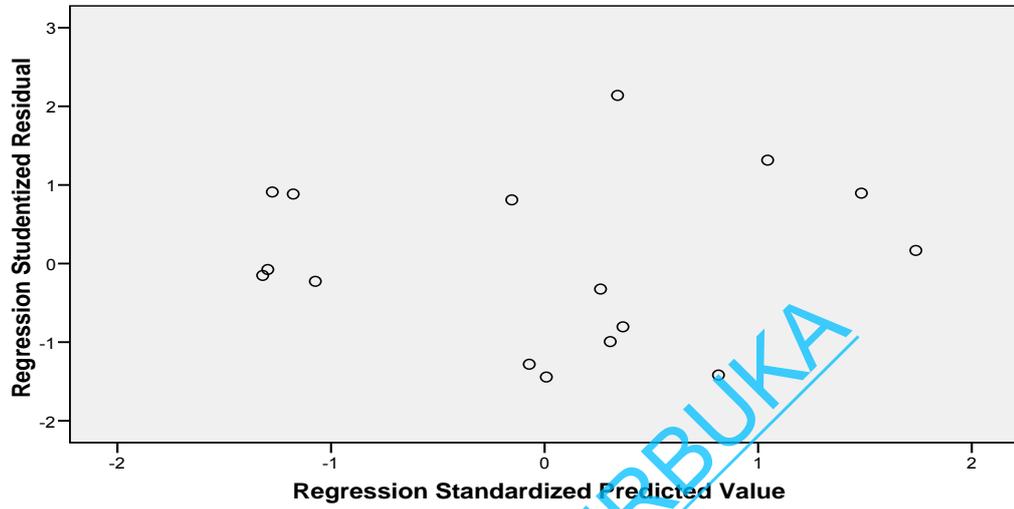
Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	64691,8242	561498,0000	279098,0625	162471,31630	16
Std. Predicted Value	-1,320	1,738	,000	1,000	16
Standard Error of Predicted Value	47440,031	109562,164	74863,622	15819,815	16
Adjusted Predicted Value	41403,1758	549599,6875	269123,3347	173091,89119	16
Residual	-206418,31250	227830,75000	,00000	136694,54127	16
Std. Residual	-1,351	1,491	,000	,894	16
Stud. Residual	-1,444	2,138	,025	1,063	16
Deleted Residual	-262350,00000	468725,65625	9974,72777	197947,54684	16
Stud. Deleted Residual	-1,521	2,602	,045	1,145	16
Mahal. Distance	,508	6,772	2,812	1,598	16
Cook's Distance	,000	1,209	,129	,294	16
Centered Leverage Value	,034	,451	,188	,107	16

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Scatterplot

Dependent Variable: Belanja Daerah



HASIL UJI AUTOKORELASI

Variables Entered/Removed(b)

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Lain-lain PAD yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Model Summary(b)

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,765(a)	,586	,482	152829,14322	3,363

a Predictors: (Constant), Lain-lain PAD yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

ANOVA(b)

Mode		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	395953929323,426	3	131984643107,808	5,651	,012(a)
	Residual	280280964191,512	12	23356747015,959		
	Total	676234893514,938	15			

a Predictors: (Constant), Lain-lain PAD yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	-42568,059	95595,397		-,445	,664
	Pajak Daerah	1,332	1,721	,265	,774	,454
	Retribusi Daerah	84,248	59,048	,323	1,427	,179
	Lain-lain PAD yang sah	12,515	14,082	,295	,889	,392

a Dependent Variable: Belanja Daerah

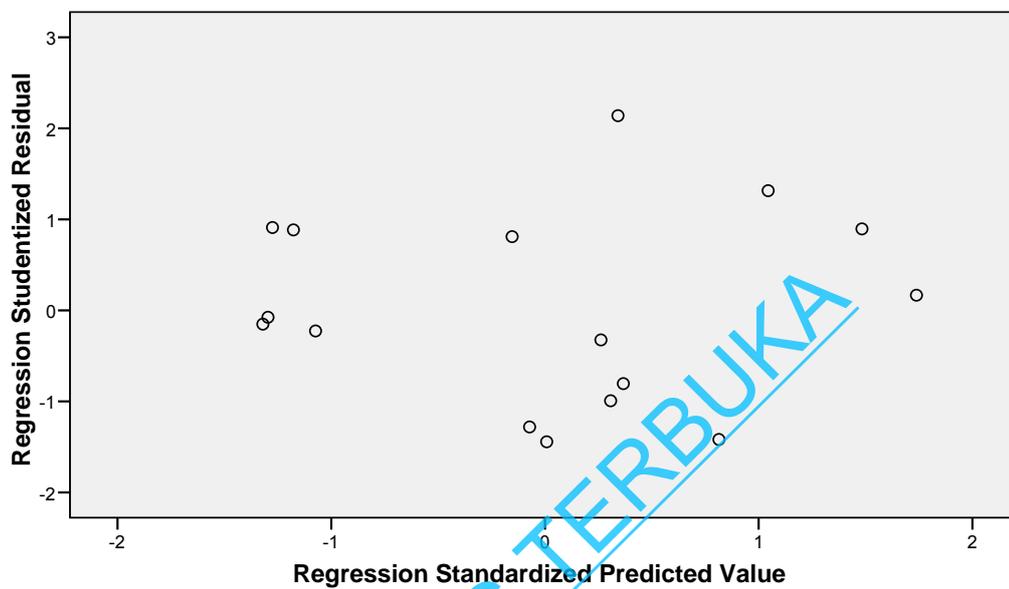
Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	64691,8242	561498,0000	279098,0625	162471,31630	16
Std. Predicted Value	-1,320	1,738	,000	1,000	16
Standard Error of Predicted Value	47440,031	109562,164	74863,622	15819,815	16
Adjusted Predicted Value	41403,1758	549599,6875	269123,3347	173091,89119	16
Residual	-206418,31250	227830,75000	,00000	136694,54127	16
Std. Residual	-1,351	1,491	,000	,894	16
Stud. Residual	-1,444	2,138	,025	1,063	16
Deleted Residual	-262350,00000	468725,65625	9974,72777	197947,54684	16
Stud. Deleted Residual	-1,521	2,602	,045	1,145	16
Mahal. Distance	,508	6,772	2,812	1,598	16
Cook's Distance	,000	1,209	,129	,294	16
Centered Leverage Value	,034	,451	,188	,107	16

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Scatterplot

Dependent Variable: Belanja Daerah



HASIL UJI AUTOKORELASI DENGAN VARIABEL LAG
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Belanja Daerah	294748,2667	210008,83652	15
Pajak Daerah	95.510,4667	40.369,49387	15
Retribusi Daerah	893,8667	831,17386	15
Lain-lain PAD yang sah	10.661,1333	4.769,40480	15
Lag_Y	255639,8000	197152,09401	15

Correlations

		Belanja Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Lain-lain PAD yang sah	La
Pearson Correlation	Belanja Daerah	1,000	,654	,612	,643	
	Pajak Daerah	,654	1,000	,549	,795	
	Retribusi Daerah	,612	,549	1,000	,501	
	Lain-lain PAD yang sah	,643	,795	,501	1,000	
	Lag_Y	-,236	,295	,251	,279	
Sig. (1-tailed)	Belanja Daerah	.	,004	,008	,005	
	Pajak Daerah	,004	.	,017	,000	
	Retribusi Daerah	,008	,017	.	,029	
	Lain-lain PAD yang sah	,005	,000	,029	.	
	Lag_Y	,198	,143	,184	,157	
N	Belanja Daerah	15	15	15	15	
	Pajak Daerah	15	15	15	15	
	Retribusi Daerah	15	15	15	15	
	Lain-lain PAD yang sah	15	15	15	15	
	Lag_Y	15	15	15	15	

Variables Entered/Removed(b)

Mode 1	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Lag_Y, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah, Pajak Daerah(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Model Summary(b)

Mode 1	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	R Square Change	F Change	df1
1	,891(a)	,795	,712	112604,94 651	,795	9,674	4	10

a Predictors: (Constant), Lag_Y, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah, Pajak Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

ANOVA(b)

Mode 1		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4906532 20022,85 0	4	122663305 005,713	9,674	,002(a)
	Residual	1267987 39782,08 3	10	126798739 78,208		
	Total	6174519 59804,93 4	14			

a Predictors: (Constant), Lag_Y, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah, Pajak Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Coll. Sta.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	29970,362	81747,736		,367	,722	
	Pajak Daerah	1,705	1,288	,328	1,324	,215	,33
	Retribusi Daerah	100,670	43,910	,398	2,293	,045	,68
	Lain-lain PAD yang sah	14,535	10,498	,330	1,385	,196	,36
	Lag_Y	-,559	,161	-,525	-3,473	,006	,89

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Coefficient Correlations(a)

Model		Lag_Y	Retribusi Daerah	Lain-lain PAD yang sah	Pajak Daerah
1	Correlations	1,000	-,102	-,064	-,092
	Lag_Y	1,000	-,102	-,119	-,276
	Retribusi Daerah	-,102	1,000	-,119	-,708
	Lain-lain PAD yang sah	-,064	-,119	1,000	-,708
	Pajak Daerah	-,092	-,276	-,708	1,000
1	Covariances				
	Lag_Y	,026	-,725	-,108	-,019
	Retribusi Daerah	-,725	1928,073	-54,778	-15,617
	Lain-lain PAD yang sah	-,108	-54,778	110,216	-9,572
	Pajak Daerah	-,019	-15,617	-9,572	1,659

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Collinearity Diagnostics(a)

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Lain-lain PAD yang sah
1	1	4,333	1,000	,01	,00	,01	,00
	2	,313	3,718	,02	,00	,57	,00
	3	,241	4,238	,10	,02	,23	,02
	4	,082	7,254	,86	,07	,17	,18
	5	,030	11,972	,02	,91	,02	,79

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Casewise Diagnostics(b)

Case Number	Status	Std. Residual	Belanja Daerah	Predicted Value	Residual
1	M(a)	.	44345,0 0	.	.
2		,462	196587, 0	144572,4 926	52014,5 0737
3		-,227	74188,0 0	99755,93 76	- 25567,9 3763
4		,506	206771, 0	149814,7 905	56956,2 0950
5		,080	58196,0 0	49155,76 35	9040,23 649
6		-1,435	282048, 0	443679,7 408	- 161631, 74077
7		-1,375	91546,0 0	246382,8 903	- 154836, 89028
8		,289	371836, 0	339264,8 593	32571,1 4068
9		-1,227	74011,0 0	212151,4 269	- 138140, 42686
10		1,065	562414, 0	442463,7 117	119950, 28831
11		,236	193608, 0	167085,4 134	26522,5 8657
12		-,629	581741, 0	652607,8 733	- 70866,8 7327
13		-,184	232179, 0	252877,2 712	- 20698,2 7120
14		1,223	632771, 0	495000,8 275	137770, 17253
15		,804	232356, 0	141817,7 291	90538,2 7090
16		,412	630972, 0	584593,2 723	46378,7 2767

a Missing Case

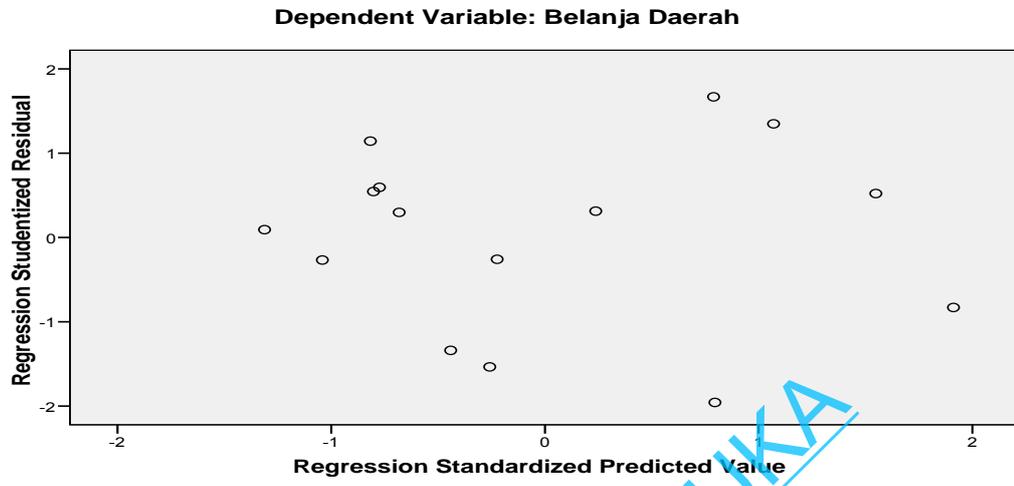
b Dependent Variable: Belanja Daerah

Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	49155,7 617	652607, 8750	294748, 2667	187207,528 09	15
Std. Predicted Value	-1,312	1,912	,000	1,000	15
Standard Error of Predicted Value	42814,4 61	86656,3 20	63616,5 96	13870,062	15
Adjusted Predicted Value	46103,1 875	705158, 1875	287801, 4941	204969,643 59	15
Residual	- 161631, 73438	137770, 17188	,00000	95168,5496 5	15
Std. Residual	-1,435	1,223	,000	,845	15
Stud. Residual	-1,957	1,668	,022	1,063	15
Deleted Residual	- 300572, 68750	294156, 87500	6946,77 256	155930,513 97	15
Stud. Deleted Residual	-2,364	1,863	-,003	1,164	15
Mahal. Distance	1,091	7,358	3,733	1,963	15
Cook's Distance	,001	,808	,148	,249	15
Centered Leverage Value	,078	,526	,267	,140	15

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Scatterplot



HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Variables Entered/Removed(b)

Mode 1	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Lain-lain PAD yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Model Summary(a)

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Coefficients(a)

Mode 1		Collinearity Statistics	
		Toleranc e	VIF
1	Pajak Daerah	,294	3,403
	Retribusi Daerah	,674	1,483
	Lain-lain PAD yang sah	,314	3,180

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Collinearity Diagnostics(a)

Mode 1	Dimensio n	Eigenvalu e	Condition Index	Variance Proportions					
				(Constant)	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Lain-lain PAD yang sah	(Constant)	Pajak Daerah
1	1	3,589	1,000						
	2	,282	3,566			,01	,00	,02	,00
	3	,099	6,022			,13	,00	,78	,01
	4	,030	10,914			,83	,07	,18	,16
						,02	,92	,02	,83

a Dependent Variable: Belanja Daerah

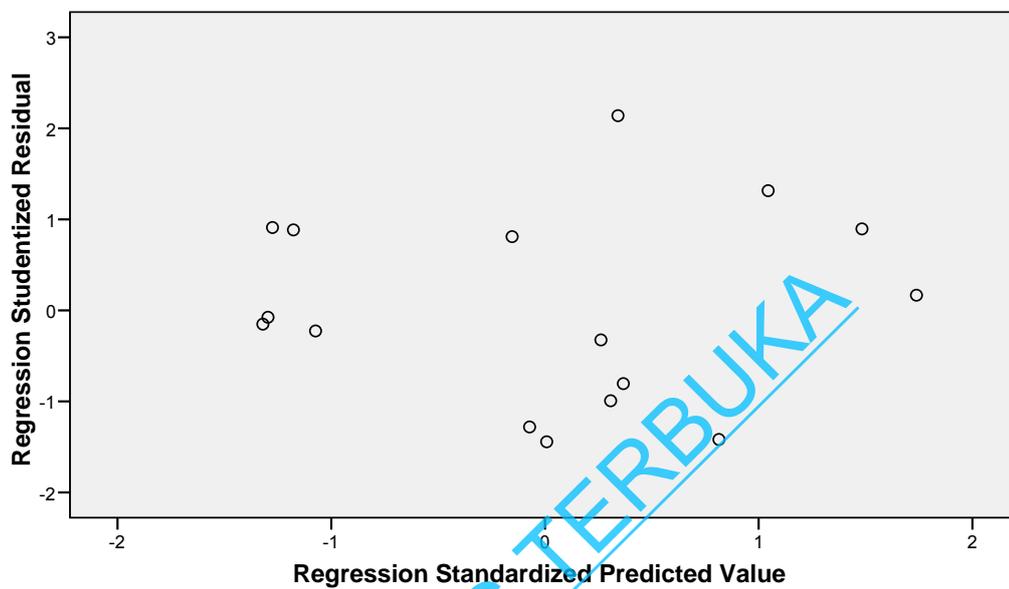
Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	64691,8 242	561498, 0000	279098, 0625	162471,316 30	16
Std. Predicted Value	-1,320	1,738	,000	1,000	16
Standard Error of Predicted Value	47440,0 31	109562, 164	74863,6 22	15819,815	16
Adjusted Predicted Value	41403,1 758	549599, 6875	269123, 3347	173091,891 19	16
Residual	- 206418, 31250	227830, 75000	,00000	136694,541 27	16
Std. Residual	-1,351	1,491	,000	,894	16
Stud. Residual	-1,444	2,138	,025	1,063	16
Deleted Residual	- 262350, 00000	468725, 65625	9974,72 777	197947,546 84	16
Stud. Deleted Residual	-1,521	2,602	,045	1,145	16
Mahal. Distance	,508	6,772	2,812	1,598	16
Cook's Distance	,000	1,209	,129	,294	16
Centered Leverage Value	,034	,451	,188	,107	16

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Scatterplot

Dependent Variable: Belanja Daerah



HASIL UJI REGRESI SEDERHANA

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Belanja Daerah	279098,0625	212325,99048	16
Pajak Daerah	91.415,4375	42.300,80206	16

Correlations

		Belanja Daerah	Pajak Daerah
Pearson Correlation	Belanja Daerah	1,000	,690
	Pajak Daerah	,690	1,000
Sig. (1-tailed)	Belanja Daerah		,002
	Pajak Daerah	,002	.
N	Belanja Daerah	16	16
	Pajak Daerah	16	16

Variables Entered/Removed(b)

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pajak Daerah(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Model Summary(b)

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	R Square Change	F Change	df1
1	,690(a)	,476	,439	159038,00920	,476	12,736	1	14

a Predictors: (Constant), Pajak Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	322131656323,553	1	322131656323,553	12,736	,003(a)
	Residual	354103237191,384	14	25293088370,813		
	Total	676234893514,937	15			

a Predictors: (Constant), Pajak Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37597,525	97241,210		-,387	,705
	Pajak Daerah	3,464	,971	,690	3,569	,003

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	66298,500	519321,9063	279098,0625	146545,02296	16
Std. Predicted Value	-1,452	1,639	,000	1,000	16
Standard Error of Predicted Value	39762,602	78178,555	54810,168	12960,723	16
Adjusted Predicted Value	57768,8398	483745,7813	278115,4354	146821,76932	16
Residual	-199321,15625	281543,68750	,00000	153645,31389	16
Std. Residual	-1,253	1,770	,000	,966	16
Stud. Residual	-1,347	1,828	,003	1,021	16

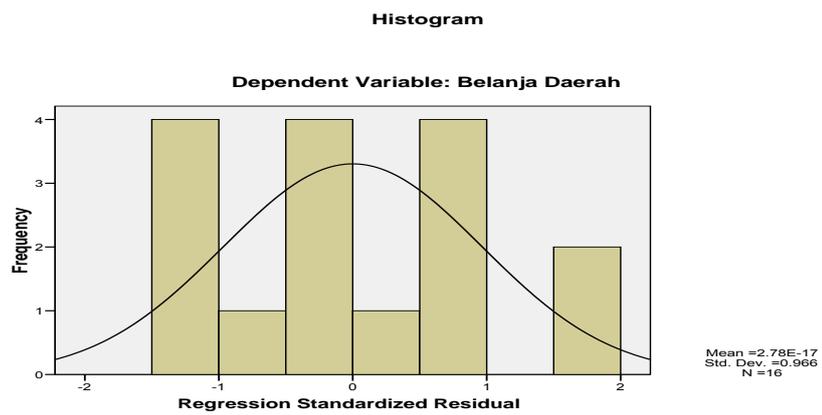
Deleted Residual	- 230367, 78125	300316, 40625	982,627 13	171899,617 86	16
Stud. Deleted Residual	-1,392	2,019	,016	1,063	16
Mahal. Distance	,000	2,687	,938	,870	16
Cook's Distance	,002	,145	,059	,052	16
Centered Leverage Value	,000	,179	,063	,058	16

a Dependent Variable: Belanja Daerah

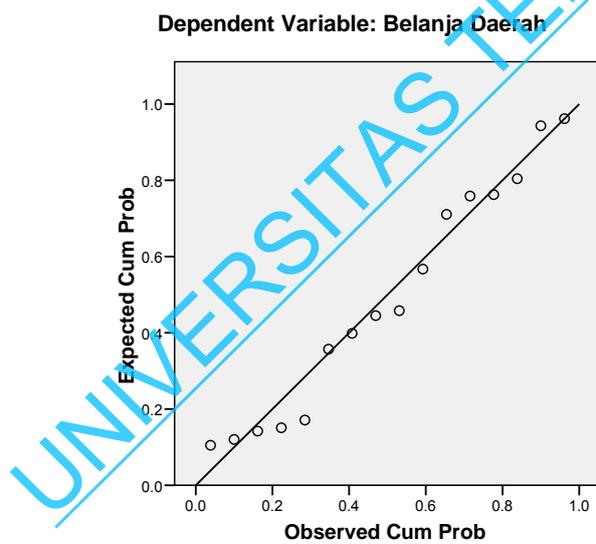
Residuals Statistics(a)

	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	66298,5 000	519321, 9063	279098, 0625	146545,022 96	16
Std. Predicted Value	-1,452	1,639	,000	1,000	16
Standard Error of Predicted Value	39762,6 02	78178,5 55	54810,1 68	12960,723	16
Adjusted Predicted Value	57768,8 398	483745, 7813	278115, 4354	146821,769 32	16
Residual	- 199321, 15625	281543, 68750	,00000	153645,313 89	16
Std. Residual	-1,253	1,770	,000	,966	16
Stud. Residual	-1,347	1,828	,003	1,021	16
Deleted Residual	- 230367, 78125	300316, 40625	982,627 13	171899,617 86	16
Stud. Deleted Residual	-1,392	2,019	,016	1,063	16
Mahal. Distance	,000	2,687	,938	,870	16
Cook's Distance	,002	,145	,059	,052	16
Centered Leverage Value	,000	,179	,063	,058	16

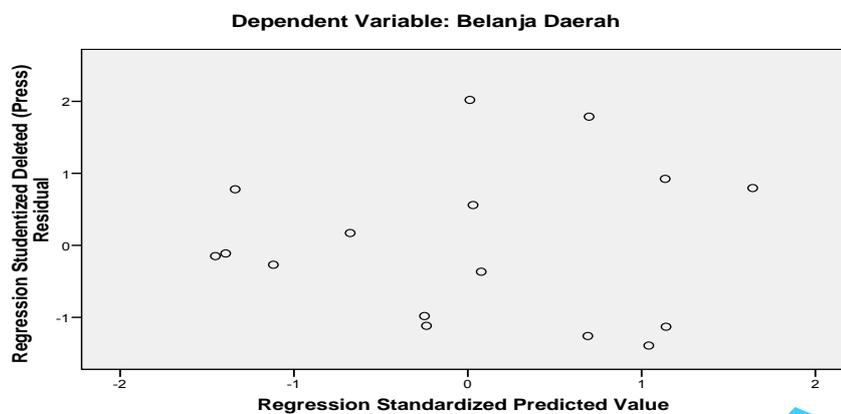
a Dependent Variable: Belanja Daerah



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Belanja Daerah	279098,0625	212325,99048	16
Retribusi Daerah	860,7500	813,84319	16

Correlations

		Belanja Daerah	Retribusi Daerah
Pearson Correlation	Belanja Daerah	1,000	,625
	Retribusi Daerah	,625	1,000
Sig. (1-tailed)	Belanja Daerah	.	,005
	Retribusi Daerah	,005	.
N	Belanja Daerah	16	16
	Retribusi Daerah	16	16

Variables Entered/Removed(b)

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1			

1	Retribusi Daerah(a)	.	Enter
---	---------------------	---	-------

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Variables Entered/Removed(b)

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Retribusi Daerah(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Model Summary(b)

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	R Square Change	F Change	df1
1	,625(a)	,391	,347	171578,32754	,391	8,971	1	14

a Predictors: (Constant), Retribusi Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

ANOVA(b)

Mode		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	264087178,906	1	264087178,906	8,971	,010(a)
	Residual	412147714756,032	14	29439122482,574		
	Total	676234893514,938	15			

a Predictors: (Constant), Retribusi Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Coefficients(a)

Mode	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
1				

	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1 (Constant)	138763,602	63524,070		2,184	,046
Retribusi Daerah	163,037	54,435	,625	2,995	,010

a Dependent Variable: Belanja Daerah

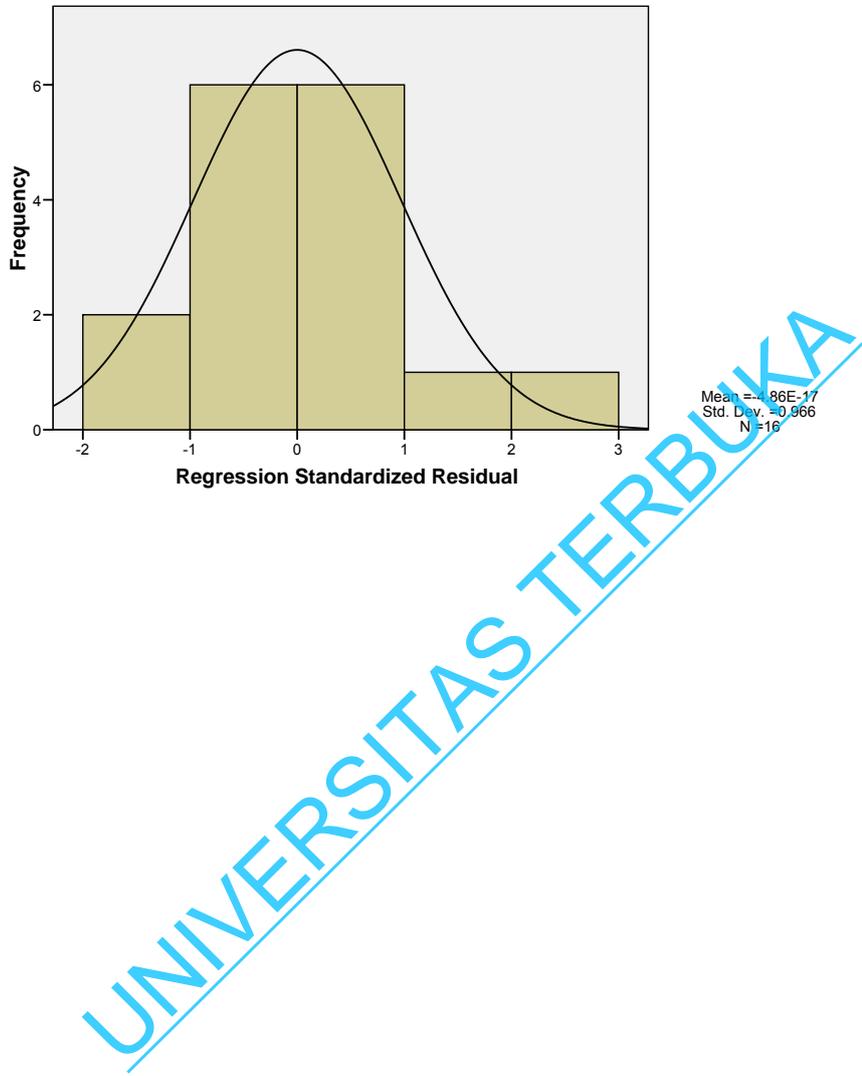
Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	132894,2500	563150,0000	279098,0625	132686,89429	16
Std. Predicted Value	-1,102	2,141	,000	1,000	16
Standard Error of Predicted Value	43072,027	104088,250	58317,258	17250,709	16
Adjusted Predicted Value	120522,6875	585687,1875	279141,0550	137682,98891	16
Residual	-266734,25000	346044,59375	,00000	165760,41239	16
Std. Residual	-1,555	2,017	,000	,966	16
Stud. Residual	-1,790	2,100	,000	1,035	16
Deleted Residual	-353508,15625	375075,40625	42,99245	190770,91102	16
Stud. Deleted Residual	-1,964	2,445	,011	1,105	16
Mahal. Distance	,008	4,583	,938	1,249	16
Cook's Distance	,000	,521	,078	,131	16
Centered Leverage Value	,001	,306	,063	,083	16

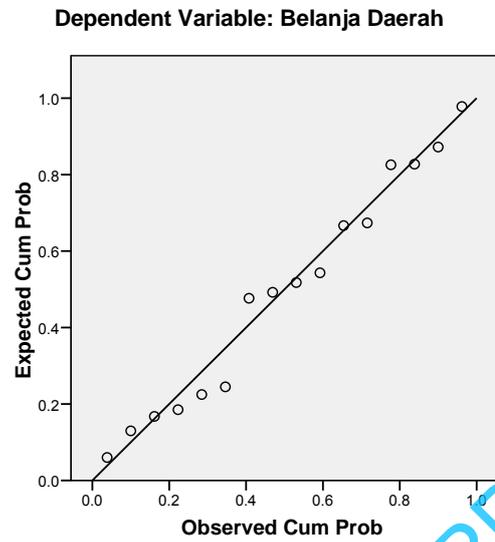
a Dependent Variable: Belanja Daerah

Histogram

Dependent Variable: Belanja Daerah



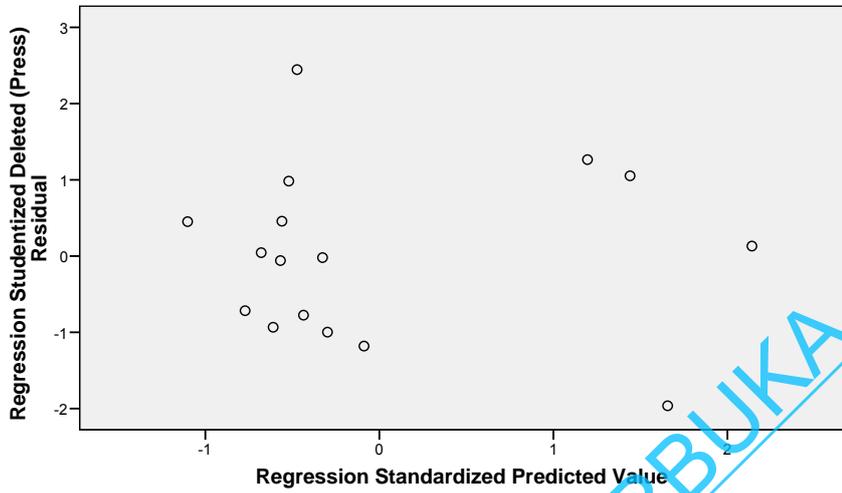
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



UNIVERSITAS TERBUKA

Scatterplot

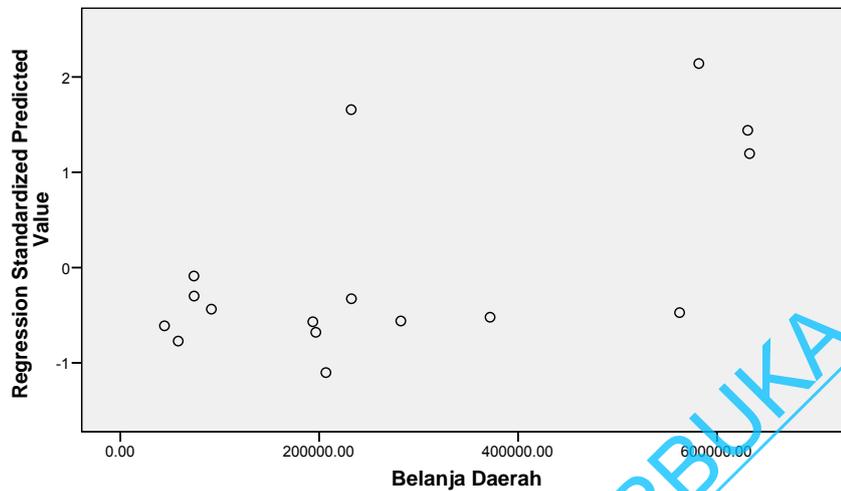
Dependent Variable: Belanja Daerah



UNIVERSITAS TERBUKA

Scatterplot

Dependent Variable: Belanja Daerah



Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Belanja Daerah	279098,0625	212325,99048	16
Lain-lain PAD yang sah	10.177,8125	4.996,83151	16

Correlations

		Belanja Daerah	Lain-lain PAD yang sah
Pearson Correlation	Belanja Daerah	1,000	,681
	Lain-lain PAD yang sah	,681	1,000
Sig. (1-tailed)	Belanja Daerah	.	,002
	Lain-lain PAD yang sah	,002	.
N	Belanja Daerah	16	16
	Lain-lain PAD yang sah	16	16

sah		
-----	--	--

Correlations

		Belanja Daerah	Lain-lain PAD yang sah
Pearson Correlation	Belanja Daerah	1,000	,681
	Lain-lain PAD yang sah	,681	1,000
Sig. (1-tailed)	Belanja Daerah	.	,002
	Lain-lain PAD yang sah	,002	.
N	Belanja Daerah	16	16
	Lain-lain PAD yang sah	16	16

Variables Entered/Removed(b)

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Lain-lain PAD yang sah(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Model Summary(b)

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	R Square Change	F Change	df1
1	,681(a)	,464	,425	160948,71057	,464	12,105	1	14

a Predictors: (Constant), Lain-lain PAD yang sah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

ANOVA(b)

Mode		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	313572069,383	1	313572069,383	12,105	,004(a)

Residual	3626628 24057,55 4	14	259044874 32,682	
Total	6762348 93514,93 8	15		

a Predictors: (Constant), Lain-lain PAD yang sah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	- 15400,2 41	93722,0 17		-,164	,872
	Lain-lain PAD yang sah	28,935	8,317	,681	3,479	,004

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Residuals Statistics(a)

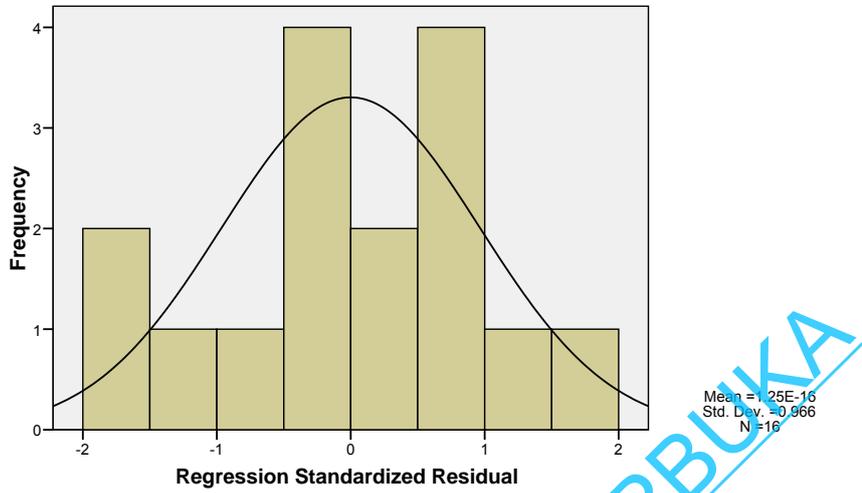
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	68946,2 266	480753, 7500	279098, 0625	144584,939 16	16
Std. Predicted Value	-1,453	1,395	,000	1,000	16
Standard Error of Predicted Value	40685,4 34	72577,1 56	55611,2 71	12455,681	16
Adjusted Predicted Value	56078,7 344	461326, 4375	275546, 0618	144934,684 83	16
Residual	- 262065, 95313	241890, 35938	,00000	155491,226 77	16
Std. Residual	-1,628	1,503	,000	,966	16
Stud. Residual	-1,698	1,586	,010	1,019	16
Deleted Residual	- 284918, 31250	269470, 18750	3552,00 072	173181,770 89	16
Stud. Deleted Residual	-1,836	1,688	,004	1,067	16
Mahal. Distance	,021	2,113	,938	,816	16
Cook's Distance	,000	,143	,056	,053	16
Centered Leverage Value	,001	,141	,063	,054	16

a Dependent Variable: Belanja Daerah

UNIVERSITAS TERBUKA

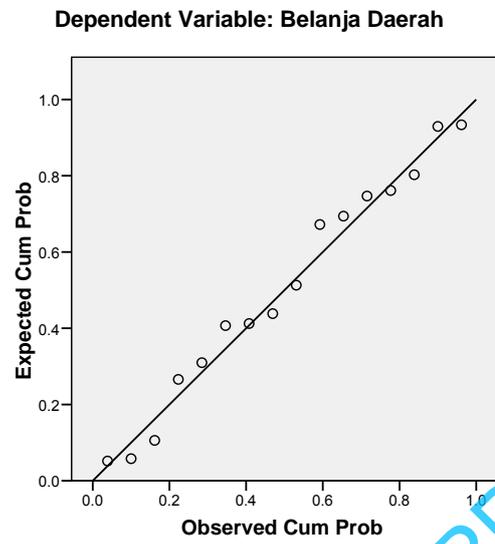
Histogram

Dependent Variable: Belanja Daerah



UNIVERSITAS TERBUKA

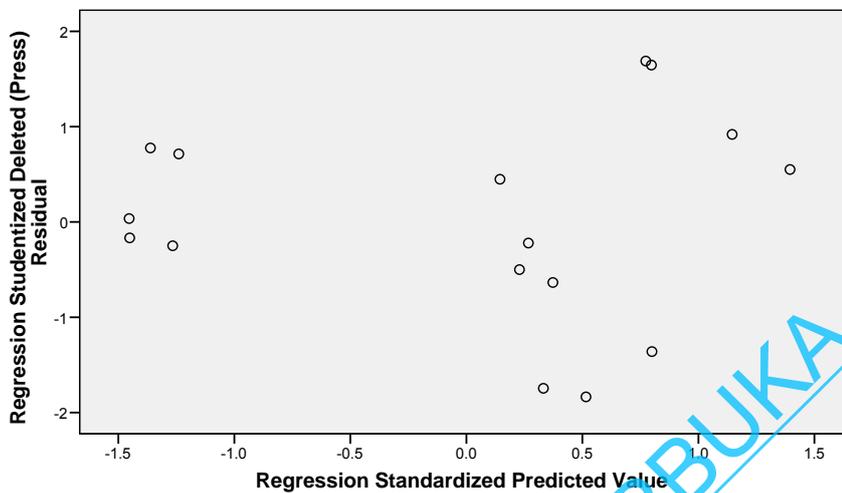
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



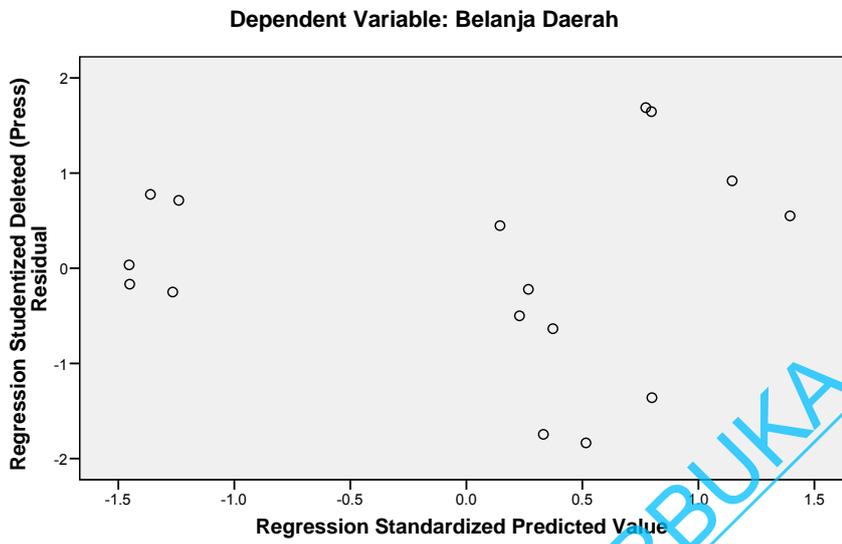
UNIVERSITAS TERBUKA

Scatterplot

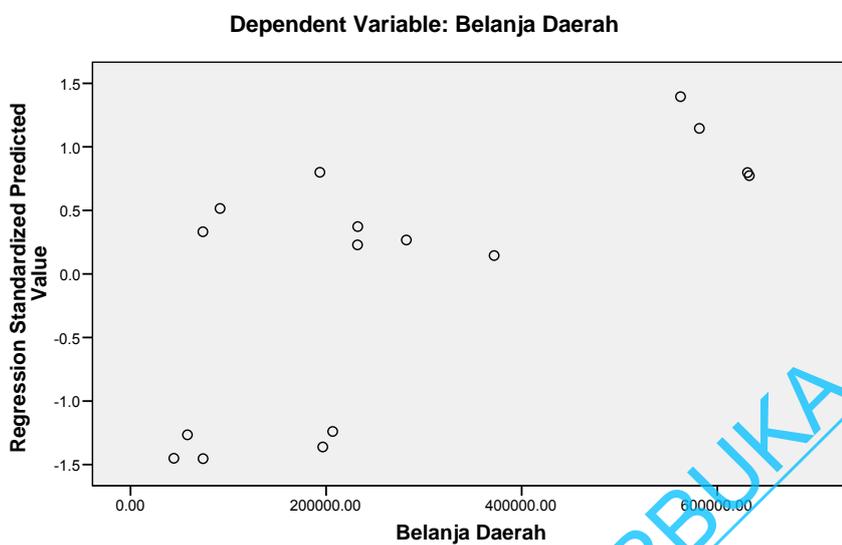
Dependent Variable: Belanja Daerah



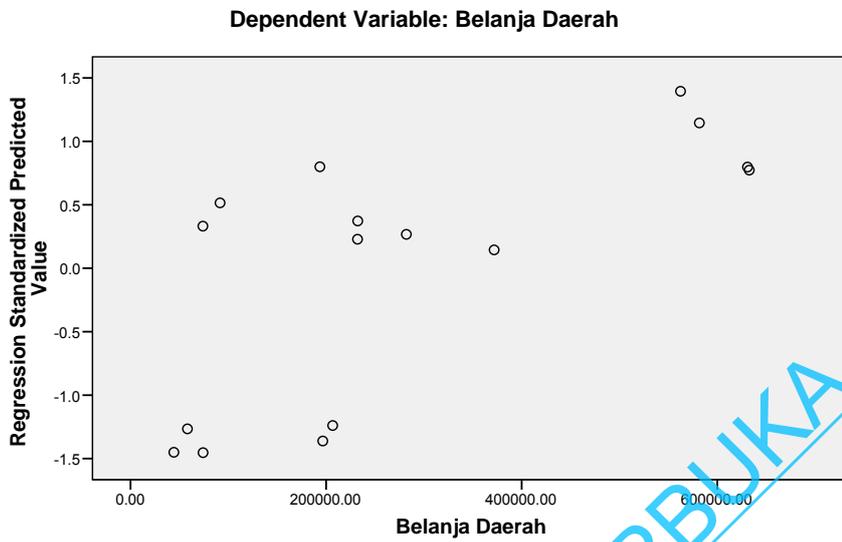
Scatterplot



Scatterplot



Scatterplot



UNIVERSITAS TERBUKA

HASIL REGRESI LINEAR GANDA**Variables Entered/Removed(b)**

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Lain-lain PAD yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Model Summary(b)

Mode	Durbin-Watson
1	3,363(a)

a Predictors: (Constant), Lain-lain PAD yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Coefficients(a)

Mode		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	-42568,059	95595,397		-,445	,664
	Pajak Daerah	1,332	1,721	,265	,774	,454
	Retribusi Daerah	84,248	59,048	,323	1,427	,179
	Lain-lain PAD yang sah	12,515	14,082	,295	,889	,392

a Dependent Variable: Belanja Daerah

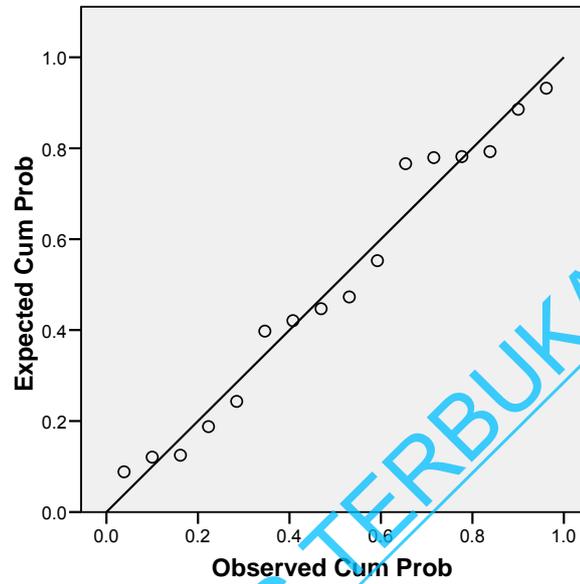
Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	64691,8 242	561498, 0000	279098, 0625	162471,316 30	16
Std. Predicted Value	-1,320	1,738	,000	1,000	16
Standard Error of Predicted Value	47440,0 31	109562, 164	74863,6 22	15819,815	16
Adjusted Predicted Value	41403,1 758	549599, 6875	269123, 3347	173091,891 19	16
Residual	- 206418, 31250	227830, 75000	,00000	136694,541 27	16
Std. Residual	-1,351	1,491	,000	,894	16
Stud. Residual	-1,444	2,138	,025	1,063	16
Deleted Residual	- 262350, 00000	468725, 65625	9974,72 777	197947,546 84	16
Stud. Deleted Residual	-1,521	2,602	,045	1,145	16
Mahal. Distance	,508	6,772	2,812	1,598	16
Cook's Distance	,000	1,209	,129	,294	16
Centered Leverage Value	,034	,451	,188	,107	16

a Dependent Variable: Belanja Daerah

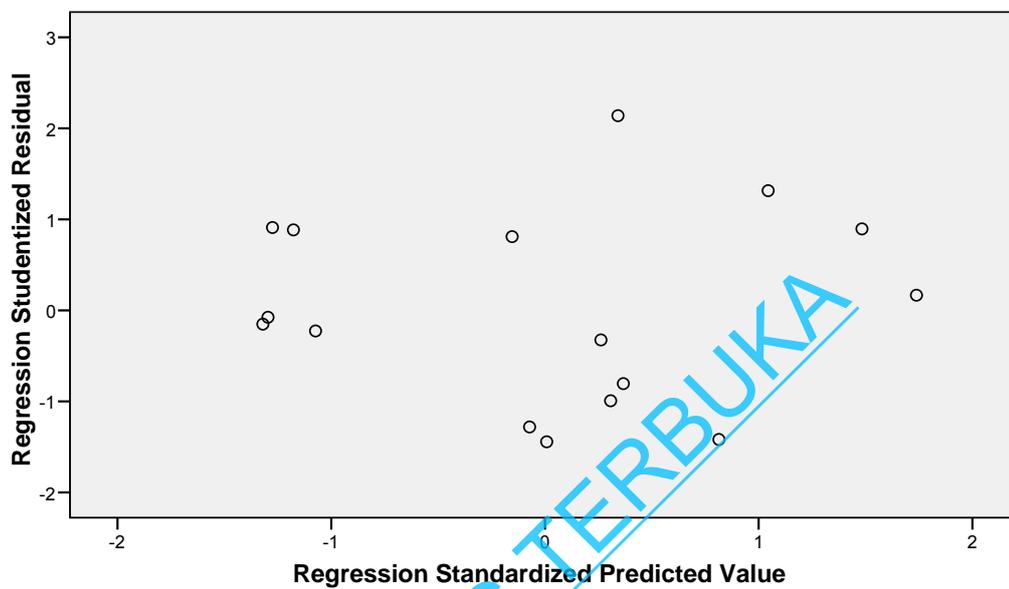
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Belanja Daerah



Scatterplot

Dependent Variable: Belanja Daerah



HASIL REGRESI BERGANDA

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Belanja Daerah	279098,0625	212325,99048	16
Pajak Daerah	91.415,4375	42.300,80206	16
Retribusi Daerah	860,7500	813,84319	16
Lain-lain PAD yang sah	10.177,8125	4.996,83151	16

Correlations

		Belanja Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Lain-lain PAD yang sah
Pearson Correlation	Belanja Daerah	1,000	,690	,625	,681
	Pajak Daerah	,690	1,000	,563	,825
	Retribusi Daerah	,625	,563	1,000	,518
	Lain-lain PAD yang sah	,681	,825	,518	1,000
Sig. (1-tailed)	Belanja Daerah	.	,002	,005	,002
	Pajak Daerah	,002	.	,012	,000
	Retribusi Daerah	,005	,012	.	,020
	Lain-lain PAD yang sah	,002	,000	,020	.
N	Belanja Daerah	16	16	16	16
	Pajak Daerah	16	16	16	16
	Retribusi Daerah	16	16	16	16
	Lain-lain PAD yang sah	16	16	16	16

Variables Entered/Removed(b)

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1			

1	Lain-lain PAD yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah(a)	.	Enter
---	---	---	-------

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
					R Square Change	F Change	R Square Change	F Change
1	,765(a)	,586	,482	152829,14322	,586	5,651	3	12

a Predictors: (Constant), Lain-lain PAD yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3959539,29323,425	3	131984643107,808	5,651	,012(a)
	Residual	280280964191,512	12	23356747015,959		
	Total	676234893514,937	15			

a Predictors: (Constant), Lain-lain PAD yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b Dependent Variable: Belanja Daerah

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Coll. Sta.
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	B
1	(Constant)	-	95595,3		-,445	,664	

	42568,059	97				
Pajak Daerah	1,332	1,721	,265	,774	,454	,29
Retribusi Daerah	84,248	59,048	,323	1,427	,179	,67
Lain-lain PAD yang sah	12,515	14,082	,295	,889	,392	,31

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Coefficient Correlations(a)

Model			Lain-lain PAD yang sah	Retribusi Daerah	Pajak Daerah
1	Correlations	Lain-lain PAD yang sah	1,000	-,116	-,755
		Retribusi Daerah	-,116	1,000	-,279
		Pajak Daerah	-,755	-,279	1,000
1	Covariances	Lain-lain PAD yang sah	198,298	-96,062	-18,294
		Retribusi Daerah	-96,062	3486,689	-28,380
		Pajak Daerah	-18,294	-28,380	2,961

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Coefficient Correlations(a)

Model			Lain-lain PAD yang sah	Retribusi Daerah	Pajak Daerah
1	Correlations	Lain-lain PAD yang sah	1,000	-,116	-,755
		Retribusi Daerah	-,116	1,000	-,279
		Pajak Daerah	-,755	-,279	1,000
1	Covariances	Lain-lain PAD yang sah	198,298	-96,062	-18,294
		Retribusi Daerah	-96,062	3486,689	-28,380
		Pajak Daerah	-18,294	-28,380	2,961

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Collinearity Diagnostics(a)

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Lain-lain PAD yang sah
1	1	3,589	1,000	,01	,00	,02	,00
	2	,282	3,566	,13	,00	,78	,01

3	,099	6,022	,83	,07	,18	,16
4	,030	10,914	,02	,92	,02	,83

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Casewise Diagnostics(a)

Case Number	Std. Residual	Belanja Daerah	Predicted Value	Residual
1	-,133	44345,00	64691,8223	20346,8229
2	,815	196587,0	71983,0257	124603,97428
3	-,200	74188,00	104718,9736	30530,97357
4	,778	206771,0	87903,1692	118867,83080
5	-,068	58196,00	68571,1774	10375,17740
6	-,259	282048,0	321689,9000	39641,89998
7	-1,151	91546,00	267403,3254	175857,32537
8	,770	371836,0	254165,6229	117670,37706
9	-1,351	74011,00	280429,3169	206418,31693
10	1,491	562414,0	334583,2473	227830,75266
11	-,886	193608,0	329042,5275	135434,52750
12	,132	581741,0	561498,0308	20242,96917
13	-1,172	232179,0	411348,8408	179169,84083
14	1,204	632771,0	448765,6546	184005,34537
15	-,696	232356,0	338684,0831	106328,08307
16	,726	630972,0	520090,2	110881,0

		0	824	71761
--	--	---	-----	-------

a Dependent Variable: Belanja Daerah

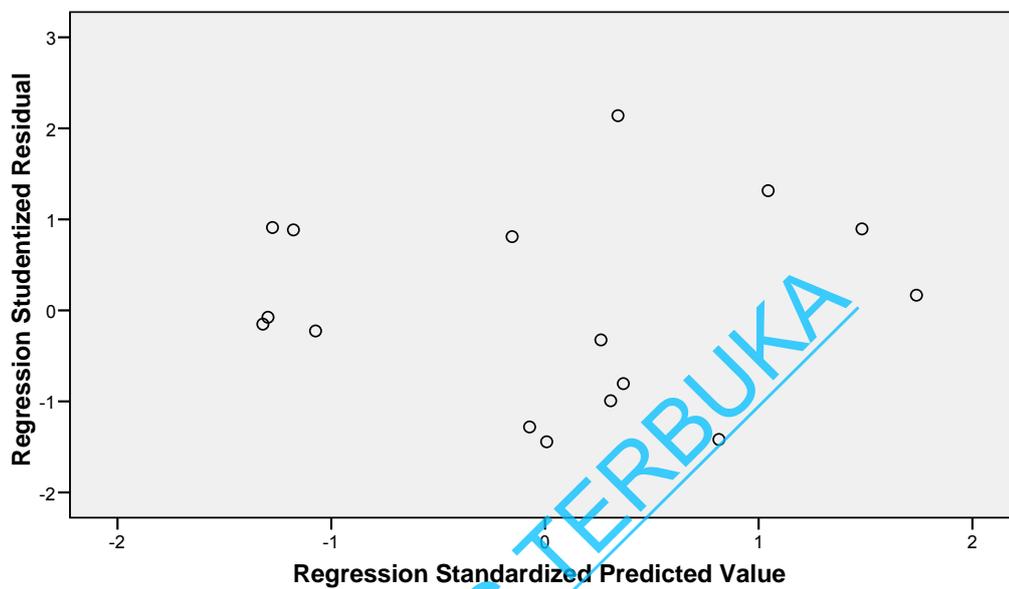
Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	64691,8242	561498,0000	279098,0625	162471,31630	16
Std. Predicted Value	-1,320	1,738	,000	1,000	16
Standard Error of Predicted Value	47440,031	109562,164	74863,622	15819,815	16
Adjusted Predicted Value	41403,1758	549599,6875	269123,3347	173091,89119	16
Residual	-206418,31250	227830,75000	,00000	136694,54127	16
Std. Residual	-1,351	1,491	,000	,894	16
Stud. Residual	-1,444	2,138	,025	1,063	16
Deleted Residual	-262350,00000	468725,65625	9974,72777	197947,54684	16
Stud. Deleted Residual	-1,521	2,602	,045	1,145	16
Mahal. Distance	,508	6,772	2,813	1,598	16
Cook's Distance	,000	1,209	,129	,294	16
Centered Leverage Value	,034	,451	,188	,107	16

a Dependent Variable: Belanja Daerah

Scatterplot

Dependent Variable: Belanja Daerah



RINGKASAN PERHITUNGAN REALISASI ANGGARAN APBD PROV. KEP. BABEL TA. 2003 - 2010 (dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH															
		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010	
		Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
PENDAPATAN																	
Pendapatan asli daerah		33.283.709.149	38.497.409.103	47.629.321.576	66.832.308.663	36.581.711.973	151.585.642.692	94.138.534.917	104.034.776.923	93.991.211.979	109.550.690.494	135.202.364.757	158.982.203.452	108.577.379.085	138.222.465.872	148.697.126.191	179.424.898.854
Pajak daerah		29.990.195.922	34.815.021.134	44.096.122.221	62.791.273.608	32.496.574.922	139.667.720.252	80.879.486.789	92.695.417.328	81.364.700.000	91.927.431.932	120.630.930.000	139.454.933.038	94.686.878.025	120.937.106.805	135.458.231.933	160.756.556.814
Retribusi Daerah		364.152.830	308.342.925	617.746.555	36.377.130	232.631.300	405.417.222	505.633.823	437.261.541	789.302.475	476.490.407	397.930.000	2.603.017.464	2.209.228.813	1.833.818.866	595.009.950	2.033.014.111
Bagian laba usaha daerah		-	-	-	93.407.208	-	-	-	-	-	-	-	1.023.524.053	360.687.778	1.410.859.681	603.696.949	2.473.630.860
Lain-lain PAD		2.928.360.397	3.374.045.045	2.915.452.799	3.984.004.978	3.852.505.751	11.512.505.218	12.753.414.305	10.902.098.054	11.837.209.504	17.146.768.155	14.173.504.757	15.900.728.896	11.320.584.469	14.040.680.520	12.040.187.258	14.161.697.069
Dana Perimbangan		101.174.681.191	102.368.516.174	107.957.494.248	101.993.516.004	125.098.818.606	121.901.173.857	173.606.971.048	175.181.165.288	191.461.734.684	214.864.219.551	228.393.518.553	317.544.351.952	299.781.509.118	258.263.788.672	283.534.923.777	235.753.651.688
Bagi hasil pajak & bukan pajak		6.388.850.191	28.764.347.174	7.849.644.248	31.874.366.004	15.806.768.606	43.835.223.857	12.787.809.048	60.310.327.288	5.170.734.684	81.798.219.551	26.262.098.553	108.804.231.952	48.115.619.118	56.202.709.672	41.642.506.777	58.931.960.688
DAU		94.785.831.000	67.704.169.000	100.107.850.000	70.119.150.000	109.292.050.000	78.065.920.000	160.819.162.000	114.870.838.000	186.291.000.000	133.066.000.000	195.522.720.000	195.522.720.000	237.996.990.000	169.997.854.000	239.470.877.000	171.171.431.000
DAK		-	5.900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.608.700.000	13.217.400.000	13.668.900.000	31.894.100.000	2.421.540.000	5.650.260.000
Lain-lain Pendapatan Yg Sah		1.625.061.037	6.958.376.485	1.660.256.119	1.585.338.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		134.457.390.340	140.865.925.277	155.586.815.824	168.825.824.668	161.680.530.879	273.486.816.549	267.745.505.965	279.215.942.211	285.452.946.663	324.414.910.045	363.595.883.310	476.526.555.404	408.358.888.203	396.486.254.544	432.232.049.868	415.178.550.542
BELANJA																	
APARATUR DAERAH		35.221.794.045	67.733.227.260	43.602.464.421	53.618.871.949	37.898.958.867	79.240.558.231	44.313.522.125	97.782.696.802	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Administrasi umum		31.265.948.545	45.101.782.176	36.769.970.821	37.842.988.403	34.322.334.712	48.782.398.689	38.787.519.730	65.811.179.216	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Operasi & Pemeliharaan		3.712.788.200	3.776.518.180	3.817.713.600	6.388.438.106	3.037.239.835	8.910.696.861	4.455.267.245	10.262.500.838	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Modal		243.057.300	18.854.926.904	3.014.780.000	9.387.445.440	839.384.320	21.547.462.680	1.070.735.150	21.709.016.748	-	-	-	-	-	-	-	-
PELAYANAN PUBLIK		3.971.653.749	78.516.552.935	5.796.016.447	80.669.355.664	4.180.733.316	99.489.427.518	18.057.248.043	125.395.594.139	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Administrasi umum		146.973.609	713.969.610	1.153.921.240	1.427.687.711	793.229.336	1.407.117.539	1.764.556.570	1.751.126.293	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Operasi & Pemeliharaan		2.080.718.523	3.600.850.792	1.976.912.014	4.088.919.550	1.216.054.250	6.583.763.896	1.454.449.580	18.926.932.157	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Modal		1.743.961.617	74.201.732.533	2.665.183.193	75.152.748.403	2.171.449.730	91.498.546.083	14.838.241.893	104.717.535.689	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Bagi hasil & Bantuan Keuangan		5.151.550.500	49.928.843.549	23.204.036.071	72.176.226.307	15.954.021.792	103.317.832.507	28.729.964.763	148.168.815.090	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Tidak Tersangka		-	420.000.000	-	306.300.000	-	162.000.000	-	488.977.545	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		44.344.998.294	196.598.623.743	74.188.474.072	206.770.753.920	58.195.713.975	282.047.818.256	91.545.734.931	176.199.771.034	176.199.771.034	211.441.675.359						
Format Belanja thn 2007																	
BELANJA																	
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
B. Pegawai		-	-	-	-	-	-	54.900.182.463	63.457.871.688	124.623.670.474	250.226.876.978	135.521.882.488	312.555.723.591	140.928.102.977	239.560.641.476	-	-
B. Bunga		-	-	-	-	-	-	29.646.617.954	48.286.652.654	47.352.094.655	56.140.992.977	61.466.481.153	68.062.556.514	75.909.434.214	75.783.718.853	-	-
B. Subsidi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Hibah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Bansos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Bagi hasil kpd prov/kab/kota		-	-	-	-	-	-	10.326.666.908	54.308.204.868	21.624.970.852	24.222.697.139	12.784.602.000	15.916.225.408	4.551.326.000	13.395.444.850	-	-
B. Bantuan keuangan		-	-	-	-	-	-	5.936.097.611	85.935.092.646	29.614.664.968	72.482.790.863	48.408.186.295	58.047.619.804	54.752.241.115	60.885.570.199	-	-
B. Tidak terduga		-	-	-	-	-	-	-	31.137.571.000	-	21.664.442.000	-	24.828.964.000	-	66.041.564.638	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	2.162.176.000	-	-	-	500.000.000	-	899.150.000	-	-
BELANJA LANGSUNG																	
B. Pegawai		-	-	-	-	-	-	19.101.088.841	298.956.868.423	68.984.195.094	331.514.248.999	96.656.817.460	320.215.294.796	91.427.510.706	391.411.112.338	-	-
B. Barang dan Jasa		-	-	-	-	-	-	3.485.336.500	36.015.487.819	16.904.300.100	42.574.432.105	10.229.594.975	41.079.644.707	33.419.164.892	-	-	
B. Modal		-	-	-	-	-	-	125.801.151.841	69.527.570.854	26.080.903.724	79.747.873.460	42.842.051.103	84.600.776.626	36.973.569.540	99.083.883.489	-	-
		-	-	-	-	-	-	1.095.600.500	193.413.809.750	25.998.991.270	209.192.243.434	43.585.171.382	194.534.873.463	54.453.941.166	258.908.063.957	-	-
TRANSFER																	
JUMLAH BELANJA		44.344.998.294	196.598.623.743	74.188.474.072	206.770.753.920	58.195.713.975	282.047.818.256	91.545.734.931	176.199.771.034	176.199.771.034	211.441.675.359	211.441.675.359	211.441.675.359	211.441.675.359	211.441.675.359	211.441.675.359	211.441.675.359
Surplus / (Defisit)		90.112.392.046	(55.732.698.466)	81.398.341.752	(37.944.929.252)	103.484.816.604	(8.561.001.707)	176.199.771.034	(92.620.141.365)	211.441.675.359	(237.999.045.546)	169.988.017.742	(105.214.570.574)	176.180.188.258	(236.284.763.842)	199.876.436.284	(215.793.203.272)
PEMBAYARAN																	
Penerimaan Daerah		-	-	98.657.250.238	98.657.250.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SiPA Tahun lalu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer dari dana cadangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana luncauran keg.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan pinjaman/obligasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil penjualan aset daerah yg dipisahkan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Daerah		-	-	98.657.250.238	98.657.250.238	-	-	131.521.138.341	227.005.972.179	290.197.792.799	254.692.422.613	-	-	-	-	-	264.129.736.879
Pengeluaran Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan PBH-KB uk kab/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan kek upah pingat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer ke dana cadangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan utang pokok yg jatuh tempo		-	-	11.802.079.467	11.802.079.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000.000
Dana luncauran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer dari dana cadangan		-	-	40.169.298.392	40.169.298.392	-	-	-	-	-							